



SISTEM PERINGATAN DINI SOSIAL

**Kasus Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

SISTEM PERINGATAN DINI SOSIAL

**Kasus Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

Penulis :
Azis Suganda

Editor :
Abdul Rachman Patji



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



© 2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sistem Peringatan Dini Sosial (Kasus Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)/Azis Suganda. – Jakarta: LIPI Press, 2008.
iv + 140 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-300-9

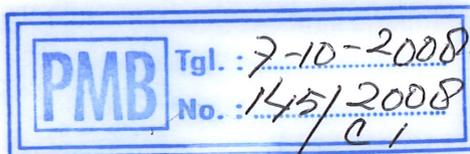
1. Peringatan Dini Sosial 2. Nangroe Aceh Darussalam

363.348

Editor : Abdul Rachman Patji
Penerbit : **LIPI Press, anggota Ikapi**



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



KATA PENGANTAR

Gempa dan tsunami yang melanda wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya pada akhir Desember tahun 2004 dan konflik bersenjata selama 30 tahun telah menyebabkan penderitaan masyarakat Aceh. Kesepakatan damai yang telah dicapai melalui MoU Helsinki pada bulan Agustus 2005, merupakan momentum yang sangat penting bagi pembangunan kembali Aceh pasca bencana, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan sosial. Pengabaian pembangunan kembali Aceh di bidang sosial diperkirakan dapat berpotensi memunculkan berbagai bentuk bencana sosial.

Buku laporan ini merupakan salah satu produk dari kegiatan yang dilakukan Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk mengantisipasi munculnya bencana social di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data lapangan di 2 (dua) kabupaten ditambah dengan informasi yang telah dikumpulkan dua tahun sebelumnya, yang menjadi landasan utama bagi pengembangan *Social Early Warning Information System* (SEWIS) sebagai output terpenting kegiatan ini.

Pengembangan sistem ini juga dengan jelas menunjukkan bagaimana temuan-temuan penelitian ilmu-ilmu sosial tidak hanya berhenti pada buku-buku laporan dan bahan-bahan tulisan lainnya, tetapi dapat dikomunikasikan secara efektif melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi, sehingga dapat diakses lebih mudah oleh para pengguna yang berkepentingan dan pembuat keputusan di tingkat pusat maupun daerah.

Selaku Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kami menyambut gembira atas terbitnya laporan ini dan menyampaikan terima kasih kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang

telah membantu terlaksananya kegiatan pengumpulan data lapangan untuk penelitian ini, sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan *Social Early Warning Information System* (SEWIS) ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang sasaran telah direncanakan.

Jakarta, Juli 2008

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI,

Dr. M. Hisyam
NIP: 320002861

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI..	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Permasalahan.....	3
3. Paradigma yang Digunakan	6
4. Tujuan Penelitian	7
5. Kerangka Konseptual	8
5.1. Anomie.....	9
5.2. Modal Sosial.....	16
5.3. Deprivasi	20
5.4. Perilaku Kolektif (<i>Collective Behavior</i>).....	21
6. Pertanyaan Penelitian	23
7. Metodologi	24
BAB II SISTEM PERINGATAN DINI SOSIAL DI KABUPATEN ACEH BESAR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	27
1. Pendahuluan.....	27
2. Kabupaten Aceh Besar Sebelum Tsunami.....	29
2.1. Wilayah.....	29
2.2. Kependudukan	33
2.3. Pendidikan	35
2.4. Kehidupan Agama	37
3. Pasca Bencana Alam Tsunami.....	41
4. SEWS (<i>Social Early Warning System</i>)	54
4.1. Topik-topik SEWS.....	54
4.2. Anomie	55
4.2.1. Ketidakpuasan.....	55
4.2.2. Masa Depan dan Peran Pemerintah	58
4.2.3. Disorientasi Norma-norma Hukum.....	62
4.2.4. Kepercayaan Terhadap Norma Adat.....	64
4.3. Modal Sosial	65

4.3.1. Kepercayaan, Solidaritas, dan Toleransi.....	65
4.3.2. Kebersamaan, Tanggungjawab, dan Kemandirian.....	70
5. Deprivasi dan Rekonstruksi.....	72
5.1. Kehilangan Hak dan Pemenuhan Kebutuhan	72
5.2. Antisipasi dan Sistem Penanggulangan Akibat Bencana	76
5.3. Deprivasi, Lembaga Pemerintahan dan Pranata Sosial	78
6. Tindakan Kolektif.....	82
6.1. Respon dan Reaksi Terhadap Peristiwa.....	82
6.2. Keterasingan dan Keikutsertaan Gerakan Massa.....	86
6.3. Pembangunan dan Perubahan Sosial	88
7. P e n u t u p	91

BAB III SISTEM PERINGATAN DINI SOSIAL DI KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	93
1. Pendahuluan.....	93
2. Kondisi Sosial Ekonomi	98
3. Anomie	110
4. Modal Sosial	119
5. Deprivasi.....	124
6. Perilaku Kolektif (<i>Collective Behavior</i>)	128
7. Penutup.....	131
BAB IV P E N U T U P.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gempa dan gelombang dahsyat Tsunami menelan korban hampir dua ratus ribu jiwa penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, semua pihak baik pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara sahabat, maupun badan-badan internasional, lembaga-lembaga non-pemerintah dalam dan luar negeri ataupun perorangan, berdatangan ke Aceh untuk membantu mengatasi segala dampak yang ditimbulkan bencana besar itu. Bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dan diberikan pada saat awal terjadinya bencana adalah dukungan psikososial, makanan dan pengobatan, karena sebagian besar korban yang selamat telah kehilangan hampir segala-galanya: rumah, harta benda, anggota keluarga, dan sanak saudara serta semua fasilitas yang biasa diperoleh untuk menunjang kehidupan normal.

Sementara itu sebagian pakar juga sibuk dengan pemikiran tentang upaya-upaya untuk mengurangi dampak (mitigasi) jika bencana terjadi lagi di tempat-tempat lain. Di antara upaya tersebut adalah memasang perangkat-perangkat deteksi di berbagai tempat yang diperkirakan rawan bencana Tsunami, seperti di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera. Peralatan tersebut merupakan bagian dari Sistem Peringatan Dini Tsunami atau *Tsunami Early Warning System* (TEWS) yang dibangun melalui kerjasama antara pakar-pakar geofisika Indonesia dan luar negeri. Pelatihan dan simulasi untuk mengantisipasi bencana tsunami juga telah dilakukan di beberapa kota. Bahkan pelatihan serupa juga dilakukan di Banda Aceh tidak lama setelah bencana terjadi, karena memang sebagian penduduk kota tersebut mengalami trauma berat beranggapan bahwa tsunami masih bisa datang lagi sewaktu-waktu.

Di tengah-tengah kesibukan untuk membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi bencana alam itu muncul pemikiran bahwa yang diperlukan lagi pembangunan masyarakat Aceh, khususnya dan masyarakat Indonesia pada sebenarnya bukan hanya sistem peringatan dini bencana alam, tetapi perlu juga merancang sistem peringatan dini bencana sosial. Pemikiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak awal kemerdekaan hingga sekarang Indonesia selalu dilanda berbagai macam bencana sosial, mulai dari konflik antar suku, antar agama, antar warga kampung, konflik antar pemerintah pusat dan daerah dan lain-lain, yang semuanya merupakan gangguan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bahkan dapat membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Secara singkat yang dimaksud dengan sistem peringatan dini sosial *social early warning system* (SEWIS) atau sistem informasi peringatan dini sosial (SIPDS) adalah suatu himpunan komprehensif berisi data dan informasi penting tentang kondisi berbagai aspek kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat dengan pengukuran secara kuantitatif/statistik serta diberi penjelasan dan interpretasi teoritis. Dengan adanya pengukuran berbagai indikator dan variabel yang mencerminkan kondisi berbagai aspek kehidupan masyarakat ini, apakah masih dalam keadaan normal atau sudah berada dalam keadaan kritis, maka akan dapat ditetapkan langkah-langkah tindakan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula untuk mengatasinya, sehingga ketahanan masyarakat bisa ditingkatkan.

Pengembangan sistem informasi peringatan dini sosial perlu dilakukan agar upaya pembangunan yang ditujukan untuk membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya lebih dapat diwujudkan. Pembangunan secara fisik tentu sangat diperlukan. Tetapi berpedoman pada tingkat-tingkat kebutuhan manusia seperti dikatakan oleh pakar ilmu sosial terkenal bernama Abraham Maslow, kebutuhan fisiologis atau yang bersifat fisik seperti pangan, sandang dan papan, memang berada pada tingkat primer. Tetapi selanjutnya manusia menurut kodratnya menginginkan terpenuhinya pula tingkat

kebutuhan selanjutnya, termasuk rasa aman dan tenteram, saling menyayangi, dihargai harkat dan martabatnya, dan kebutuhan untuk menunjukkan suatu kelebihan yang menurutnya patut diakui orang lain (aktualisasi diri).

Penemuan semua tingkat kebutuhan seperti di atas ini tampaknya merupakan persoalan besar yang dihadapi dalam pembangunan nasional ini, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam, mengingat masyarakat di wilayah Provinsi NAD dewasa ini menghadapi suatu akumulasi persoalan. Dapat dikatakan bahwa banyak anggota masyarakat yang mengalami trauma dan keadaan serba tidak pasif (anomie) yang disebabkan oleh terjadinya:

- Disfungsionalisasi pranata sosial tradisional akibat kebijakan pemerintah orde baru yang menyeragamkan sistem dan administrasi pemerintah desa.
- Konflik bersenjata yang berlangsung selama 30 tahun dengan berbagai dan masalah yang ditimbulkannya
- Bencana gempa dan gelombang tsunami yang telah menelan korban ratusan ribu jiwa dan harta benda.

2. Permasalahan

Sebagai dampak dari ketiga penyebab utama di atas ketahanan masyarakat Aceh mengalami pelemahan. Tergantung pada status sosial ekonomi dan dampak bencana yang dialaminya warga masyarakat yang menghadapi berbagai masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 kategori sebagai berikut:

- (1) *Kehilangan tanah (landlessness)*. Tergusur dari lahan menyebabkan hilangnya pondasi utama di atas mana berlangsung semua kegiatan produktif, komersial dan kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan suatu bentuk kehilangan modal dan pemiskinan yang paling dasar pada orang-orang yang mengalami pengusuran, karena mereka bukan saja kehilangan modal alami (tanah) tetapi juga modal yang diperoleh melalui hasil usaha manusia sendiri.

- (2) *Kehilangan tempat tinggal (homelessness)*. Kehilangan tempat tinggal dan berteduh membawa kemerosotan yang sangat parah pada tingkat kehidupan. Bagi sebagian penduduk yang terganggu kondisi seperti ini mungkin hanya bersifat sementara, tetapi untuk sebagian lainnya bisa berlangsung lama. Dalam makna budaya yang lebih jauh, kehilangan tempat tinggal keluarga juga berarti kehilangan ruang budaya kelompok, yang berakibat timbulnya “alienasi” dan deprivasi.
- (3) *Kehilangan pekerjaan (joblessness)*. Kehilangan pekerjaan sebagai sumber penghasilan kehidupan akibat perpindahan paksa terjadi bukan saja di kota tetapi juga di perdesaan. Yang paling mudah kehilangan pekerjaan adalah buruh tani, nelayan, karyawan usaha industri dan jasa, tukang dan pemilik usaha kecil. Ditempat relokasi tidak mudah menciptakan lapangan kerja baru karena untuk itu diperlukan modal yang cukup besar. Pengangguran bisa berlangsung terus meskipun secara fisik mereka sudah cukup lama menetap di lokasi yang baru.
- (4) *Tak ada jaminan gizi yang cukup (food insecurity)*. Penduduk yang mengalami perpindahan paksa memiliki resiko besar kekurangan gizi yang kronis. Asupan kalori dan protein berada di bawah level minimum yang diperlukan untuk pertumbuhan normal dan bekerja. Kekurangan gizi merupakan akibat dari kondisi pemukiman baru yang tidak memadai. Berkurangnya persediaan makanan dan penghasilan secara tiba-tiba menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi cenderung yang berlangsung dalam jangka panjang.
- (5) *Merosotnya jaminan kesehatan*. Merosotnya kualitas kesehatan karena relokasi menyebabkan terjadinya ketegangan sosial, rasa tidak tenteram, trauma dan berjangkitnya berbagai penyakit. Pasokan air bersih yang tidak cukup dan sanitasi yang buruk memperbesar kemungkinan terjadinya wabah kolera, diare dan disentri. Segmen yang paling lemah dari spektrum demografi: bayi, anak-anak dan orang-orang lanjut usia memiliki

kemungkinan paling besar mendapat gangguan kesehatan. Orang-orang tinggal di tempat pengungsian lebih mudah menjadi sakit, dan bila terserang penyakit bisa lebih parah dibandingkan mereka yang tetap berada di tempat asalnya.

- (6) *Kehilangan akses terhadap fasilitas umum dan milik bersama.* Kehilangan akses terhadap milik bersama seperti sumber air, padang gembalaan dan tanah pekuburan dapat menyebabkan merosotnya penghasilan dan kualitas hidup. Pemerintah pada dasarnya tidak memberikan kompensasi bagi fasilitas-fasilitas semacam itu di tempat-tempat relokasi secara memadai. Kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan umum, seperti air bersih dan penerangan listrik juga dialami oleh hampir semua warga yang terkena bencana.
- (7) *Marginalisasi.* Marginalisasi terjadi ketika keluarga kehilangan kemampuan ekonomi dan mengalami “mobilitas menurun”: petani berpenghasilan sedang menjadi petani gurem, pemilik warung dan perajin menurun tingkat penghasilannya sehingga berada di bawah garis kemiskinan. Banyak pula orang tidak lagi memiliki peluang memanfaatkan keterampilan yang dimiliki di lokasi pemukiman yang baru. Oleh karenanya modal manusia (human capital) yang dimiliki menjadi terbuang percuma. Perpindahan karena terpaksa cenderung menyebabkan turunya citra diri. Marginalisasi menyebabkan menurunnya atau bahkan hilangnya status sosial serta kepercayaan pada diri sendiri (self confidence), munculnya perasaan telah menjadi korban ketidakadilan, yang semuanya merupakan ciri-ciri perilaku anomis. Keluara yang terpaksa pindah ke pemukiman baru jarang sekali bisa memulihkan sepenuhnya status sosial dan kemampuan ekonomi yang dimiliki sebelumnya.
- (8) *Disartikulasi sosial.* Pengungsian yang terjadi karena konflik dan bencana alam menceri-beraikan jaringan sosial yang ada dan menimbulkan perasaan tidak berdaya. Komunitas menjadi bubar atau berantakan, pola-pola organisasi sosial dan hubungan antar

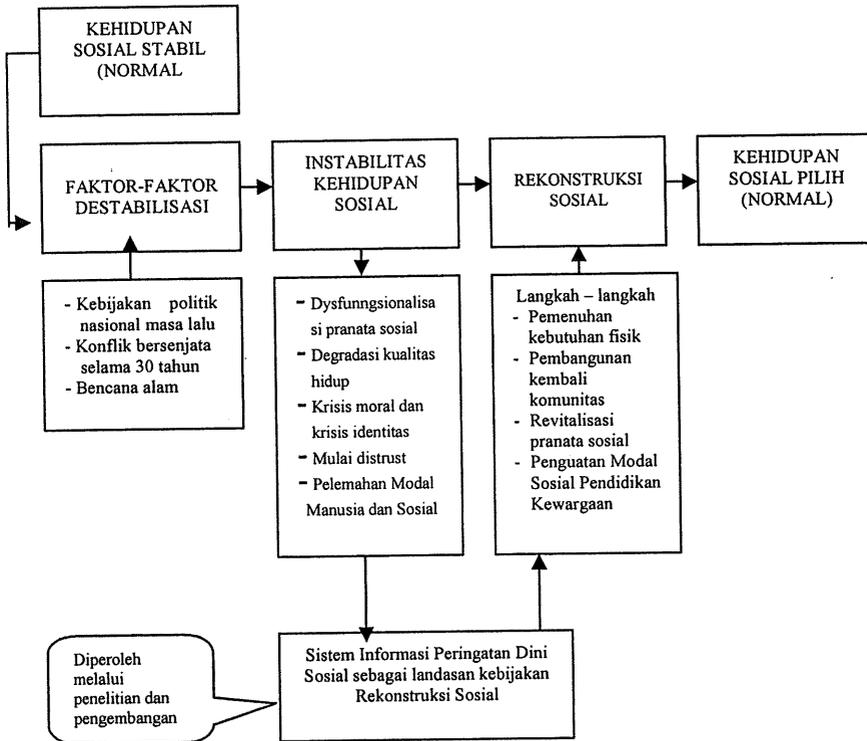
warga menjadi hilang, dan kelompok-kelompok yang semula terbentuk berdasar hubungan kekrabatan juga menjadi terpecah-pecah. Jaringan informal yang berfungsi sebagai wadah tolong-menolong sesama warga, juga turut hilang. Destabilisasi kehidupan komunitas cenderung menimbulkan suatu keadaan “anomie”, perasaan tidak tenteram dan kehilangan rasa memiliki identitas. Hal ini akhirnya cenderung mengubah tempat tinggal mereka yang berada di lokasi-lokasi penampungan itu sebagai daerah anomie atau daerah-daerah terkena dampak anomie. Tercabiknya pola-pola organisasi masyarakat, interaksi dan resiprositas menyebabkan hilangnya nyata “modal sosial” yang amat berharga, melengkapi kehilangan milik berharga lainnya, tanah dan harta benda lain, seperti telah disebutkan sebelumnya. Hilangnya modal sosial sebagai dampak disartikulasi sosial ini kurang begitu dipahami dan ditanggulangi oleh para perencana pada umumnya, karena begitu dipahami dan ditanggulangi oleh para perencana pada umumnya, karena pikiran dan tenaga mereka pada umumnya lebih tertuju pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat fisik. Padahal sesungguhnya kehilangan modal sosial ini akan membawa dampak lanjutan, baik pada kehidupan sosial mereka yang langsung menjadi korban bencana dan konflik maupun generasi berikutnya. Dalam kehidupan fisik mereka tidak kelihatan punya masalah, tetapi sebenarnya mereka telah kehilangan sesuatu yang amat berharga dalam hidupnya, yaitu komunitas dengan segala aspek spasial, temporal dan kultural, dari mana mereka memperoleh identitas dari sebelumnya.

Kedelapan pokok masalah yang diuraikan di atas perlu mendapat penanganan yang seimbang dan harus dilakukan secara simultan dalam upaya rekonstruksi sosial yang akan dilakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

3. Paradigma yang Digunakan

Pemahaman terhadap perkembangan dan perubahan kondisi sosial yang dialami masyarakat Aceh dan bagaimana langkah-langkah

yang segogyanya ditemouh untuk melakukan rekonsrtuksi sosial menuju kondisi kehidupan yang normal, secara sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan paradigma atau cara pandang sebagai berikut.



Bagan 1 : Paradigma Rekonstruksi Sosial di Provinsi NAD

4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan memberikan landasan dan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kegiatan

rekonstruksi sosial dalam rangka peningkatan ketahanan masyarakat (*social resilience*) di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5. Kerangka Konseptual

Secara sosiologis pemahaman terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Aceh pada saat ini perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsep-konsep yang relevan. Ada tiga konsep sosiologis yang dipandang sangat cocok untuk keperluan tersebut, yakni konsep-konsep anomie, modal sosial dan deprivasi. Dengan menggunakan konsep anomie akan dapat dijelaskan seberapa jauh ketidakpastian dalam berbagai bidang kehidupan yang dialami masyarakat sebagai dampak ketiga faktor tersebut di atas, yakni kebijakan masa lalu pemerintah yang telah menyebabkan berbagai pranata sosial tradisional menjadi disfungsional, konflik vertikal dan horizontal yang telah mencabik-cabik keutuhan dan kerukunan dalam masyarakat, serta bencana alam gempa dan tsunami yang telah menyebabkan hilangnya kepastian akan kehidupan ekonomi dan sosial sebagian besar warga masyarakat Aceh yang menjadi korbannya.

Penelitian yang dilakukan menjelaskan terjadinya situasi tidak menentu dalam masyarakat Aceh yang timbul sebagai akibat perubahan dan perkembangan di bidang kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini, sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari konflik dan bencana gempa dan tsunami yang terjadi akhir tahun lalu. Temuan-temuan penelitian merupakan bahan dasar bagi pengembangan *social early warning system*, dengan indikator-indikator yang akan menunjukkan tingkat ketahanan maupun kerentanan masyarakat terhadap berbagai perkembangan serta perubahan situasi politik, ekonomi dan sosial.

Untuk memahami kondisi masyarakat digunakan beberapa konsep atau pendekatan teoritis, terutama konsep anomie. Selanjutnya juga akan ditelaah keberadaan norma-norma sosial atau moralitas masyarakat yang diasumsikan mengalami degradasi dan bahkan juga

menyebabkan terjadinya krisis identitas, sebagai dampak kebijakan politik nasional masa lalu dan juga berlanjut hingga sekarang serta konflik yang telah memarginalkan kehidupan sosial, ditambah lagi dengan bencana alam yang telah menimbulkan dampak luas terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan modal sosial juga akan digunakan untuk melihat sejauh mana masih adanya rasa keterikatan terhadap komunitas baik dalam kelompok primordial (berdasarkan etnisitas atau agama) maupun perasaan sebagai warga dan bagian dari kelompok yang lebih besar sebagai bangsa. Selain kedua konsep ini penelitian juga dilengkapi dengan dua konsep penting lainnya, **deprivasi dan perilaku kolektif** untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi yang dialami masyarakat Aceh pada waktu ini. Berikut ini akan dipaparkan secara singkat pengertian dari masing-masing konsep tersebut dan kaitan satu dengan yang lainnya.

5.1. Anomie

Anomie dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok masyarakat tidak mampu memberi makna terhadap perubahan dan perkembangan yang sedang berlangsung di berbagai bidang kehidupan. Situasi anomie ini selalu menyertai setiap perubahan sosial. Tinggi rendah kadar anomie ini sebanding dengan seberapa cepat dan besar perubahan yang terjadi. Dalam perubahan sosial yang terjadi secara perlahan-lahan, apalagi jika masih dalam batas-batas kerangka dan system nilai sosial dan budaya yang menjadi dasar pedoman sikap dan perilakunya, masyarakat akan dapat memberi makna dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Tidak dimilikinya sistem nilai yang sesuai guna menentukan sikap dan perilaku terhadap perubahan situasi bisa menyebabkan orang merasa tidak yakin suatu tindakan yang akan dilakukan salah atau benar.

Selain itu juga bisa muncul perasaan tidak puas karena kehilangan kontrol terhadap situasi, menjadi pesimis kerana berada

pada posisi yang tidak menguntungkan, serta kehilangan kepercayaan terhadap segala kelembagaan sosial yang ada. Gejala-gejala anomie seperti ini dengan segala dampaknya terlihat dengan jelas dalam masyarakat kita sejak beberapa waktu belakangan ini. Kontribusi yang penting dari konsep anomie yang digunakan adalah kemampuannya untuk upaya menjelaskan sebab dan akibat krisis multidimensional yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sebagai suatu pendekatan sosiologis dalam menjelaskan dampak perubahan sosial anomie memang bukanlah suatu konsep yang baru. Konsep ini telah diperkenalkan dan digunakan pertama kali oleh Emile Durkheim untuk menjelaskan fenomena keterasingan, sebuah gejala yang dialami banyak warga masyarakat yang timbul sebagai akibat suatu proses perubahan sosial mendasar yang berlangsung di Perancis sepanjang abad ke 19. Perancis yang semula menganut sistem pemerintahan monarki berubah menjadi sebuah Negara dengan sistem pemerintahan republik, dari masyarakat agraris tradisional kemudian mengalami pergeseran menjadi masyarakat industri, suatu perubahan yang mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke 19.

Hampir setengah abad sejak diperkenalkan oleh Durkheim konsep anomie seolah-olah tenggelam dan tidak digunakan sebagai alat analisis sosial. Baru pada akhir tahun 1930an Robert K. Merton (1938) menggunakannya untuk menjelaskan gejala yang terjadi pada masyarakat Amerika ketika menghadapi kesulitan ekonomi pada waktu itu. Merton memperkaya pengertian konsep anomie dengan menempatkannya bukan lagi sebagai situasi yang dialami orang sebagai individu, tetapi lebih sebagai suatu keadaan yang muncul karena kesenjangan atau diskrepansi antar struktur sosial dan struktur budaya, sebagai akibat dari proses perubahan sosial.

Bagi Merton, anomie ialah suatu keadaan berantakannya struktur budaya, yang terutama terjadi karena ketimpangan yang berlangsung berkepanjangan antara norma dan tujuan budaya dengan struktur sosial yang berlaku yang membatasi kemungkinan para

anggota suatu kelompok masyarakat untuk mewujudkan tujuan budaya itu. (dalam Sztompka, 1986). Keadaan anomie timbul karena tujuan budaya bangsa Amerika waktu itu yang tersimpul di dalam istilah *The American Dream*, yakni mencapai kesuksesan materi tanpa batas, tidak didukung oleh struktur sosial dan struktur kesempatan (*opportunity structure*) yang menjadi sangat terbatas karena adanya krisis ekonomi. Dalam upaya untuk tetap bisa mewujudkan tujuan budaya itulah Merton melihat banyak orang Amerika yang menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku (*deviant behavior*), yakni menempuh cara apa saja untuk memperkaya diri. Pada waktu inilah muncul banyak *robber barons*, orang-orang yang menjadi kaya berkat ketegaannya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Kontribusi penting dari Merton dalam hal ini adalah keberhasilannya membuat tipologi tentang bentuk-bentuk respon yang dipilih orang-orang menghadapi kesenjangan tersebut. Merton menunjukkan adanya lima kemungkinan pilihan, yakni mulia dari pertama, menyelaraskan budaya dengan struktur sosial yang ada (*conformity*); kedua, menciptakan norma-norma baru (*innovation*); ketiga, mengikuti saja struktur sosial tanpa mepedulikan landasan norma budayanya (*ritualism*); keempat, menjauhkan diri dari kenyataan yang timbul akibat pertentangan antar struktur dan kultur itu (*retreatism*); dan kelima, sampai kepada berusaha menjungkirbalikan struktur sosial dan struktur budaya yang ada dan mencoba menciptakan yang baru samasekali (*rebellion*). Apa yang terjadi terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya dapat dijelaskan dengan menggunakan tipotologi Merton ini.

Kajian ini akan memetakan situasi anomie dan keberadaan modal sosial pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Situasi anomie dapat dilihat dari kesulitan individu untuk beradaptasi yang berakibat hilangnya kemampuan untuk melakukan orientasi sosial secara umum, meningkatnya rasa tidak aman dan

terpinggirkan, meningkatnya ekspektasi secara tak terkendali, perasaan deprivasi relative ataupun absolute dan berkembangnya dorongan untuk mempertanyakan keabsahan nilai-nilai dasar yang ada (Lanyon dan Western)

Dalam kaitan dengan anomie ini penelitian juga mengkaji keberadaan sistem moral masyarakat Aceh pada saat ini, yang diperkirakan mengalami degradasi akibat konflik yang berlangsung selama tiga dasawarsa. Seperti diakui oleh para tokoh masyarakat Aceh sendiri, nilai-nilai keAcehan dalam kehidupan masyarakat telah mengalami erosi. Dengan diberikannya status ekonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terbuka peluang yang besar untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai keAcehan. Namun seberapa jauh nilai-nilai keAcehan sebagai bagian dari sistem moral masyarakat Aceh tentu sangat tergantung pada seberapa jauh hal tersebut dianggap penting dalam kerangka besar rekonstruksi sosial untuk masyarakat Aceh.

Perlu ditekankan di sini dalam pengertian sosiologis sistem moral adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang dihayati keberadaannya oleh suatu komunitas dan disepakati sebagai pedoman dalam bersikap, berperilaku dan berinteraksi secara benar terhadap sesama anggota komunitas sendiri maupun dalam berhubungan dengan anggota komunitas lain. Durkheim mengatakan bahwa sistem moral atau moralitas adalah seperangkat nilai, keyakinan dan norma yang dimiliki suatu masyarakat secara kolektif yang membatasi pikiran dan tindakan setiap individu yang menjadi warganya. Moralitas atau sistem moral itu harus memiliki otoritas-artinya setiap orang merasa harus mengindahkannya dan mereka mau diikat oleh aturan-aturan itu.

Selain itu, aturan-aturan moral merupakan produk dari deliberasi atau proses musyawarah yang berlangsung dalam kelompok, yang begitu menjadi kesepakatan akan mengikat orang-orang ke dalam kelompok bersangkutan dan membuat mereka sebagai bagian dari jaringan hubungan atau *network of relations* yang berada di atas

eksistensi individunya masing-masing. Moralitas memberi semangat disiplin kepada setiap anggota guna melakukan pengendalian dan pengikatan diri kepada kelompok.

Jacques Ellul (1969) menggolongkan moralitas ke dalam tiga kategori, yakni: moralitas hidup (*lived morality*), kebiasaan moral (*moral custom*), dan moralitas teoritis (*theoretical morality*). Moralitas hidup adalah seperangkat sikap-sikap moral yang efektif dalam suatu masyarakat pada masa tertentu. Sikap-sikap moral ini tidak sepenuhnya konsisten sepanjang waktu, dan sebagian besar juga tidak diciptakan secara sadar, Moralitas hidup lebih merupakan pencerminan keadaan saat ini tentang apa yang dianggap penting dan baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan tentang citra yang ideal dari masyarakat mengenai dirinya sendiri. Kebiasaan moral adalah moralitas hidup pada masa lalu yang masih diteruskan hingga waktu ini. Moralitas semacam ini hanya bisa tetap bertahan sejauh tidak bertentangan dengan moralitas hidup yang berlaku pada saat ini. Sementara itu, moralitas teoritis adalah seperangkat etika normative dari para filosof atau rohaniwan yang seringkali diwujudkan dalam bentuk system filsafat.

Degradasi moral atau menggunakan istilah yang lebih populer krisis moral mulai timbul apabila (1) berbagai unsure moralitas mulai mengalami erosi, (2) sebagian penting anggota masyarakat tidak lagi merasa terikat dengan aturan –aturan moral yang telah menjadi kesepakatan bersama, (3) moralitas mengalami pelemahan sehingga tidak lagi memiliki otoritas atau kekuasaan untuk tidak mengendalikan sikap dan perilaku anggota masyarakat, (4) tidak terjadi lagi kemarahan moral atau moral outrage dari sebagian besar anggota masyarakat terhadap seseorang yang melanggar aturan moral (Durkheim, dalam Lukes, 1972).

Degradasi atau krisis moral berkaitan erat dengan krisis identitas. Krisis identitas terjadi ketika warga suatu komunitas tidak mampu lagi untuk secara bersama-sama melakukan deliberasi guna mengidentifikasi hal-hal yang mengikat mereka ke dalam suatu

kelompok sosial. Moralitas hidup atau system moral yang berlaku dalam suatu komunitas dapat menjadi bagian yang sangat penting dari keseluruhan identitas suatu bangsa, kelompok etnis atau kelompok sosial lainnya. Pemaparan di bawah ini dimaksudkan sebagai elaborasi dari pernyataan di atas.

Dalam pengertian paling sederhana identitas adalah suatu pemikiran mengenai apa dan siapa kita. Identitas dapat menyangkut seseorang sebagai individu maupun sejumlah orang sebagai suatu kelompok sosial. Identitas sosial pada dasarnya adalah kerangka kategorisasi yang sengaja dibuat untuk menegaskan perbedaan dan kontras antar kelompok. Para anggota yang memandang penting menunjukkan perbedaan dan kontras antar kelompok ini secara proaktif menanamkan perasaan “in-group”, dengan menempatkan diri terpisah dari anggota kelompok lain. Dengan cara seperti ini mereka menjalin hubungan yang erat di antara sesama mereka sendiri dan menumbuhkan pentingnya rasa memiliki terhadap kelompok, serta perlunya mempertahankan kepentingan kelompok.

Akan tetapi penting untuk dipahami bahwa identitas sosial dan identitas nasional, memiliki satu ciri penting, yakni keberadaannya yang selalu berfluktuasi. Sejauh mana seseorang atau sekelompok orang mengidentifikasi diri dengan suatu bangsa, misalnya, ditentukan oleh kekuatan khas dari bangsa tersebut. Apalagi, seperti dikatakan Anderson (1991) sebenarnya bangsa adalah komunitas politik bayangan – dan dibayangkan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan membatasi dan berdaulat.

Komunitas bangsa hanya ada dalam bayangan, karena para warga dari sebuah bangsa yang paling kecilpun tidak kenal dengan sebagian besar sesama warga bangsanya, tidak pernah bertemu dengan mereka atau bahkan mendengar tentang mereka. Namun di dalam pikiran masing-masing hidup suatu bayangan tentang komunitas bangsa mereka. Dengan demikian dapat dipahami, begitu suatu Negara kehilangan kedaulatan dan kekuatan perekat bagi seluruh warganya sebagai sebuah bangsa, maka sebagian warga mulai

mempertanyakan apakah mereka masih layak mengidentifikasi diri sebagai warga Negara tersebut. Apa yang terjadi di Aceh dan Irian Jaya, misalnya, dapat dilihat dari perspektif ini.

Sementara itu, sebagian orang cenderung mengidentifikasi dirinya dengan banyak kelompok sosial, berdasarkan factor-faktor seperti ras, etnisitas, kelas, jender, asal Negara dan seterusnya. Faktor-faktor ini menjadi menonjol pada waktu dan cara yang berbeda. Sentimen, emosi dan perilaku dari para anggota kelompok yang menonjol itu cenderung dipengaruhi oleh norma-naorma dan aspirasi dari kelompok bersangkutan.

Krisis identitas muncul apabila seseorang mulai merasa tidak mampu menjelaskan dengan baik siapa dirinya dan apa yang ia lakukan. Tidak jelasnya identitas itu terutama disebabkan perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan yang terjadi disekelilingnya. Hal-hal yang sebelumnya bisa menjadi sumber identifikasi diri, seperti system kekerabatan, hubungan keluarga, komunitas, tempat ibadah, aturan-aturan moral dan adapt dan sebagainya mulai memudar dan kehilangan arti. Sebagai kompensasi hilangnya berbagai ciri identitas sosial, sebagian orang berupaya untuk mencari identitas individu.

Dalam hal ini seringkali identitas tidak dibentuk melalui pengalaman dan usaha bersama serta melalui proses pembelajaran, tetapi identitas itu bagi sebagian orang adalah benda-benda material yang dimiliki dan dikonsumsi. Terutama dalam masyarakat perkotaan budaya konsumtif yang sudah ada sebelumnya sekarang menjadi semakin mengental, dan dianggap lebih penting sebagai identitas diri daripada segala lainnya. Dalam kekosongan nilai-nilai moral sebagai sumber identifikasi diri sebagian orang berupaya mendapatkannya melalui kepemilikan materi. Bagaimanapun ini menunjukkan bahwa identitas itu memang mutlak diperlukan, baik untuk menunjukkan eksistensi suatu kelompok maupun eksistensi individu. Oleh karena itu kegagalan untuk memiliki atau hilangnya sejumlah ciri identitas

yang dianggap memadai untuk dimiliki akan menjurus kepada terjadinya krisis identitas.

Perlu pula dipahami bahwa tidak semua aspek identitas itu selalu baik. Rasa keterkaitan yang berlebihan kepada negeri sendiri, keyakinan politik, atau kelompok etnis dan rasial tertentu bisa saja menyebabkan munculnya sikap negative terhadap orang-orang yang berasal dari kelompok lain. Hal semacam ini akhirnya menjurus pada sikap nasionalisme berlebihan, etnosentis, resisme, rasa tidak senang pada orang asing (*xenophobia*) dan seterusnya. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya dalam proses identifikasi para anggota suatu kelompok lebih cenderung mencari perbedaan ketimbang persamaan dengan kelompok lain.

5.2. Modal Sosial

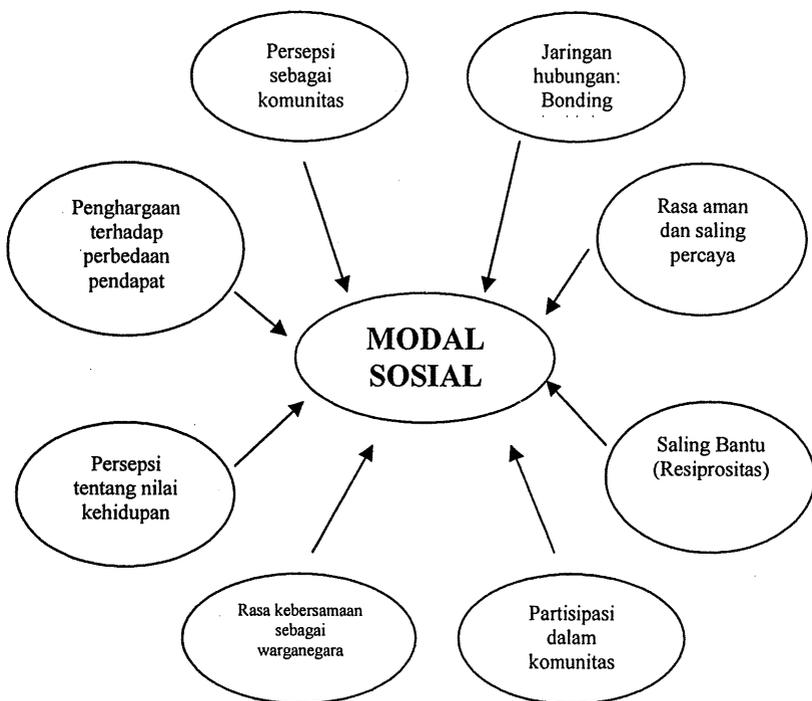
Prinsip dasar dari modal sosial adalah bahwa hanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama yang dapat maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Suatu kelompok masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi mereka sendiri juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Dengan demikian modal sosial menekankan perlunya kemandirian dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, sementara bantuan dari luar dianggap sebagai pelengkap guna memicu inisiatif dan produktivitas yang muncul dari dalam masyarakat sendiri.

Sebagai sebuah konsep sosiologis modal sosial merupakan pendekatan yang semakin intensif digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di banyak Negara, termasuk Indonesia. Robert Putnam, salah seorang pakar modal sosial yang paling terkenal dalam tulisan yang merupakan hasil kajiannya (Putnam 1995), menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan

jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. Pertama, adanya jaringan sosial memungkinkan terjalannya koordinasi dan komunikasi yang akhirnya dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat.

Kedua, kepercayaan (trust) memiliki implikasi sangat positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa percaya (mutual trust) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Ketiga, berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideology dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.

Berangkat dari hasil kajian Putnam ini serta laporan hasil kajian modal sosial di banyak Negara di dunia dari yang ditulis banyak pakar lainnya belakangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memberi landasan pengetahuan bagi upaya rekonstruksi sosial masyarakat Aceh secara komprehensif pemahaman tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat tidaklah cukup hanya sampai dengan pemetaan tingkat anomie dan krisis moral serta identitas. Pengetahuan tentang kondisi modal sosial masyarakat amat diperlukan, karena hal inilah yang menjadi titik tolak bagi pembangunan kembali komunitas (community rebuilding) dan revitalisasi pranata sosial, atau lebih konkritnya peneguhan kembali nilai-nilai ke-Acehan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebhinnekaan khazanah budaya bangsa Indonesia.



Bagan 2: Indikator untuk mengukur modal sosial

Seperti terlihat pada Bagan 2 di atas tingkat modal sosial yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tercermin dari keberadaan delapan unsur penunjangnya. Mulai dari seberapa jauh seseorang masih merasakan dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas primordial, baik berupa kelompok etnik maupun kelompok keagamaan, yang dianggap sebagai sumber utama identifikasi dirinya, sampai pada seberapa jauh pula ia memiliki rasa kebersamaan sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, warga bangsa Indonesia. Pada masyarakat dengan ikatan primordial yang lebih kuat, rasa kebersamaan sebagai bangsa tidak mungkin timbul apabila identitas kelompoknya tidak terlebih dahulu mendapat

pengakuan dari pihak lain. Pengembangan modal sosial dari suatu komunitas seperti ini haruslah dilakukan dengan terlebih dahulu memberi pengakuan terhadap nilai-nilai sosial budaya sebagai sumber identitas dan bagian dari sistem moral yang mereka miliki.

Keterikatan emosional terhadap kelompok primordial (*bonding social capital*) secara berlebihan cenderung menyebabkan hubungan antar kelompok (*bridging social capital*) menjadi renggang. Dalam keadaan ekstrim bahkan dapat menimbulkan berbagai sikap dan perilaku negatif dari satu kelompok lain, seperti sikap saling curiga, kompetisi tidak sehat dalam mendapatkan peluang ekonomi atau kekuasaan politik, konflik horizontal, dan sebagainya. Modal sosial intra kelompok yang bersifat negatif ini yang oleh pakar disebut sebagai *downside social capital* ini memang tidak mungkin dapat dihilangkan samasekali karena telah menjadi bagian dari strategi untuk kelangsungan hidup dan budaya dari setiap komunitas (*communitarian culture*). Namun sebagai warga dari sebuah negara setiap orang juga dituntut untuk memiliki rasa kebersamaan dengan orang-orang lain di luar komunitas primordialnya. Untuk itu selain menjadikan kultur komunitas sebagai landasan pola pikir dan tindakan dalam kelompok primordialnya, setiap warganegara juga harus menjadikan budaya kewargaan (*civic culture*) sebagai landasan pola pikir dan perilaku dalam hubungan dengan kelompok – kelompok lain di luar kelompok primordialnya. Pentingnya menjaga keharmonisan hubungan dengan kelompok lain, seperti antara lain tercermin dalam sebuah pepatah dari suatu daerah “di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung” ini tidaklah menjadi bagian dari bawah sadar setiap orang. Oleh karena itu pendidikan kewargaan atau *civic education* mutlak diperlukan guna meningkatkan rasa kebersamaan sebagai warga dari komunitas yang lebih besar: komunitas bangsa.

Sementara itu dengan menggunakan indikator modal sosial seperti di atas akan dapat diketahui seberapa jauh masyarakat Aceh pada saat ini masih memiliki tiga unsur penting yang diperlukan untuk menata masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera,

yakni jaringan hubungan sosial baik di antara sesama warga dalam komunitas masing maupun dengan orang-orang di luar komunitasnya sendiri; sejauh mana mereka masih memiliki rasa saling percaya (mutual trust) serta sejauh mana mereka masih memiliki nilai-nilai budaya untuk saling membantu (norms of reciprocity) baik dalam mengatasi masalah pribadi maupun dalam menghadapi masalah bersama komunitasnya. Pemahaman tingkat keberadaan ketiga unsur tersebut diperlukan untuk merencanakan langkah bagi pembangunan kembali komunitas (*community rebuilding*) sebagai bagian rekonstruksi sosial secara keseluruhan.

5.3. Deprivasi

Tidak kurang penting digunakan untuk menjelaskan kondisi yang dialami masyarakat Aceh saat ini adalah konsep deprivasi. Deprivasi dapat didefinisikan secara singkat sebagai suatu keadaan tidak menyenangkan yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang telah kehilangan berbagai milik atau hak, baik karena bencana alam atau karena dirampas orang lain. Atau dapat juga berarti suatu ketidakpuasan yang dirasakan akibat diperlakukan tidak adil, baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain yang telah melakukan yang tidak adil tersebut, seperti NGO yang dianggap telah melakukan pilih kasih dalam memberikan berbagai bantuan.

Deprivasi yang dialami masyarakat Aceh sebagai dampak dari konflik dan bencana alam sangat beragam, mulai dari kehilangan lahan, tempat rumah atau tempat tinggal, mata pencaharian (pekerjaan), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kehilangan akses terhadap berbagai jenis sarana pelayanan umum seperti listrik, telepon dan air bersih, serta kehilangan komunitas sebagai ruang-ruang interaksi sosial dan sumber identitas diri. Dapat dikatakan banyak korban konflik dan bencana alam yang hingga kini masih tinggal di tenda dan barak-barak penampungan sementara, ataupun yang mengungsi ke tempat lain di luar lingkungan tempat tinggal semula mengalami deprivasi absolut karena telah kehilangan hampir semua jenis kebutuhan hidup seperti yang telah disebutkan.

Temuan penelitian tentang tingkat deprivasi, anomie dan modal sosial yang ada dalam masyarakat Aceh bukan saja diperlukab sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan rekonstruksi sosial yang bersifat mendesak, tetapi juga sangat penting sebagai landasan untuk membangun sistem peringatan dini sosial (*social early warning system*) yang bersifat strategis. Pelajaran sejarah belakangan ini telah memberi pelajaran yang sangat berharga. Tingkat ketidakpastian atau anomie yang tinggi, lemahnya modal sosial, dan perasaan deprivasi yang dipersepsikan semakin banyak orang, akhirnya bisa membentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) yang selanjutnya mengarah pada aksi bersama (*collective action*) yang tidak mungkin dapat diatasi melalui pendekatan keamanan (*security*) seperti yang selama ini digunakan.

5.4. Perilaku Kolektif (*Collective Behavior*)

Sistem Informasi Peringatan Dini Sosial (*social early warning system*) dikembangkan dengan memperlihatkan kekuatan hubungan antara tiga konsep yang menjelaskan kondisi sosial, yakni anomie, modal sosial dan deprevasi dengan perilaku kolektif (*collective behavior*) yang mengarah pada tindakan bersama (*collective action*) yang cenderung bersifat negatif dan destruktif. Perilaku kolektif yang kemudian mengarah pada tindakan bersama (*collective action*), seperti diformulasikan Neil Smelser (1962), akan muncul apabila telah memenuhi enam prasyarat, yakni:

- (1) Adanya ketegangan struktur (*structural strain*), suatu keadaan di mana orang merasa tidak puas dengan kondisi kelembagaan pemerintah yang ada, karena dianggap sudah tidak lagi mampu melaksanakan fungsi pelayanan yang memuaskan bagi kepentingan masyarakat luas.
- (2) Kondisi struktur yang kondusif (*structural conduciveness*), yang memungkinkan sejumlah besar orang untuk melakukan aksi bersama. Suasana kehidupan yang ultra demokrasi, serta lemahnya wibawa penegak hukum dan keamanan sejak era reformasi dan otonomi daerah memberi peluang besar bagi

munculnya berbagai bentuk gerakan bersama dari orang-orang yang berasal dari berbagai golongan kepentingan. Apa yang terjadi pada pilkada di hampir semua tempat mencerminkan *structural condusiveness* ini.

- (3) Adanya keyakinan bersama (*generalized belief*), yakni bahwa adanya ketidakadilan telah dipersepsikan rasakan oleh hampir semua orang sehingga dipandang perlu melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang menjadi penyebab ketidakadilan itu.
- (4) Adanya pemicu (*trigger*), yakni adanya suatu peristiwa yang dianggap banyak sebagai orang alasan kuat untuk mulai gerakan bersama.
- (5) Mobilitas massa. Tindakan bersama (*collective action*) akan terjadi apabila ada orang-orang yang memiliki kemampuan dan suber daya untuk bertindak sebagai penggerak atau pengarah massa.
- (6) Kontrol sosial. Untuk berhasil mencapai sasaran dan tujuan gerakan massa diperlukan kemampuan pegelolaan orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin gerakan. Apabila gerakan massa tidak terkontrol kemungkinan timbulnya tindakan-tindakan anarki yang dapat menyebabkan tujuan gerakan tidak tercapai sangat besar.

Keenam prasyarat bagi munculnya tindakan kolektif dalam berbagai bentuk, seperti demonstrasi massa, pemogokan, konflik fisik antar kelompok masyarakat, merupakan indikator dasar dalam penggunaan sistem deteksi dalam peringatan dini sosial. Tetapi yang lebih penting dalam pengembangan sistem informasi peringatan dini sosial (*social early warning system*) secara komprehensif adalah memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya akumulasi dan kristalisasi perilaku sosial yang mengarah pada tindakan kolektif tersebut. Dalam hal ini kondisi kehidupan masyarakat yang dapat diamati dari tingkat anomie, modal sosial dan tingkat deprivasi yang dimilikinya merupakan tiga faktor utama yang dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan akan munculnya tindakan kolektif dalam masyarakat tersebut.

6. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mendapat jawaban atas dua pertanyaan pokok:

- (1) Sejauh mana kondisi anomie, modal sosial dan deprevasi yang dialami masyarakat Aceh diteliti pada waktu dan faktor apa saja yang dipersepsikan oleh responden sebagai penyebabnya?
- (2) Bagaimana kondisi modal sosial kelompok masyarakat Aceh yang diteliti, serta apa saja kemungkinan implikasinya dalam rekonstruksi sosial yang akan dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan tentang anomie disusun dengan menggunakan instrumen survey anomie yang pernah dilakukan diberbagai negara, seperti Cina, Australia, Bulgaria, dan Afrika selatan, dengan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat Indonesia, khususnya di NAD. Indikator-indikator pengikut tingkat anomie yang digunakan antara lain:

- (1) Tingkat kehilangan kepercayaan pada masyarakat.
- (2) Tingkat kemerosotan ekonomi masyarakat yang tercermin dari penurunan penghasilan dan kehilangan pekerjaan.
- (3) Tingkat kohesi sosial dan penyempitan solidaritas ke dalam kelompok-kelompok primordial yang lebih terbatas.
- (4) Tingkat rasa tidak aman secara fisik, sosial maupun ekonomi, yang dapat mengarah pada perilaku yang berbeda dengan tuntutan moral yang dapat diterima masyarakat luas.
- (5) Tingkat apatisisme atau optimisme terhadap masa depan.

Pertanyaan-pertanyaan tentang modal sosial akan diukur melalui indikator-indikator seperti terlihat pada Bagan 2, yakni:

- (1) Persepsi responden tentang komunitasnya.
- (2) Jaringan hubungan (*network*) yang dimiliki, baik intra komunitas (*bonding*) maupun dengan orang di luar komunitas.
- (3) Persepsi tentang nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat.
- (4) Rasa aman karena adanya saling percaya antar sesama.
- (5) Tingkat resiprositas atau saling bantu dalam masyarakat

- (6) Keinginan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas (*civic engagement*)
- (7) Penghargaan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat ; dan
- (8) Rasa kebersamaan sebagai warganegara (*civility*)

Topik-topik pertanyaan seperti tercantum di atas merupakan pertanyaan mengenai persepsi yang diturunkan dari kerangka konseptual. Berbagai pertanyaan lain yang menyangkut mengenai deprivasi, perilaku kolektif, kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh pada waktu ini, dan tata pemerintahan (*governance*) sebagaimana dipersepsikan responden merupakan variabel yang juga digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi yang dialami masyarakat Aceh pada waktu penelitian dilakukan. Semua variabel yang dicantumkan dalam daftar pertanyaan digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberadaan konsep-konsep tersebut dalam kaitan dengan kemungkinan munculnya berbagai bentuk tindakan kolektif (*collective action*) dari kelompok masyarakat tertentu.

7. Metodologi

(1) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kelompok masyarakat yang diteliti digunakan metode kualitatif dan kuantitatif serta observasi langsung guna melihat kondisi kehidupan masyarakat bersangkutan. Data kualitatif dijarah melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, baik secara individual maupun melalui kelompok diskusi fokus (FGD). Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan survey kuetioner terhadap 300 orang responden untuk setiap lokasi, yang dibagi dalam lima atau enam komunitas okupsi, sesuai dengan keadaan yang ditemukan di lapangan nanti.

(2) Lokasi penelitian

Pengumpulan data dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan, Pada bab-bab berikut disampaikan laporan temuan penelitian dari lokasi penelitian.

BAB II

SISTEM PERINGATAN DINI SOSIAL DI KABUPATEN ACEH BESAR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

1. Pendahuluan

Penelitian sistem deteksi dini sosial (*Social Early Warning System*) di Nanggroe Aceh Darussalam, dilakukan di 7 Kabupaten/Kota yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi daerah penelitian ini. Seperti juga dilakukan pada seluruh daerah penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, dengan menggunakan kuesioner dan kedua, dengan metode diskusi kelompok terfokus yang lebih sering disebut sebagai *Focus Group Discussion* (FGD).

Di Kabupaten Aceh Besar, pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan di 6 (enam) Kecamatan dengan dibantu oleh 10 orang interviewer. Kecamatan-kecamatan lokasi pengumpulan data tersebut adalah Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Kota Jantho. Jumlah kuesioner yang berhasil terisi di 6 kecamatan tersebut adalah sebanyak 302. Responden yang diinterview terdiri dari pengungsi dan bukan pengungsi yang didatangi secara acak. Komposisi status responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Komposisi Status Responden Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Status Responden		Jumlah
		Pengungsi	Bukan Pengungsi	
1	Kota Jantho	3	47	50
2	Darul Imarah	48	2	50
3	Peukan Bada	13	37	50
4	Lhoknga	6	43	49
5	Darussalam	31	20	51
6	Baitussalam	49	3	52
Jumlah		150	152	302

Meskipun komposisi responden yang terdapat pada tabel 1 di atas tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai komposisi status penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut, tetapi sedikit banyak menginformasikan kepada kita bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Besar merupakan korban Tsunami yang sangat parah dan dapat dikatakan seluruhnya menjadi korban Tsunami, beberapa kecamatan lainnya hanya sebagian saja yang terkena Tsunami sedangkan sebagian tidak, tetapi ada pula kecamatan yang karena letaknya relatif jauh dari pantai dan merupakan dataran tinggi, tidak terkena bencana Tsunami. Walaupun bukan berarti di kecamatan yang tidak terkena Tsunami tidak terdapat korban Tsunami, karena kecamatan-kecamatan yang tidak terkena Tsunami biasanya menjadi tempat lokasi barak atau tenda pengungsi para korban Tsunami. Contoh misalnya Desa Jantho Baru Kecamatan Kota Jantho. Walaupun tidak terkena bencana Tsunami, tetapi di sana terdapat 3 (tiga) lokasi tenda pengungsi Tsunami yang dikelola oleh Care Foundation sebuah NGO yang berkantor pusat di Kanada dan Tzu Chi Foundation yang berkantor pusat di Taiwan.

Pengumpulan data dengan metode diskusi kelompok terfokus dilakukan sebanyak 6 kali di 5 Kecamatan. Peserta setiap diskusi adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang. Kecamatan-kecamatan yang dijadikan lokasi diskusi adalah:

Lhoknga	1 kali
Kota Jantho	2 kali
Darussalam	1 kali
Baitussalam	1 kali
Ingin Jaya	1 kali

Peserta setiap diskusi kelompok terfokus terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita. Seluruh pelaksanaan diskusi dilakukan di *Meunasah* (musholah) dengan mengambil waktu yang dianggap luang menurut masyarakat setempat yaitu setelah sholat Ashar atau setelah sholat Isya.

2. Kabupaten Aceh Besar Sebelum Tsunami

2.1. Wilayah

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 20 Kabupaten/Kota yang terdapat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten ini terdiri dari 22 Kecamatan, 68 mukim, 5 kelurahan, dan 595 desa.

Kabupaten Aceh Besar yang memiliki luas wilayah 2.974,12 km², terletak di selatan Banda Aceh pada koordinat 5,2–5,8 derajat lintang utara dan 95,0–95,8 derajat bujur timur. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh dan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebagian besar wilayah Aceh Besar berupa daratan.

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 22 Kecamatan, 68 mukim, 5 kelurahan dan 595 desa. Kecamatan-kecamatan di Aceh Besar sangat tersebar sehingga jarak antara kecamatan dengan pusat pemerintahan kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Kota Jantho merupakan yang terdekat karena merupakan ibukota kabupaten,

sedangkan kecamatan yang terjauh dari pusat pemerintahan kabupaten adalah kecamatan Lhoong.

Sampai pada tahun 2003, sebagian besar lahan di Kabupaten Aceh Besar (49,48%), ternyata masih berupa hutan. Di Aceh besar, terdapat kawasan lindung seluas 84.914 ha. Di dalamnya, termasuk seluas 70% berbentuk hutan lindung, dan cagar alam di Jantho seluas 16.640 ha. Penggunaan lahan lainnya, untuk industri seluas 0,03 %, pertambangan seluas 0,14%. Penggunaan lahan yang relatif cukup luas 48.164 ha adalah untuk kawasan budidaya yang terdiri dari perkampungan seluas 3.368 ha, perkebunan 11.949 ha, sawah 23.014 ha dan kebun campuran seluas 9.833. Secara lebih lengkap, komposisi penggunaan lahan di Aceh Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 : Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Besar

No	Penggunaan Lahan	Luas (%)
1	Perkampungan	1,25
2	Industri	0,03
3	Pertambangan	0,14
4	Persawahan	8,57
5	Pertanian Tanah Kering Semusim	0,19
6	Kebun	3,66
7	Perkebunan	4,45
8	Padang Rumput, Alang-alang, Semak	19,11
9	Hutan (Lebat, Belukar dan sejenisnya)	49,48
10	Perairan Darat (Kolam air tawar, tambak, penggarapan, waduk, danau dan rawa	0,38
11	Tanah Terbuka	12,36
12	Sungai/Jalan	0,38
	Jumlah	100,00

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, BPS Aceh Besar

Kawasan rawan erosi di Kabupaten Aceh Besar cukup luas persentasenya mencapai 35,62 % dari seluruh luasnya. Umumnya, jenis tanah disini terdiri dari Podzolid Merah Kuning, mencapai 31,55 %. Selebihnya berupa Litosal dan Latosol (15,90 %), Podzolid Coklat (13,85%) Renzina dan Litosal (13,25%), Alluvial (11,04%),

Hidromorf Kelabu (7,13%), Ragosol (4,89%) dan sisanya berupa Litosol dan Regosol (2,39%).

Berdasarkan kecamatan, luas wilayah terdistribusi secara sangat tidak merata. Ada kecamatan yang memiliki wilayah yang dapat dikatakan sangat luas, tetapi ada juga kecamatan yang memiliki wilayah relatif kecil dengan perbedaan yang cukup mencolok. Kecamatan Seulimeun merupakan kecamatan terluas (487,26 km²), sedangkan kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil hanya 9,06 Km². Secara lengkap, distribusi luas wilayah kecamatan-kecamatan di Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3 : Luas Daerah Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Lhoong	125,00
2	Lhoknga	98,95
3	Leupung	76,00
4	Indrapuri	298,75
5	Kuta Cot Glie	231,75
6	Seulimeun	487,26
7	Kota Jantho	274,04
8	Lembah Seulawah	307,85
9	Mesjid Raya	110,38
10	Darussalam	77,66
11	Baitussalam	36,52
12	Kuta Baro	92,42
13	Montasik	130,00
14	Ingin Jaya	99,68
15	Krueng Barona Jaya	9,06
16	Sukamakmur	98,51
17	Kuta Malaka	43,54
18	Simpang Tiga	54,95
19	Darul Imarah	32,95
20	Darul Kamal	16,20
21	Peukan Bada	31,90
22	Pulo Aceh	240,75
Keseluruhan Luas Kabupaten Aceh Besar		2.974,12

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, BPS Aceh Besar

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar sebanyak 30 orang wakil. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1999, urutan teratas adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki 12 orang wakil, kemudian Fraksi Partai Amanat Nasional yang memiliki 6 orang wakil, Fraksi Gabungan yang terdiri dari 3 orang wakil, Fraksi Aliansi Reformasi yang terdiri dari 3 orang wakil, Fraksi

Pembaharuan terdiri dari 3 orang wakil, dan Fraksi TNI/Polri yang terdiri dari 3 orang wakil; Berdasarkan pendidikan, komposisi anggota DPRD adalah, 16 orang berpendidikan Sarjana, 2 orang berpendidikan D1/D3, dan 12 orang berpendidikan SLTA.

Selama tahun 2003, tercatat 156 permasalahan di masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Masalah yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah pasar dan pembinaan pedagang ekonomi lemah sebanyak 38 kasus, disusul dengan masalah lingkungan hidup sebanyak 31 kasus. Masalah yang bersifat pendidikan sebanyak 26 kasus, dan masalah yang menyangkut audiensi dan penyampaian pendapat sebanyak 20 kasus.. Selama tahun 2003 itu juga DPRD telah mengeluarkan 11 Keputusan Dewan dan 1 Keputusan Pimpinan Dewan. Sedangkan keputusan yang berupa Peraturan Daerah tidak satupun keluar pada tahun 2003.

2.2. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar menurut hasil registrasi akhir tahun 2003, berjumlah 301.746 jiwa, dengan jumlah keluarga sebanyak 68.934 KK. Dari jumlah ini, penduduk laki-laki ada sebanyak 150.533 jiwa dan perempuan sebanyak 151.213. Artinya tingkat sex rasionya adalah sebesar 99,55. Persebaran penduduk di kecamatan-kecamatan relatif tidak merata. Rasio jumlah penduduk di kecamatan yang paling banyak dengan kecamatan yang penduduknya paling sedikit hampir mencapai 8 berbanding 1.

Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah dengan jumlah penduduk sebanyak 34.421 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kuta Malak dengan jumlah penduduk sebanyak 4.768 jiwa. Secara lebih lengkap, komposisi penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 : Penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lhoong	5.823	5.769	11.593
2	Lhoknga	8.333	8.223	16.556
3	Leupung	3.851	4.027	7.878
4	Indrapuri	8.249	8.408	16.657
5	Kuta Cot Glie	5.387	5.369	10.756
6	Seulimeun	9.203	9.741	18.944
7	Kota Jantho	3.046	2.689	5.735
8	Lembah Seulawah	3.717	3.468	7.185
9	Mesjid Raya	6.119	6.158	12.277
10	Darussalam	8.103	8.251	16.354
11	Baitussalam	9.183	8.994	18.177
12	Kuta Baro	9.982	10.125	20.107
13	Montasik	10.035	9.962	19.997
14	Ingin Jaya	10.790	10.676	21.466
15	Krueng Barona Jaya	5.415	4.922	10.337
16	Sukamakmur	5.748	6.389	12.137
17	Kuta Malaka	2.319	2.449	4.768
18	Simpang Tiga	2.445	2.564	5.009
19	Darul Imarah	16.805	17.616	34.421
20	Darul Kamal	2.984	2.949	5.933
21	Peukan Bada	9.975	9.483	19.458
22	Pulo Aceh	3.021	2.981	6.002
Jumlah		150.150	151.596	301.746

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, BPS Aceh Besar

Menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Aceh Besar paling banyak berada pada interval umur antara 15 sampai dengan 19 tahun dengan jumlah 37.555 jiwa , yang terdiri dari laki-laki 18.079 jiwa dan perempuan sebanyak 19.476 jiwa. Berada pada urutan kedua terbanyak berada adalah kelompok umur antara 10 sampai dengan 14

tahun dengan jumlah 36.994 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 18.531 jiwa dan perempuan sebanyak 18.463 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada usia di atas 75 tahun sebanyak 2.143 jiwa, terdiri dari 1.054 jiwa laki-laki dan 1.089 jiwa perempuan. Secara lengkap, gambaran penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut kelompok umur adalah seperti dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 : Penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	9.032	8.166	17.198
2	5-9	15.851	14.093	29.944
3	10-14	18.531	18.463	36.994
4	15-19	18.079	19.476	37.555
5	20-24	13.443	13.156	26.599
6	25-29	16.258	14.562	30.820
7	30-34	10.146	11.175	21.322
8	35-39	6.970	10.706	17.676
9	40-44	10.944	12.505	23.449
10	45-49	7.587	7.167	14.457
11	50-54	9.107	8.407	17.517
12	55-59	4.862	3.357	8.219
13	60-64	4.862	5.625	10.482
14	65-69	2.740	1.633	4.373
15	70-74	1.069	1.633	2.702
16	75 +	1.054	1.089	2.143
Jumlah		150.150	151.596	301.746

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, BPS Aceh Besar

2.3. Pendidikan

Aktivitas di bidang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar sebagian besar masih dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini nampak dari rekapitulasi jumlah sekolah, ruang

kelas, murid dan guru. Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan masih cukup terbatas. Bahkan pada tingkat pendidikan sekolah dasar, hanya ada 1 (satu) sekolah dasar swasta. Kondisi ini sangat kontras bila kita bandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah taman kanak-kanak, bahkan dapat dikatakan merupakan kebalikan dari kondisi pada pendidikan dasar. Jika pada sekolah dasar hanya terdapat 1 (satu) SD swasta, pada tingkat taman kanak-kanak ada 88 sekolah swasta. Sebaliknya di sekolah negeri, terdapat 200 SD dan hanya ada 1 sekolah Taman Kanak-kanak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5 : Jumlah Sekolah Negeri, Kelas, Murid dan Guru Di Kabupaten Aceh Besar, Keadaan Tahun 2003

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Kelas	Murid	Guru
1	TK	1	2	36	4
2	SD	200	1235	28.649	2.161
3	SLTP	44	432	10.222	1.202
4	SMU	21	234	7.599	749

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, BPS Aceh Besar

Tabel 6 : Jumlah Sekolah Swasta, Kelas, Murid dan Guru Di Kabupaten Aceh Besar, Keadaan Tahun 2003

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Kelas	Murid	Guru
1	TK	88	172	3311	449
2	SD	1	6	102	12
3	SLTP	5	30	512	89
4	SMU	5	29	658	105

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, BPS Aceh Besar

2.4. Kehidupan Agama

Islam adalah agama mayoritas penduduk di Aceh Besar, bahkan pada masa dahulu Islam menjadi agama resmi Kerajaan Aceh

Darussalam yang berpusat di wilayah Kabupaten Aceh Besar sekarang, yaitu tepatnya di Banda Aceh sebagai pusat dan ibukota kerajaan dimana terdapat pula Masjid Raya Baiturrahman. Setelah diadakan pemekaran wilayah ibukota Kabupaten Aceh Besar dipindahkan ke kota Jantho.

Sebagaimana masyarakat Aceh lainnya, penduduk Islam di Aceh Besar dikenal sebagai pemeluk Islam yang taat, merupakan kelompok Islam aliran Sunni yang bermazhab Syafi'i. Dalam rangka mengamalkan ajaran-ajaran Islam, khususnya untuk mendirikan shalat (sembahyang) serta beberapa jenis ibadah lainnya, di Aceh Besar terdapat 3 (tiga) jenis tempat peribadatan, yaitu mesjid, meunasah dan mushalah. Pada tahun 2003, di seluruh Aceh Besar terdapat 1.076 tempat peribadatan yang termasuk dalam ketiga kategori tersebut. Rinciannya menurut wilayah kecamatan yang ada sebagai berikut.

Tabel 7: Banyaknya Tempat Peribadatan Agama Islam dirinci Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Keadaan Tahun 2003

No	Kecamatan	Tempat Peribadatan			
		Mesjid	Meunasah	Mushalla	Jumlah
1	Lhoong	11	28	0	39
2	Lhoknga	5	25	11	42
3	Leupung	3	6	27	36
4	Indrapuri	12	52	23	87
5	Kuta Cot Glie	3	32	0	35
6	Seulimeun	8	47	56	111
7	Kota Jantho	4	13	7	24
8	Lembah Seulawah	6	12	0	18
9	Mesjid Raya	10	13	17	40
10	Darussalam	5	29	19	53
11	Baitussalam	5	13	0	18
12	Kuta Baro	7	54	25	86
13	Montasik	6	53	14	73
14	Ingin Jaya	10	55	17	82
15	Krueng Barona Jaya	3	12	0	15
16	Sukamakmur	5	35	27	67
17	Kuta Malaka	2	15	0	17
18	Simpang Tiga	4	18	0	22
19	Darul Imarah	13	32	31	76
20	Darul Kamal	3	14	0	17
21	Peukan Bada	8	26	14	48
22	Pulo Aceh	8	17	17	43
Jumlah		142	601	333	1.076

Sumber: Kandep Agama Kabupaten Aceh Besar

Indikasi tentang ketaatan dan kepatuhan masyarakat Aceh Besar terhadap ajaran Islam tidak hanya karena jumlah tempat peribadatan yang melebihi jumlah seribu buah, tetapi juga oleh

banyaknya sarana pendidikan agama Islam, khususnya Ponpes (Pondok Pesantren) di daerah tersebut. Pondok pesantren di Aceh Besar, seperti juga di daerah-daerah kabupaten di Aceh lainnya, disebut dengan istilah “*dayah*”. Dari dayah-dayah seperti inilah dilahirkan ulama-ulama brilyan, pemimpin dan pejuang Aceh, seperti Teungku Muhammad. Daud Beureueh yang merupakan pendiri dan pendidik di Dayah Jam’iat al Diniyah di Garot, Sigli, daerah Pidie. Sementara itu ulama terkenal dari Aceh Besar antara lain Tengku Abd al-Wahab Seulimum dan Tengku Hasballah Indrapuri.

Pada saat ini, dayah-dayah atau pondok pesantren (ponpes) di Aceh dapat dikelompokkan kedalam Ponpes Tradisional dan Ponpes Modern/Terpadu. Banyaknya ponpes di Aceh Besar pada tahun 2003 adalah sebagai berikut.

Tabel 8 : Banyaknya Pondok Pesantren Tradisional dan Modern/Terpadu Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2003

No	Kecamatan	Ponpes	
		Tradisional	Modern/Terpadu
1	Lhoong	7	0
2	Lhoknga	2	2
3	Leupung	2	0
4	Indrapuri	4	1
5	Kuta Cot Glie	6	0
6	Seulimeun	8	1
7	Kota Jantho	0	1
8	Lembah Seulawah	1	0
9	Mesjid Raya	2	1
10	Darussalam	4	1
11	Baitussalam	0	0
12	Kuta Baro	3	0
13	Montasik	5	1
14	Ingin Jaya	7	1
15	Krueng Barona Jaya	7	1
16	Sukamakmur	5	0
17	Kuta Malaka	2	1
18	Simpang Tiga	3	0
19	Darul Imarah	6	1
20	Darul Kamal	0	0
21	Peukan Bada	7	0
22	Pulo Aceh	4	0
Jumlah		85	12

Sumber: Kandep Agama Kabupaten Aceh Besar.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 22 kecamatan yang ada di Aceh Besar hanya dua kecamatan yang tidak memiliki pondok pesantren, yaitu Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Darul Kamal.

3. Pasca Bencana Alam Tsunami

Peristiwa bencana alam Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004, merupakan tragedi nasional yang sangat memilukan hati. Terjangan gelombang yang sedemikian dahsyat menyapu sampai jauh ke daratan, meluluh-lantakkan semua yang dilaluinya. Tidak terhitung kerugian yang ditimbulkan musibah tersebut. Korban jiwa tidak ternilai, demikian pula harta benda sangat sulit untuk dinilai secara tepat, dan berbagai kelembagaan sistem sosial budaya yang ada di sebagian besar tanah rencong telah dilahap dengan buas oleh arus yang sama sekali tidak memiliki perasaan itu. Kala itu, sejenak sistem pemerintahan terhenti dengan hancurnya sistem komunikasi dan jaringan sarana dan prasarana. Secara teritorial, sedikitnya telah menyebabkan 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar rusak berat. Bahkan di Kecamatan Peukan Bada, dapat dikatakan seluruh desa tersapu bencana Tsunami yang mengakibatkan tidak satupun kantor desa (gampong) dapat berfungsi. Di Kecamatan Lhoong, sebagian besar atau tepatnya 24 dari 26 kantor desa sama sekali tidak berfungsi dan di kecamatan Mesjid Raya, hanya 3 kantor desa, dari 13 kantor desa yang terdapat di sana yang masih bisa berfungsi. Ada pula kecamatan yang terkena rambahan Tsunami, tetapi tidak menyebabkan rusak parah. Sebaliknya, pada kecamatan-kecamatan yang berada di luar jangkauan Tsunami, seperti Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Indrapuri dan beberapa kecamatan lainnya, kantor-kantor desa masih tetap dapat berfungsi seperti biasanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar, kondisi kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kategori rusak berat akibat bencana alam Tsunami adalah sebagai berikut:

Tabel 9 : Kondisi Kerusakan Desa Akibat Bencana Tsunami

No	Kecamatan	Kondisi Kerusakan (Desa)		Jumlah (Desa)
		Total	Sebagian	
1	Lhoong	24	-	24
2	Leupung	6	-	6
3	Peukan Bada	26	-	26
4	Lhoknga	18	7	25
5	Pulo Aceh	17	-	17
6	Baitussalam	10	-	10
7	Mesjid Raya	10	-	10
	Jumlah	111	7	118

Sumber: Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Aceh Besar, keadaan 30 Agustus 2005.

Korban jiwa pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari drama Tsunami yang menjadi tragedi besar dan mengerikan bagi bangsa Indonesia ini. Dalam sejarah bencana alam di Indonesia, Tsunami melambung menjadi peringkat utama dalam memakan korban baik harta maupun jiwa dalam waktu yang sangat singkat. Di Kabupaten Aceh Besar, tidak kurang dari 33.000 orang meninggal akibat bencana Tsunami. Sementara itu, sampai dengan bulan April 2005, sebanyak 15.394 orang masih dinyatakan hilang. Belum lagi ratusan orang yang terluka. Secara lebih rinci, keadaan penduduk setelah peristiwa bencana Tsunami di Kabupaten Aceh besar dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 10 : Kondisi Penduduk Kabupaten Aceh Besar Setelah Peristiwa Tsunami

Kecamatan	Kondisi Penduduk				Jumlah
	Meninggal	Hilang	Luka	Selamat	
Kota Jantho	7	122	45	5.488	5.617
Seulimeum	65	165	-	18.837	19.067
Sukamakmur	41	74	14	12.674	12.789
Montasik	41	130	51	19.829	19.997
Kuta Baro	28	132	10	20.108	20.268
Darul Kamal	4	73	-	6.154	6.231
Simpang Tiga	33	-	4	4.958	4.995
Darul Imarah	205	173	-	31.289	31.667
Darussalam	44	148	68	17.510	17.770
Leupung	4.256	2.793	-	1.861	8.910
Krueng Barona Jaya	13	118	-	12.291	12.422
Ingin Jaya	5	124	-	14.884	15.013
Mesjid Raya	1.044	8	-	11.918	12.970
Kuta Cot Glie	24	58	-	10.158	10.240
Lembah Seulawah	87	19	-	7.978	8.084
Peukan Bada	4.785	7.917	354	11.140	23.842
Indrapuri	38	95	-	16.525	16.658
Lhoong	4.650	221	-	6.941	11.812
Lhoknga	7.592	163	-	11.932	19.687
Kuta Malaka	19	22	9	5.048	5.089
Pulo Aceh	874	868	-	4.705	6.447
Baitussalam	9.658	1.971	7	7.880	19.509
Jumlah	33.513	15.394	562	260.105	309.012

Sumber: Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Aceh Besar, keadaan 14 April 2005.

Selain puluhan ribu jumlah orang yang meninggal dan hilang, juga terdapat lebih dari seratus ribu jiwa penduduk Kabupaten Aceh Besar yang kehilangan tempat tinggal akibat tersapu bencana Tsunami. Menurut data yang berhasil dihimpun Biro Pusat Statistik

dalam Sensus pada tahun 2005, di Kabupaten Aceh Besar terdapat 35.942 orang dinyatakan kehilangan tempat tinggal, sebanyak 20.790 orang menyatakan tempat tinggalnya rusak (Hasil Sensus Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam 2005). Dalam kondisi demikian dan masih adanya rasa ngeri terhadap peristiwa bencana alam yang pernah muncul di depan mata kepala mereka sendiri, mereka mengungsi tempat-tempat hunian sementara berupa barak-barak dan tenda-tenda. Menurut salah seorang informan, jumlah penghuni barak atau tenda pengungsi sering berubah, kadang bertambah karena ada penghuni yang baru datang dari pengungsian di tempat lain, tetapi kadang juga berkurang karena pindah mengungsi ke tempat pengungsian lainnya. Baru ketika ada pernyataan bahwa korban bencana yang akan mendapat prioritas perumahan tahap pertama adalah para pengungsi yang bertempat tinggal di tenda-tenda, para pengungsi lebih setia tinggal di tenda dengan harapan bisa mendapatkan bantuan perumahan terlebih dulu. Belakangan ini, dengan mulai adanya rumah-rumah bantuan yang sudah selesai di bangun, memang terlihat adanya penurunan jumlah pengungsi di tenda-tenda, karena beberapa sudah mulai menempati rumah bantuan.. Keadaan pada bulan September 2005, jumlah pengungsi yang berada di Kabupaten Aceh besar sebanyak 104.411 jiwa yang tersebar di 22 kecamatan di lingkungan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Secara lebih rinci, distribusi lokasi pengungsi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 11: Distribusi Lokasi dan Jumlah Pengungsi Korban Bencana Tsunami

No	Kecamatan	Jumlah Lokasi	Jumlah Pengungsi
1	Kota Jantho	11	5.232
2	Seulimeum	48	3.943
3	Sukamakmur	36	4.330
4	Montasik	46	6.384
5	Kuta Baro	58	7.866
6	Darul Kamal	14	1.189
7	Simpang Tiga	20	1.059
8	Darul Imarah	39	19.440
9	Darussalam	31	7.460
10	Leupung	3	200
11	Barona Jaya	12	3.778
12	Ingin Jaya	59	9.377
13	Mesjid Raya	10	10.156
14	Kuta Cot Glie	28	809
15	Lembah Seulawah	14	2.209
16	Peukan Bada	6	2.765
17	Indrapuri	36	3.798
18	Lhoong	8	4.189
19	Lhoknga	8	7.915
20	Kuta Malaka	1	1.347
21	Pulo Aceh	3	580
22	Baitussalam	4	370
Jumlah		495	104.411

Sumber: Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Aceh Besar, keadaan 09 September 2005.

Berbagai bantuan dalam upaya merehabilitasi kehidupan masyarakat Aceh Besar yang terkena bencana Tsunami juga berjalan, terdapat banyak organisasi non pemerintah dari tingkat nasional dan internasional mengulurkan tangan berusaha meringankan penderitaan masyarakat Aceh. Sektor-sektor yang mendapat perhatian utama dalam rangka rehabilitasi itu antara lain adalah pembangunan dan rehabilitasi perumahan, pembangunan sarana pendidikan dan

pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu ada juga upaya untuk mengembalikan kelancaran mata pencaharian masyarakat, agar mereka mampu menjalani kehidupan secara normal seperti sebelum terjadinya peristiwa Tsunami. Salah satu kelompok masyarakat yang banyak memperoleh perhatian dan bantuan adalah masyarakat nelayan.

Di bidang pembangunan perumahan, Data kebutuhan perumahan bagi anggota masyarakat yang terkena bencana Tsunami adalah 14.446 unit yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Dari jumlah tersebut, sampai pada tanggal 1 Desember 2005, sudah berhasil direalisasi sebanyak 7.278 unit yang dibangun oleh berbagai NGO baik dalam maupun luar negeri. Secara lebih lengkap, kebutuhan dan realisasi pembangunan perumahan bantuan untuk masyarakat Aceh Besar yang terkena Tsunami dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12 : Kebutuhan dan Realisasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Tsunami

No	Kecamatan	Kebutuhan Perumahan		
		Rencana	Realisasi	Sisa
1	Baitussalam	4495	631	3864
2	Mesjid Raya	2098	1052	1046
3	Darussalam	158	124	34
4	KR Barona Jaya	12	-	12
5	Peukan Bada	3237	2270	967
6	Lhoknga	2461	1295	1166
7	Lhoong	1906	1906	-
Jumlah		14.447	7278	7169

Sumber: Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Aceh Besar, keadaan 1 Desember 2005

Berdasarkan data pada tabel di atas, nampak distribusi pembangunan rumah yang tidak konsisten antara suatu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Sepintas nampak tidak adanya argumentasi yang jelas tentang percepatan pembangunan bantuan

perumahan per kecamatan. Di Kecamatan Lhoong, misalnya, kebutuhan perumahan sebanyak 1906 unit, telah terealisasi seluruhnya, tetapi misalnya di Kecamatan Kr Barona Jaya yang hanya membutuhkan 12 rumah, sama sekali belum ada realisasinya. Begitu juga dengan kecamatan Darussalam yang hanya membutuhkan 158 rumah, belum seluruhnya terealisasi. Bantuan yang masih paling banyak membutuhkan realisasi pembangunan rumah adalah Baitussalam yang diikuti dengan kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Mesjid Raya.

Fenomena di atas sepintas akan mendatangkan praduga adanya KKN di kalangan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan perumahan. Namun jika ditelaah lebih jauh, ternyata bantuan perumahan tersebut dilakukan oleh para NGO. Terdapat puluhan NGO dalam dan luar negeri yang berkiprah dalam mewujudkan bantuan perumahan kepada masyarakat. Perbedaan NGO yang melakukan pembangunan perumahan bantuan berarti pula adanya perbedaan sistem bantuan, disain rumah dan sistem distribusi. Hal ini membawa konsekuensi pada waktu yang diperlukan untuk persiapan dan seleksi masyarakat korban bencana yang berhak memperoleh bantuan rumah dan siapa yang berhak terlebih dulu memperoleh rumah bantuan. Data nama-nama NGO yang melaksanakan bantuan pembangunan perumahan yang terdapat di Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Aceh Besar antara lain adalah:

- (1) KFW (GTZ)
- (2) KFW (GTZ) FUI Sulawesi
- (3) KFW (GTZ) Islamic Relief, Word Vision
- (4) PMI Canada Bahtera Oxfam
- (5) IOM
- (6) Sos Desa Taruna (Kadin)
- (7) Samaritan's Purse, KFW (GTZ)
- (8) Mercy Relief
- (9) PMI Canada
- (10) Kreasi

- (11) Norlink
- (12) Serasih
- (13) Plan
- (14) PMI
- (15) Aceh Rerief
- (16) Nurani Dunia
- (17) GTZ German
- (18) Soroptimis
- (19) Salam Aceh
- (20) CARDI IRD
- (21) REI
- (22) PUP2KP
- (23) Mercy Corp
- (24) CRS
- (25) Uplink
- (26) Al Imdaad
- (27) Peduli Bangsa
- (28) Mercy Malaysia
- (29) BRR
- (30) THW
- (31) Muslim AID
- (32) UN Habitat
- (33) Mamamia
- (34) Obor Berkat
- (35) Gen Asist
- (36) Jenggala
- (37) CHF
- (38) Lafarge, Atlas Habitat For Humanity dan Dompert Dhuafa
- (39) Oxfam
- (40) Care International
- (41) Mercy USA
- (42) Turki Bulan Sabit Merah

Sementara itu di bidang kesehatan juga dilakukan pembangunan dalam rangka merehabilitasi dan merekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan tersebut meliputi antara lain:

- Pembangunan 6 (enam) Puskesmas yang tersebar di 6 (enam) kecamatan,

- pembangunan sebanyak 16 (enam belas) unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang letaknya tersebar di 8 (delapan) kecamatan,
- Rehabilitasi 6 (enam) unit Puskesmas pembantu yang tersebar di 4 (empat) kecamatan,
- Pembangunan 4 (empat) unit Pondok Bersalin Desa di Kecamatan Mesjid Raya
- Pembangunan Pos Kesehatan Satelit 12 (dua belas) unit yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan
- Pembangunan Poned yang tersebar di 6 (enam) kecamatan, masing-masing dilengkapi dengan equipment sesuai standar, mobiler dan 1 (satu) unit *ambulance*
- Pengadaan ambulance untuk Puskesmas-puskesmas di kecamatan Ingin Jaya, Seulimeum dan Sukamakmur
- Pembangunan rumah paramedis, sebanyak 3 (tiga) unit di Kecamatan Ingin Jaya dan 4 (empat) unit di kecamatan Seulimeum
- Pengadaan alat-alat medis untuk Puskesmas di kecamatan Sukamakmur dan Darul Kamal

Pembangunan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Besar juga melibatkan bantuan kerjasama dengan para NGO dalam dan luar negeri. NGO dalam negeri yang terlibat adalah PMI Aceh Besar, sedangkan NGO asing yang terlibat dalam merehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Aceh Besar antara lain adalah:

- Medecins du Monde (MDM) French
- Italian Cooperation
- Merlin
- Islamic Relief
- World Vision
- Project Cencern Indonesia
- Mercy Malaysia
- International Organisation for Migration (IOM)

- Care International
- Unicef
- UNFPA

Di bidang pendidikan, Tsunami juga mengakibatkan banyak kehancuran sarana dan prasarana pendidikan berupa sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan. Termasuk juga salah satu kantor cabang dinas pendidikan ikut hancur termakan Tsunami. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, terdapat 24 (dua puluh empat) unit sekolah TK hancur total, 49 (empat puluh sembilan) unit sekolah dasar hancur total ditambah dengan 61 (enam puluh satu unit) rusak, sebanyak 11 (sebelas) unit sekolah menengah pertama hancur total ditambah dengan 31 (tiga puluh satu) unit rusak, sebanyak 6 (enam) unit sekolah menengah atas dan kejuruan hancur ditambah dengan 7 (tujuh) unit rusak. Dengan demikian maka di Kabupaten Aceh Besar terdapat 90 (sembilan puluh) unit sekolah yang hancur akibat Tsunami. Ditambah dengan sekolah yang mengalami kerusakan berat, maka jumlah sekolah yang tidak dapat berfungsi menjadi sebanyak 113 unit. Secara lebih rinci, data sekolah korban Tsunami dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 : Kondisi Kerusakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Akibat Terjadinya Bencana Alam Tsunami

Jenis Sarana	Status			Jumlah
	Hancur	Rusak Berat	Rusak	
Kantor Cabang Dinas	1	-	-	1
Sekolah TK	24	-	-	24
Sekolah Dasar	49	21	40	110
SMP	11	1	30	42
SMA/K	6	1	6	13
Jumlah	91	23	76	190

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, Keadaan 17 November 2005

Seperti juga yang terjadi pada sektor-sektor lainnya, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan juga

melibatkan banyak pihak. Namun berbeda dengan yang terlihat pada sektor pembangunan perumahan dan sarana kesehatan, keterlibatan pembangunan di bidang pendidikan ternyata lebih beragam, tidak hanya mendapat perhatian kalangan NGO saja. Keragaman pihak yang terlibat dalam merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat pada daftar berikut ini:

- Plan International (NGO) membangun 5 unit sekolah dasar yaitu SD Lamnga, SD Lambari Nijid, SD Lamgeueu, SD Pulot Leupung dan SD Saney Lhoong.
- Satuan Tugas Sulawesi Selatan (NGO) membangun SD Ladong
- Palang Merah Indonesia (NGO) membangun 4 (empat) unit sekolah dasar yaitu SD Umong Seuribee, SD Kulu, SD Genteut, dan SD Glee Bruek 2
- Pemda Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pontianak Post (Pemda dan pengusaha) membangun 2 (dua) buah SD yaitu SD Trans Jantho dan SD Kajhu.
- SCTV (PT) membangun 2 (dua) unit SD yaitu SD Krueng Raya dan SD Ruyung dan 1 (satu) unit SMP yaitu SMP 1 Lhoong
- Turki TRCS (NGO) membangun 1 (satu) unit SD di Tanjung, 2 (dua) unit SMP yaitu SMP 3 Lhoknga dan SMP 1 Peukan Bada, serta 1 (satu) unit SMA yaitu SMA 1 Peukan Bada.
- Islamic Relief (NGO) membangun 3 (tiga) unit SD yaitu SD 1 Lhoknga, SD Lampeunerut dan SD Labuy.
- THW German (NGO) membangun SMA 1 Leupung
- AMURT (NGO) membangun 3 (tiga) unit TK di Raider, Bada dan Perumnas Neuhen dan 1 (satu) unit SD di Seureumo
- World Vision (NGO) membangun TK Al Munawarah, SD Glee Bruek dan SD, SMP dan SMA di Leupung
- Makro Departemen Store (PT) membangun 3 (tiga) unit SD yaitu SD 2 Peukan Bada, SD 1 Seumet dan SD Cot Meuraja.
- Mercy Malaysia (NGO) membangun SMA 1 Lhoknga
- Pirelli Italia (PT) membangun SMA 1 Darussalam
- JICA/JICS membangun 6 (enam) unit SMP yaitu SMP 3 Ingin Jaya, SMP 1 Darul Imarah, SMP 1 Kota Jantho, SMP 1

Kutamakmur, SMP 2 Darul Imarah, SMP 1 Darussalam, ditambah dengan 2 unit SMA yaitu SMA 1 Baitussalam dan SMA 1 Ingin Jaya, juga 2 unit PKBM yaitu PKBM Baidatul Tuntas dan PKBM Al Munawarah.

- Dompot Dhuafa (NGO) membangun SMA 1 Lhoong
- Education International (NGO) membangun 8 (delapan) unit SD, 1 (satu) unit MIN dan 3 (tiga) unit SMP.
- UNICEF (NGO) membangun 36 (tiga puluh enam) unit SD, 4 (empat) unit MIN, dan merehabilitas 18 (delapan belas) unit SD.
- Pemda Lampung (Pemda) membangun SDN Kuta Pasie di kecamatan Baitussalam
- Nurani Dunia (NGO) membangun 2 (dua) Unit SD di Beureunut dan Lampanah Seulimeum
- German (neg) membangun 1 (satu) unit SD di Lhoknga
- Italian Cooperation (NGO) SMK 1 Mesjid Raya
- GVC Italia (PT) menyediakan peralatan belajar bagi SMK 1 Mesjid Raya
- Yayasan Sampoerna mendirikan SMP 2 Mesjid Raya dan SMA 1 Krueng Barona Jaya.
- Femina Group (PT) membangun SD Sri Musim
- PMI German membangun TK Gugop, SD Gugop dan SMP 2 Pulo Aceh
- Canada (IACO) bekerjasama dengan Bersama Membangun Aceh (NGO) membangun TK Satu Atap dan 2 (dua) unit Sd di Seulamat dan Lampeudaya.
- PT Badak NGL (PT) membangun SMP 2 Lampuuk Lhoknga
- Coca Cola (PT) membangun 2 (dua) unit SMP di Peukan Bada dan Baitussalam, juga 2 (dua) unit SMA di Peukan Bada dan Baitussalam
- Dep. Kimpraswil (Pem) membangun SMP 3 Ingin Jaya
- Depdiknas (Pem) membangun 14 SMP yang tersebar di 12 Kecamatan

Salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Besar adalah nelayan. Sesuai dengan lokasi tempat tinggal dan jenis usahanya, kelompok ini merupakan kelompok yang berhadapan paling depan dengan peristiwa Tsunami. Tidak heran jika kelompok ini pula yang mengalami kerusakan paling berat baik secara fisik maupun non fisik. Oleh karena itu tidak heran pula jika banyak pihak, terutama NGO asing, dalam melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh memberi cukup perhatian terhadap masyarakat nelayan.

Kelompok nelayan yang rata-rata kehilangan alat penangkapan ikan, untuk kembali mampu melaksanakan usahanya, memperoleh bantuan sarana dan prasarana kenelayanan seperti Boat, Mesin Boat, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pabrik es, Gudang pendingin, Genset, Gillnet, Purse Seine dan bengkel. Tidak kurang dari 29 lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah telah mengulurkan tangan memberikan bantuan bagi kelompok nelayan untuk menormalisasi mata pencahariannya. Beberapa di antaranya yang memberikan bantuan cukup besar adalah:

- (1) Triangle Perancis yang menyumbangkan bantuan 120 unit Boat Thep-thep yang tersebar di Lhoknga (50), Lampuuk (30) dan Lhoong (40), dan membangun 3 (tiga) unit tempat pelelangan ikan yang berlokasi di Lhoknga, Saney dan Lampuuk.
- (2) Pemerintah Kuwait menyumbangkan 25 (dua puluh lima) unit Boat untuk Aceh Besar
- (3) JRS memberikan bantuan untuk kecamatan Krueng Raya sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit Boat Tempel dan 58 (lima puluh delapan) unit pondok olahan.
- (4) JSK dan Austin Amerika masing-masing memberikan bantuan 15 (lima belas) unit Mesin Boat kepada nelayan di Krueng Raya.
- (5) USAID memberikan bantuan 10 (sepuluh) unit mesin Boat 40 kepada nelayan Krueng Raya.
- (6) Aceh Relief menyumbangkan 30 (tiga puluh) unit Boat kepada nelayan Pulo Aceh.

- (7) Departemen Sosial RI, memberikan 100 (seratus) unit Boat untuk nelayan di 10 kecamatan di Aceh Besar.
- (8) Al Imdad Afrika Selatan menyumbangkan 132 (seratur tiga puluh dua) unit pembuatan Boat untuk nelayan di kecamatan Peukan Bada.
- (9) JICS Japan menyumbangkan 11 (sebelas) unit Mesin Boat 120 HP, 8 (delapan) unit Mesin Boat 24 HP, 11 (sebelas) unit Mesin Boat 16 HP, 23 (dua puluh tiga) unit Boat Tempel, 8 (delapan) unit Purse Seine, 28 (dua puluh delapan) unit Gillnet, masing-masing 8 (delapan) unit Boat Fiberglass 5 GT dan 3 GT, masing-masing 4 (empat) unit bengkel, alat pembuat es, gudang pendingin dan genset. Bantuan ini tersebar di kecamatan-kecamatan Baitussalam, Lambada Lhok, Lhoknga, Mon Ikeun, Mesjid Raya, Krueng Raya, Peukan Bada dan Lamteungoh.

4. SEWS (*Social Early Warning System*)

4.1. Topik-topik SEWS

Disamping empat topik masalah SEWS (*Social Early Warning System*), yaitu “anomie”, modal sosial, “deprivasi sosial” dan “collective behaviour” yang dipersiapkan dan kemudian dikedepankan dalam acara FGD (*Focus Group Discussion*), ternyata banyak pula topik masalah yang dimunculkan oleh para peserta. Topik-topik masalah yang dikemukakan peserta sebagai bagian dari SEWS dan dikemukakan dalam FGD, juga muncul dalam wawancara mendalam dengan beberapa informan antara lain masalah-masalah penanganan pengungsi gempa dan tsunami, penanganan pengungsi konflik dan juga para mantan GAM, perhatian terhadap masyarakat yang tidak terkena tsunami tetapi sejak dulu sampai saat ini hidup miskin, kehidupan sosial ekonomi berbasis potensi lokal, pemulihan kondisi pasca tsunami, berbagai aspek pembangunan, dan lain sebagainya. Untuk kepentingan dan kemudahan pembahasan, secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

4.2. Anomie

4.2.1. Ketidakpuasan

Ketidakpuasan nampak pada masyarakat Aceh Besar dari berbagai strata sosial, walaupun penyebab ketidakpuasan tersebut berbeda-beda. Antara lain adalah terjadinya konflik berkepanjangan antara GAM dengan Pemerintah RI yang menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan pula bagi masyarakat Aceh Besar, kemudian klimaks dari penderitaan masyarakat Aceh itu, adalah terjadinya bencana alam Tsunami yang banyak menelan korban, harta dan jiwa masyarakat Aceh Besar.

Di kalangan warga masyarakat secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Masyarakat yang secara langsung terkena bencana alam Tsunami dan masyarakat yang tidak secara langsung terkena bencana alam Tsunami. Di kalangan masyarakat yang secara langsung terkena bencana alam Tsunami, terdapat beberapa ketidakpuasan terhadap pemerintah, antara lain penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Besar dianggap berjalan sangat lambat, banyak dirasakan ketidakadilan bantuan terhadap sesama korban bencana alam yang berkaitan dengan kedekatan korban dengan para pejabat yang mempunyai kewenangan mendistribusikan bantuan, mereka menyebut sebagai adanya kolusi dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Terlambatnya atau terhentinya bantuan yang disebut sebagai jatah hidup (jadup) yang sudah sejak bulan Agustus 2005 terhenti. Padahal janji yang diberikan pemerintah, jatah hidup tersebut akan disuplai terus dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun. Ketidakpuasan terhadap pemerintah itu juga muncul ketika mereka membandingkan antara langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yang dinilai lamban dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *Non Government Organisation* (NGO) asing yang dianggap bekerja dengan cepat, sistematis dan efektif.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh yang dianggap sebagai personifikasi dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu isu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Informasi yang mereka peroleh dari media massa tentang besarnya dana yang dikelola oleh BRR dan besarnya gaji dan melimpahnya fasilitas yang diperoleh aparat BRR dalam menangani masalah pasca Tsunami, dianggap tidak seimbang dengan kinerja yang telah mereka tunjukkan selama setahun ini dan dianggap belum menghasilkan apa-apa. Dengan adanya berbagai anggapan yang muncul dari realitas tersebut, tidak heran jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangatlah kurang.

Di kalangan masyarakat Aceh yang tidak secara langsung terkena bencana Tsunami, ketidakpuasan muncul dari adanya perbedaan perhatian pemerintah terhadap mereka dibanding dengan perhatian yang diberikan terhadap masyarakat yang secara langsung terkena bencana alam. Padahal menurut kelompok masyarakat yang tidak secara langsung terkena bencana alam, mereka juga turut kehilangan banyak hal dengan adanya bencana alam tersebut, terutama kehilangan sanak famili dan atau orang tua yang terkena bencana secara langsung dan kehilangan akses terhadap mata pencaharian yang sangat vital bagi kelangsungan kehidupan mereka. Sebelum tsunami, sebagian dari mereka sudah tergolong penduduk miskin dan ada banyak yang lebih miskin dari mereka yang terkena tsunami secara langsung. Tindakan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi dinilai sangat minim dan tidak adil.

Di kalangan pemerintah daerah juga terbetik ketidakpuasan terhadap kondisi sosial di Aceh Besar yang disebabkan oleh belum berubahnya sikap oknum aparat keamanan, meskipun sementara ini periode konflik dianggap sudah berakhir. Sikap “menjajakan” keamanan oleh oknum aparat yang “harus dibeli” oleh aparat pemerintah daerah. Ironisnya, jual-beli keamanan itu terjadi di bawah tanah, sehingga seringkali menyebabkan banyak dana yang harus dipertanggungjawabkan secara fiktif oleh aparat pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerahlah yang harus mempertanggungjawabkannya jika tertangkap adanya penyelewengan penggunaan dana tersebut.

Beberapa tokoh masyarakat mengkritisi maraknya pembangunan perumahan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik di Aceh Besar. Besarnya kebutuhan terhadap bahan-bahan bangunan seperti pasir dan batu bata, membawa implikasi terhadap maraknya eksploitasi bahan galian C. Pengerjaan eksploitasi ini nampaknya tidak disertai dengan perencanaan pemeliharaan kelestarian lingkungan dan mata pencaharian penduduk dalam jangka panjang. Penggalian pasir yang cenderung korang kontrol, mulai menyebabkan banyak kerusakan lingkungan. Demikian pula dengan pembuatan batu bata yang saat ini sedang marak dilakukan di Kabupaten Aceh Besar. Karena tanah liat sebagai bahan pembuatan batu bata tersebut pada umumnya terdapat di persawahan, maka tidak sedikit sawah-sawah yang rusak akibat tanahnya digali untuk menjadi bahan pembuat batu bata. Ekseks lain dari maraknya pembangunan perumahan yang tengah dilakukan dalam rangka menanggulangi korban bencana Tsunami, adalah banyaknya kerusakan jalan akibat dilintasi kendaraan dengan muatan berat.

Faktor anomie yang secara umum dirasakan oleh warga masyarakat Aceh Besar, juga sebenarnya dialami masyarakat Aceh secara keseluruhan, ialah kondisi kehidupan yang tidak menentu selama bertahun-tahun di Aceh. Keadaan ini tidak hanya berarti dalam kaitannya dengan dampak gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, tetapi juga serangkaian peristiwa sebelumnya terutama yang bertalian dengan konflik di Aceh dan cara-cara penanganannya. Dari sejumlah masalah warisan pada masa konflik yang masih menggantung, tidak jelas penanganannya apalagi penyelesaiannya, beberapa diantaranya yang menjadi harapan masyarakat umum Aceh untuk diselesaikan secara tuntas adalah antara lain pengadilan terhadap para pelanggar HAM termasuk aktor intelektualnya, penghilangan secara paksa yang tidak jelas alasannya, penanganan pengungsi konflik, pengusiran para transmigran dari Aceh serta kerugian-kerugian yang dialami oleh warga penduduk akibat konflik.

4.2.2. Masa Depan dan Peran Pemerintah

Kondisi kehidupan yang tidak pasti, bagi pada umumnya peserta FGD di Aceh Besar, tidak hanya menyangkut masalah ketidakpuasan sebagai sesuatu yang sangat memperingatkan, tetapi juga menjadi pijakan prediksi betapa masih jauhnya kehidupan yang sejahtera bagi warga Aceh di masa depan. Dengan kata lain persoalan kehidupan masa depan tidak terlepas dari apa yang terjadi dan dihadapi masyarakat pada saat ini, bahkan juga masih berhubungan dengan hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Seorang peserta FGD menyatakan:

“.... tsunami sesungguhnya hanyalah peringatan yang kesekian kalinya dari Allah betapa Aceh ini salah urus sejak dulu sampai saat ini....”.

Oleh karena itu masalah ketidakpuasan terhadap kehidupan dalam bermacam aspek – ekonomi, hukum, keadilan, sosial budaya, dan lain-lain – terkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pemegang “otoritas” untuk pengembangannya serta mengatasi kendala-kendala yang mengganjal dalam penanganannya. Menyangkut peranan pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah (Pemda) Aceh, suara-suara dari FGD secara umum masih menyatakan ketidakpuasannya. Masalah ketidakpuasan terhadap peranan pemerintah dilihat menurut beberapa cara pandang berdasarkan pengalaman dan penilaian.

Pertama, kinerja pemerintah – dianggap belum maksimal dalam pengertian selama ini pemerintah lalai dalam menegakkan fungsi utamanya sebagai pengurus dan pelindung masyarakat yang bertanggung jawab. Kelalaian itu muncul dari sikap pemerintah sendiri, seperti Pemda Aceh, termasuk para legislatornya, yang tidak bisa menjaga diri dari penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). “Jika mereka terlibat masalah [korupsi, pen.] terus bagaimana bisa dipercaya sebagai pengurus dan pelindung rakyat”, demikian seorang peserta FGD.

Kedua, pembangunan wilayah – selama konflik Aceh dan khususnya dalam 5 (lima) tahun terakhir di Aceh sangat memprihatinkan, tidak ada kemajuan, bahkan ada kesan lebih lamban daripada sebelumnya. Salah satu masalahnya ialah tidak sinkronnya Undang Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah Pusat dengan kondisi di daerah . Sebagai contoh, pelabuhan bebas Sabang yang telah dibuka kembali sejak tahun 2001(?), sampai saat ini belum beroperasi secara maksimal karena terbentur oleh belum adanya Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) atas Undang Undang tentang pelabuhan bebas itu.

Ketiga, orientasi pembangunan Pemda – tidak fokus kepada pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Juga, orientasinya tidak dapat menjangkau kebutuhan rakyat kecil yang jumlahnya besar. Pembangunan Pemda lebih banyak berupa proyek-proyek mercusuar, seperti pembangunan jalan lintas dari Barat ke Timur LADIA GALASKA (Lautan Hindia, Gayo Alas dan Selat Malaka) yang menghubungkan kota Meulaboh (Aceh Barat) – kota Takengon (Aceh Tengah) – kota Blangkejeren (Gayo Lues) – kota Peureulak (Aceh Timur); pembangunan Taman dan Pusat Kebudayaan Aceh Sultanah Syafiatuddin di Banda Aceh yang diperuntukkan sebagai hiburan bagi rakyat dalam kenestapaan menghadapi konflik pada waktu lalu. Namun bagi rakyat miskin, semua itu adalah simbol ketidakpekaan pemerintah Aceh terhadap nasib warga masyarakatnya. Dan banyak lagi proyek-proyek mercusuar yang dikerjakan Pemda dengan biaya yang sangat maksimal tetapi dampaknya yang dirasakan masyarakat sangat minimal.

Seperti sudah disinggung di atas, bagi umumnya peserta FGD di Aceh Besar persoalan untuk kehidupan masa depan adalah sebuah ketidakpastian, karena belum adanya suatu gambaran yang cukup jelas yang bisa memberikan pertanda yang positif dan menggembirakan, misalnya bagi kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dan sejahtera. Hal-hal yang lebih jelas justeru sebaliknya, yakni tanda-tanda akan kehidupan masa depan yang suram, kehidupan yang

kurang kondusif dengan keadaan masyarakat yang baru saja mulai lepas dari penderitaan akibat konflik dan tsunami. Beberapa indikasi yang berhubungan dengan suramnya kehidupan sosial ekonomi Aceh masa depan, direfleksikan oleh beberapa persoalan.

Pertama, masalah industri besar. Dalam beberapa tahun terakhir pengoperasian beberapa perusahaan industri besar di Aceh berhenti atau dihentikan. Pabrik semen Andalas di Lokhnga, Aceh Besar berhenti beroperasi karena terkena tsunami. Demikian pula, PT KKA (Kertas Kraft Aceh), PT Pupuk ASEAN, PT PIM (Pupuk Iskandar Muda) ketiganya di Aceh Utara menghentikan kegiatannya karena tidak lancarnya pasokan gas sebagai salah satu bahan baku utamanya. Keadaan ini sangat kontras dengan potensi Aceh yang berlimpah ruah dengan SDA (Sumber Daya Alam), dimana pada tahun 2002, ekspor produksi gas (LNG) saja mencapai 7.786.556.049 kg dengan nilai US \$ 1.487.299.749.

Kedua, masalah kemiskinan di Aceh pada beberapa tahun terakhir meningkat. Penduduk miskin di Aceh menunjukkan jumlah 1.409.828 orang atau 33,84% dari penduduk berjumlah 4.166.040 jiwa. Selain persoalan kemiskinan yang beberapa tahun terakhir selalu di atas angka satu juta, sesungguhnya terdapat pula masalah-masalah kesehatan, pendidikan, pengungsi baik pengungsi konflik maupun pengungsi korban gempa/tsunami, pengangguran, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi di Aceh. Angka-angka tingkat kemiskinan di Aceh dalam beberapa tahun relatif tidak berkurang, malah sebaliknya cenderung meningkat. Jumlah penduduk miskin di Aceh periode 1996-2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 : Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Periode 1996 – 2003

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1	1996	3.934.000	425.600
2	1997	4.004.600	-
3	1998	4.074.900	1.350.000
4	1999	4.144.500	886.800
5	2000	4.073.000	1.101.400
6	2001	4.114.000	1.223.700
7	2002	4.166.040	1.409.000
8	2003	4.200.000	1.680.000

Sumber: *Aceh Dalam Angka, 1996–2003. Penduduk Miskin Propinsi Daerah Istimewa Aceh 2001.*

Pada tahun 2001, dari sebanyak kurang lebih 1.830.000 orang angkatan kerja di Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat sekitar 124.000 orang penduduk penganggur terbuka yakni mereka yang mencari pekerjaan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,93 persen. Menurut BPS, pengangguran terbuka adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk golongan angkatan kerja dan seminggu yang lalu sedang mencari pekerjaan. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka berarti persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dibagi dengan angkatan kerja. Pada tahun 2003 pengangguran terbuka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mencapai jumlah lebih dari 450.000 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 10,7 persen. Dari dua tahun yang dikemukakan terlihat adanya perkembangan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka. Gambaran mengenai tingkat kemiskinan dan pengangguran tersebut memberikan indikasi betapa adanya kesenjangan antara kedudukan Aceh sebagai daerah penghasil SDA (Sumber Daya Alam) yang besar dengan tingkat kesejahteraan penduduknya.

Ketiga, masalah korupsi. Di Aceh, sejak masa reformasi, persoalan ini sudah mulai tercium oleh aparat penegak hukum dan

sangat menonjol ketika masa Gubernur Abdullah Puteh yang melibatkan terutama para pelaksana pemerintahan (pihak eksekutif), termasuk dirinya, dan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pihak legislatif). Penanganan masalah korupsi di Aceh sampai saat ini masih berlanjut, selain di Banda Aceh juga sudah sampai ke wilayah kabupaten/kota dan menyangkut beberapa pejabat di pemerintahan tingkat kabupaten/kota, sebagai contoh antara lain kasus di Langsa dan Aceh Singkil. Maraknya korupsi di Aceh yang melibatkan para pejabat eksekutif dan legislatif menimbulkan image terjadinya apa yang disebut sebagai “korupsi berjamaaah”. Korupsi memang terjadi dimana-mana di Indonesia, tetapi citra Aceh yang dikenal sebagai daerah kaya (sumber modal), Serambi Mekah, daerah konflik, daerah bencana gempa dan tsunami yang sangat dahsyat sehingga menarik perhatian dunia, menjadikan persoalannya tampak jauh lebih menarik.

Kendatipun kinerja pemerintah (Pusat dan Pemda) patut selalu dipertanyakan, namun tidak pula secara keseluruhan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada mereka. Harapan selalu ada, karena kita harus percaya bahwa lebih banyak orang Indonesia yang pintar, jujur, beragama dan pasti menyukai hal-hal yang baik dan tidak suka kepada hal yang tidak baik. Sesuatu yang terpenting ialah pemerintah di semua level mau mengoreksi diri akan kesalahan yang telanjur dilakukan, memperbaiki kinerjanya dan menjalankan pemerintahan secara bertanggungjawab. Pemerintah harus menjaga kepercayaan rakyat yang telah diberikan tanpa meminta suatu imbalan yang muluk-muluk.

4.2.3. Disorientasi Norma-Norma Hukum

Norma-norma hukum semestinya adalah suatu pedoman umum untuk menetapkan fokus dan orientasi yang tepat bagi penegakan keadilan sehingga kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dapat ditingkatkan kualitasnya. Hanya saja, selama ini kesan sosiologis yang diperoleh dari proses-proses penerapan hukum yang dijalankan adalah bahwa hukum lebih identik dengan denda,

dendam, penjara, korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, sogok, pemalakan, konflik, pemberontakan, separatisme, penyiksaan, penyelewengan, dan lainnya yang bernuansa kriminal. Hukum sebagai basis dan sumber keadilan, kehidupan yang aman dan nyaman, sejahtera, dan lain-lain yang berpotensi kesejukan dalam hidup dan kehidupan tereduksi oleh proses-proses hukum yang dipertontonkan oleh lembaga-lembaga hukum dan keadilan.

Di Aceh, sebagaimana dapat disarikan dari diskusi terfokus yang diadakan di beberapa kecamatan di Aceh Besar, proses-proses hukum yang dijalankan juga tidak berbeda dengan apa yang dipertontonkan di daerah lain di Indonesia. Hukum telah menjadi alat hanya mencari kesalahan, tetapi kurang dimanfaatkan sebagai fasilitas menegakkan keadilan. Inilah penyebab pertama munculnya disorientasi norma-norma hukum.

Hal kedua, yaitu hukum identik dengan kekuasaan, melebihi keadilan sebagai fokus pelaksanaan hukum yang sesungguhnya. Hal ini berarti bahwa apabila mereka yang berkuasa melakukan suatu pelanggaran akan sulit dijerat oleh hukum karena berbagai macam alasan yang “melindungi”. Fenomena ini sangat umum terjadi di Indonesia, dimana pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran, penyelewengan, dalam masa jabatannya tidak atau belum dapat disentuh oleh hukum. Namun, ketika pejabat itu sudah lengser atau menjadi mantan pejabat barulah hukum bisa dikenakan kepadanya. Setelah menjadi mantan pejabat, kalau tidak bisa jadi tersangka, paling tidak bisa untuk menjadi saksi di pengadilan. Kalaupun menjadi saksi juga tidak bisa, maka paling tidak namanya dipertanyakan dan disebut-sebut pers akan keterlibatannya dalam suatu pelanggaran. Penyebab disorientasi norma-norma hukum karena pengaruh kekuasaan seperti ini juga sama saja bagi mereka yang bukan pejabat, misalnya pengusaha, tetapi sahabat, teman, keluarga, mantan seseorang pejabat.

Hal ketiga, semboyan yang menyatakan bahwa dimuka hukum semua orang sama belum sesuai dengan kenyataan yang

sesungguhnya. Sesuatu yang seringkali terjadi ialah keadilan sebagai produk hukum yang didambakan oleh semua pihak yang mencarinya lebih memihak kepada yang kuat dan melecehkan yang lemah, cepat dikenakan kepada pelanggaran yang sifatnya “biasa” dibandingkan dengan mereka yang derajat pelanggarannya besar. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum adalah sumber disorientasi norma-norma hukum yang sangat nyata.

4.2.4. Kepercayaan Terhadap Norma Adat

Bagi masyarakat Aceh kepercayaan terhadap hukum dan/atau norma-norma adat sebenarnya tidak ada masalah, dalam pengertian adat Aceh yang bersendikan agama Islam tetap menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan mereka. Dengan kata lain kepercayaan terhadap adat tetap tinggi, karena adat dan Islam di Aceh sudah merupakan suatu kesatuan, paduan yang tidak terpisahkan. Dalam masyarakat Aceh terdapat adagium yang menyatakan *Hukom ngon adat han jeuet cre lagee dzat ngon sipheuet*, artinya ”hukum adat dan hukum agama tidak boleh bercerai, ibarat tidak dapat dipisahkannya antara zat dengan sifatnya”. Adagium tersebut menggambarkan dasar perilaku dan pandangan hidup atau *Weltanschauung* orang Aceh dalam kehidupan kemasyarakatannya.

Masalah ketidakpercayaan yang muncul justeru berhubungan dengan fungsi norma-norma dan perangkat adat dan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan terutama di wilayah pedesaan (pedalaman). Hal ini terjadi sejak diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan seluruh sistem pemerintahan desa di Indonesia. Produk UU ini tidak hanya membawa dampak terhadap pemerintahan desa di Aceh tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah di luar Jawa. Hal ini bisa demikian karena UU tersebut mengambil sistem desa-desa di Jawa sebagai contoh yang diinstruksikan untuk diberlakukan secara seragam. Tentu saja dampak UU ini menimbulkan masalah di daerah-daerah luar Jawa, termasuk di Aceh

dimana status keistimewaannya makin tidak jelas karena intervensi UU dari Pusat.

Di Aceh desa disebut *gampong* dan sistem pemerintahan desanya dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut *keuchik*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pula perangkat-perangkat desa lainnya, antara lain *teungku imeuem* (Imam Meunasah desa), *tuha peut* (lembaga musyawarah tingkat desa). Dalam strukturnya desa di Aceh berada dibawah *Mukim*, yaitu kelembagaan pemerintahan yang meliputi beberapa desa yang berdekatan. Hal-hal ini adalah sebagian contoh yang membedakannya dengan desa-desa di Jawa. Kesulitan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 di Aceh ialah dalam prakteknya Kepala Desa dan Lurah (pengganti *keuchik*) tidak memiliki akar ke bawah ke masyarakat, akibatnya banyak hal yang menyangkut soal-soal pemerintahan dan pembangunan tidak direspon warga masyarakat secara layak dan antusias.

4.3. Modal Sosial

4.3.1. Kepercayaan, Solidaritas dan Toleransi

Kepercayaan memang merupakan modal sosial yang utama bagi orang Aceh, terutama yang menyangkut kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada kemampuan sendiri, kepercayaan kepada kekuatan sendiri yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena kuatnya kepercayaan diri mereka sehingga pada umumnya orang-orang Aceh seringkali dipandang memiliki karakter yang keras, tidak mau didikte, tidak rela menyerah dalam menghadapi berbagai jenis tantangan dan sangat teguh dalam menghadapi masalah dan bermacam musibah.

Kepercayaan diri itu muncul sebagai suatu modal sosial sesungguhnya disebabkan oleh karena orang Aceh itu adalah mayoritas atau boleh dikatakan seratus persen beragama Islam dan mereka yakin betul bahwa segala tantangan, masalah dan musibah itu adalah ujian dari Allah YMK yang dalam kekuasaannya segala sesuatu bisa terjadi. Bagi orang Aceh semua ujian itu adalah tanda

masih adanya kasih sayang Allah kepada hambaNya. Ketika datang musibah gempa dan tsunami, misalnya, seperti yang ditayangkan di TV, orang-orang Aceh memang ada yang menangis, panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri dan anggota keluarganya, itu adalah suatu tindakan yang sangat manusiawi. Namun, jika dilihat di TV juga, ketika hal yang serupa terjadi pada orang-orang atau kelompok lain, mereka menjadi berteriak histeris, memukul-mukul diri, seakan-akan semua sisi kehidupan bagi mereka sudah terputus, telah berakhir. Dengan kata lain, musibah bagi orang Aceh adalah penyebab kepanikan sementara, tetapi bukan pertanda keputusasaan.

Kuat dan tingginya kepercayaan diri bagi orang Aceh tidak berarti menjadikannya sebagai orang yang egois, hanya memperhatikan diri sendiri, hanya membenarkan diri sendiri. Juga, kepercayaan diri yang tinggi itu bukan berarti bahwa mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam segala-galanya secara mandiri. Meskipun percaya diri tinggi, orang-orang Aceh tidak pernah menolak orang lain yang dengan ikhlas ingin memberikan bantuan kepada mereka, seperti dalam menghadapi bencana gempa dan Tsunami serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dalam perkataan lain, percaya diri yang tinggi bagi orang Aceh tidak melunturkan nilai-nilai kepercayaan mereka kepada orang lain, juga tidak menjadikan sifat solidaritas dan toleransi mereka berkurang.

Secara umum, kepercayaan terhadap sesama orang yang berasal dari Aceh cukup besar, apalagi berasal dari kabupaten yang sama atau malahan dari kecamatan atau kampung yang sama.. Hal yang tidak secara otomatis terjadi ketika orang Aceh Besar berhadapan dengan orang yang berasal dari Jawa. Sebagian orang Aceh tidak begitu percaya dengan orang Jawa. Akan tetapi sikap tidak percaya ini, ternyata bukan suatu harga mati. Terdapat suatu garis penyatu yang sangat kuat artinya bagi pada umumnya setiap orang Aceh, yaitu kesamaan dalam beragama. Adanya kesamaan dalam beragama, merupakan salah satu kunci yang mampu membuat orang “asing” dapat diterima secara bersahabat oleh orang Aceh. Di samping kesamaan agama, orang Aceh juga memiliki dasar-dasar

nilai resiprositas yang tinggi. Ada suatu pepatah dalam bahasa Aceh yang artinya kurang lebih “Bila kamu baik terhadap orang Aceh, maka Anunya pun akan diberi”. Diakui pula bahwa orang Aceh akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih, tetapi akan menjadi jahat bila diperlakukan secara jahat.

Soal solidaritas dan/atau toleransi, orang Aceh sudah berkali-kali menunjukkannya pada tingkat nasional, Indonesia. Demi kelangsungan kemerdekaan RI dan pemerintahan nasional yang masih seumur jagung pada masa itu, orang Acehlah yang telah tampil lebih dulu kemuka menunjukkan komitmen solidaritasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mereka mengumpulkan perhiasan emas dan menghadiahkannya kepada Bung Karno (baca: pemerintah Pusat) serta membelikan pesawat terbang pertama bagi Indonesia, semuanya dilakukan karena solidaritas, toleransi dan kecintaannya kepada negara Republik Indonesia. Hal yang sama ditunjukkan lagi orang pada masa Indonesia menghadapi krisis ekonomi, mereka kembali lagi mengumpulkan emas untuk disumbangkan kepada pemerintah Pusat dengan tujuan membantu dan mendorong penyelesaian krisis ekonomi yang sangat berdampak negatif pada perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Pada semua momen itu orang Aceh tidak pernah mengungkit-ungkit bagaimana sumbangannya dimanfaatkan dan apakah sudah sampai kepada tujuannya. Hanya saja apa yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh tersebut seringkali dipandang sebelah mata atau tidak dihargai secara layak oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya adalah menimbulkan reaksi balik dari sebagian orang Aceh, dalam bentuk perlawanan, dan keadaan seperti itulah yang mewarnai hubungan antara Pusat dan Aceh selama bertahun-tahun sejak Indonesia merdeka.

Wujud toleransi orang Aceh pada level sosial atau kalangan masyarakat sebenarnya sangat bervariasi dan terlalu banyak untuk dikemukakan satu persatu, sebagaimana pula yang dikemukakan oleh informan dalam kesempatan diskusi terfokus. Mereka mengemukakan dan mencontohkan bentuk toleransi itu mulai dari bagaimana kerajaan-kerajaan di Aceh pada masa lalu menerima agama Islam dan

kemudian berintegrasi menjadi suatu Kerajaan Aceh Darussalam sampai kepada wujud toleransi dalam kehidupan sehari-hari di kedai kopi. Oleh karena itu di sini hanya akan dikemukakan dua hal yang menyangkut kebahasaan dan penghargaan dan toleransi kepada pihak (kaum) perempuan.

Adalah sesuatu yang biasa apabila orang-orang Aceh berkumpul maka untuk berdialog, berbincang-bincang antar mereka, mereka menggunakan bahasa daerah (Aceh). Hal ini secara umum terjadi dimana-mana, seperti di pasar-pasar, masjid dan muenasah khususnya di pedesaan, di kedai-kedai kopi, dan lain sebagainya. Bahasa Aceh bukan hanya alat untuk berkomunikasi untuk membangun saling pengertian di kalangan para penggunanya, lebih dari itu bahasa Aceh adalah bahasa pergaulan yang memiliki kekuatan mengakrabkan bagi para penuturnya. Selain itu, bahasa Aceh juga adalah bahasa budi pekerti yang menuntun terciptanya akhlak yang mulia, sebagaimana terungkap dalam *Narit Maja* (peribahasa), antara lain: *Ureung geumat bak narit, leumo geumat bak taloe* (Orang dipegang pada bicaranya, sapi dipegang pada talinya), *Ureung kon rupa nyang jroh, nyang jroh budi bahsa* (Orang dilihat bukan pada rupa yang baik, tapi pada budi bahasa). Namun demikian, apabila dalam kesempatan berkumpul itu datang orang lain, apalagi orang itu datang dengan pembuka kata salam (*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*) serta orang itu mereka belum kenal atau mereka kenal sebagai bukan orang Aceh, maka dengan segera orang-orang Aceh mengalihkan pembicaraannya dari bahasa Aceh ke bahasa Indonesia. Orang-orang Aceh yang berbahasa Indonesia akan kentara ke-Aceh-annya pada irama, nada dan tekanan bahasanya.

Kaum perempuan Aceh tidak hanya ibu dari anak-anaknya, sumber potensial tegaknya rumah tangga atau keluarga, tetapi mereka pun adalah sumber tegaknya negeri Aceh. Keadaan seperti itulah yang menjadi catatan emas sejarah Aceh dimana kaum perempuan duduk sama rendah serta berdiri sama tegak dengan kaum laki-lakinya. Dengan kata lain kaum perempuan sangat dihargai oleh masyarakatnya, bahkan dalam masa-masa tertentu di masa lalu

mereka pernah memegang kendali tertinggi dalam pemerintahan kerajaan dan beberapa peperangan yang melibatkan Aceh pada masa lalu. Sebagai ilustrasi beberapa orang tokoh perempuan yang dikenal karena perannya di masa lalu, antara lain (A. Hasymi, 1996):

- (1) Laksamana Malahayati, hidup pada masa Kerajaan Aceh Darussalam dibawah Sultan Alauddin Riayat Syah Al Mukammil (997-1011 H/1589-1604 M). Laksamana Malahayati salah seorang pemimpin/panglima armada Aceh ketika melawan Portugis, juga pencetus pertama kali terbentuknya Armada *Inong Balee* (Armada Wanita Janda) di Aceh.
- (2) Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin adalah *Sultanah* Kerajaan Aceh Darussalam (1050-1086 H/1541-1675 M). Dalam masa pemerintahannya Aceh mengalami perkembangan sosial budaya dan ilmu pengetahuan yang pesat, sehingga tampil sejumlah besar ulama dengan karya-karya ilmiah yang bermutu. Meskipun dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan menurun pamornya. Sebelum wafat, beliau telah mempersiapkan 3 (tiga) calon penggantinya semuanya perempuan yang kelak memerintah secara berurutan, yaitu:
- (3) Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1086-1088 H/1675-1699 M). Dalam pemerintahannya Aceh menghadapi ancaman baik dari luar (Belanda, Portugis, Inggeris) maupun dari dalam negeri, yakni "kaum Wujudiyah" yang telah menyeleweng dari ajaran Islam.
- (4) Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1088-1098 H/1678-1688 M). Dalam masa pemerintahannya menghadapi tantangan yang sama tetapi lebih berat dari pendahulunya. Untungnya, pada masanya ada Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, yang diangkat menjadi Kadi Malikul Adil (Ketua Mahkamah Agung) yang mendampingi dan membelanya.
- (5) Sri Ratu Kamalatuddin Syah (1098-1109 H/1688-1699 M). Pengangkannya banyak dipersoalkan, tetapi adanya bantuan dari Syekh Abdurrauf Syiah Kuala dan para ulama besar lainnya beliau dapat mulai memperbaiki kembali kondisi ekonomi. Hanya saja ketika Syekh Abdurrauf meninggal dunia pada 1106 H/1695

M pemerintahannya makin mendapat tantangan dari oposisi. Ratu Kamalat Syah sendiri wafat pada 1116 H/1705 M.

4.3.2. Kebersamaan, Tanggung Jawab dan Kemandirian

Wujud kebersamaan, tanggung jawab dan kemandirian sosial yang sangat kental dari penduduk yang berdiam di daerah-daerah Serambi Mekah ini adalah menyangkut identitas mereka sebagai orang Aceh. Keacehan tidak hanya berkenaan dengan nama wilayah, tetapi yang lebih penting adalah makna keterikatan dan kebersamaannya sebagai suatu ACEH yang merupakan integrasi dari beberapa kelompok bangsa dan/atau sukubangsa, asal usul, sejarah, identitas sosio-kultural yang bersifat parsial sebelumnya. Kata ACEH seringkali diartikan sebagai kumpulan dari beberapa sukubangsa atau bangsa yang berasal dari Arab, Cina, Eropa dan Hindia (India). Dari keempat asal usul inilah kemudian berkembang menjadi masyarakat Aceh yang kita kenal saat ini, meliputi sekitar 70% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah kurang lebih 4,2 juta jiwa. Selain mereka terdapat sukubangsa Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, Haloban dan Simeleue. Suku-sukubangsa yang disebut terakhir, meskipun secara kultural berbeda dengan mereka yang disebut sukubangsa Aceh, tetapi dalam perjuangan menghadapi ancaman terhadap integritas Aceh pada masa lalu mereka menunjukkan rasa kebersamaan, tanggung jawab yang tinggi.

Kebersamaan, tanggung jawab dan kemandirian dari kelompok komunitas yang bertempat tinggal di suatu lingkungan yang sama sangat nampak pada aktivitas gotong royong. Demikian pula dalam menghadapi segala macam bencana tsunami dan jenis malapetaka lainnya. Di wilayah Kecamatan Kota Jantho, baik di Jantho Makmur maupun di Jantho Baru misalnya, kebersamaan itu juga terbentuk oleh perasaan sebagai sama-sama migran (pendatang) di tempat pemukiman saat ini. Sebagaimana diketahui Kota Jantho adalah wilayah yang sengaja dibuka dan diperuntukkan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Besar, setelah Banda Aceh memisahkan diri karena menjadi Kota Madya sendiri pada masa lalu.

Penduduk pendatang yang bermukim di Kota Jantho berasal dari berbagai wilayah kecamatan di Aceh Besar, dari daerah-daerah kabupaten lain di Provinsi NAD, bahkan juga dari beberapa daerah di luar Aceh, antara lain dari propinsi-propinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Semua penduduk merasa orang baru karena ketika Jantho dibuka memang tidak mempunyai penduduk "asli" yang mengkalim diri sebagai orang Jantho. Setelah tinggal bersama di Jantho, untuk mengembangkan segi-segi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya para pendatang itu membentuk semacam kelembagaan sosial budaya (*Keuchik, Tuha Peut, Imeum Meunasah*) seperti yang ada di daerah-daerah Aceh lainnya. Ketika penelitian dilaksanakan, Keuchik Desa/Kelurahan Jantho Makmur adalah seorang yang berasal dari Pulo Aceh.

Dalam membangun dan mengembangkan wilayah Jantho Baru sehingga menjadi seperti apa adanya saat ini memang sangat didukung oleh rasa kebersamaan, tanggung jawab dan kemandirian warganya. Membentuk kondisi seperti itu adalah suatu keharusan yang semuanya diwujudkan dalam makna gotong royong, saling tolong menolong. Dikatakan sebagai suatu keharusan karena hanya sesama warga, tetangga, yang akan turun tangan lebih dulu untuk membantu, menolong, apabila terjadi sesuatu. Kalau di kampung halaman ada keluarga, orang tua, kakak dan adik yang akan memperhatikan, membantu ketika sebuah keluarga ditimpa musibah atau mengadakan sesuatu, di daerah migran seperti Jantho peran-peran seperti itu diambil alih oleh para tetangga, sesama warga komunitas.

Masalah kebersamaan, tanggung jawab dan kemandirian di Jantho Baru cukup baik selama beberapa tahun sejak terbentuk. Dalam tiga tahun terakhir di Jantho Makmur warganya sudah membangun 5 (lima) meunasah (mushallah) semuanya secara swadaya. Di desa ini ada suatu kebiasaan apabila sebuah keluarga mengalami duka (anggota keluarga meninggal, terkena musibah, dll) maka semua warga lainnya merasa berkewajiban membantu, mengunjung dan membawa sedekah. Selama seminggu dapurnya

tidak perlu hidup (memasak) karena akan dibantu oleh warga yang lain, mekanisme pemberian bantuan adalah hari pertama dibantu oleh 3 (tiga) rumah tangga, hari kedua sampai ketujuh juga masing-masing 3 (tiga) rumah tangga secara berturut-turut. Kegiatan demikian, menurut mereka, sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW melalui sabdanya: "Keluarga yang meninggal janganlah dia yang repot, terhadap yang kena musibah datangilah, perhatikanlah dan bantulah".

Potensi sosial untuk menegakkan kebersamaan, tanggung jawab dan kemandirian yang digambarkan di atas secara umum masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Aceh Besar pada umumnya. Di kampung Blang Bintang yang termasuk wilayah Bandara Sultan Iskandar Muda, misalnya, apabila rumah tempat tinggal sebuah keluarga terbakar, maka semua orang sekampung, tetangganya, secara gotong royong membangun kembali rumah walaupun sederhana. Hal ini menunjukkan rasa persaudaraan yang tinggi. Di sini tetangga itu bagaikan bagian dari satu tubuh, kalau salah satunya "sakit" maka seluruh bagian tubuh yang lain akan merasakannya pula.

5. Deprivasi dan Rekonstruksi

5.1. Kehilangan Hak dan Pemenuhan Kebutuhan

Selama tiga puluh tahun, dalam masa pemberontakan dan perlawanan GAM terhadap pemerintah Indonesia yang dimulai sejak Desember 1976 dan baru berakhir pada tanggal 15 Agustus 2005, kehilangan hak yang sangat dirasakan orang Aceh, terutama di wilayah pedesaan, ialah hak untuk hidup aman. Hal yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu keadaan kehidupan yang meronrong, mencekam, menakutkan, sehingga berdampak pada pekerjaan, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan masa depan anak-anak serta lainnya. Dapat dikatakan dari sisi masyarakat tidak ada upaya yang signifikan yang bisa dilakukan untuk dapat menanggulangi terpuruknya rasa aman itu. Keadaan ini bisa terjadi karena rakyat pada posisi yang lemah diantara dua kekuatan yang sama-sama

mengedepankan tindakan kekerasan. Kekerasan berhadapan dengan kekerasan.

Dari pihak pemerintah Indonesia, rasa tidak aman masyarakat Aceh itu dipersepsikan sebagai akibat dari kehadiran GAM semata-mata yang menginginkan pemisahan Aceh dari negara Republik Indonesia. Persepsi demikian menjadi alasan pemerintah mengambil sikap, strategi dan pendekatan yang harus dilakukan, yaitu perlawanan GAM yang berindikasi separatisme itu harus dilumpuhkan dan ditumpas. Upaya menyelesaikan masalah perlawanan itu harus melalui pendekatan kekerasan (secara militer) – misalnya digelarnya serentetan operasi-operasi militer (TNI) di wilayah kantong-kantong GAM di seluruh Aceh. Pendekatan militer yang banyak ditentang oleh berbagai kelompok pencinta perdamaian ternyata tidak berhasil dan, bahkan, sesungguhnya mewariskan dampak yang bersifat negatif bagi semuanya, terhadap TNI, Polri, GAM, pemerintah Indonesia (Pusat dan Pemda Aceh), dan terutama terhadap rakyat atau masyarakat sipil Aceh.

Datangnya bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 membawa hikmah, dilihat dari sisi sebagai momentum yang menyadarkan kedua pihak (GAM dan Pemerintah Indonesia) untuk kembali menyelesaikan masalah konflik mereka (konflik Aceh) dengan cara-cara damai, mekanismenya melalui dialog yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) yang dipimpin mantan Presiden Finlandia, Martin Ahtasari. Dialog, perundingan antara delegasi pemerintah Indonesia dan GAM yang berlangsung selama lima tahap, pada akhirnya membuahkan MoU Helsinki, ditandatangani 15 Agustus 2005. Hikmah dari MoU Helsinki itu mulai dirasakan oleh rakyat Aceh dan bagi mereka yang biasa berkunjung ke Aceh, yaitu Aceh aman.

Hanya saja dampak yang ditinggalkan oleh bencana gempa dan tsunami itu masih menyisakan banyak masalah, seperti penduduk yang luka-luka, cacat, pengungsi, kerusakan sarana dan prasarana, pengangguran, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan

sebelumnya, di Aceh Besar, berdasarkan keadaannya pada 30 Agustus 2005 jumlah sarana dan prasarana yang rusak total ada 111 yang terdapat di 7 kecamatan (lihat Tabel 9). Ketika penelitian dilakukan pada bulan Januari/Februari 2006, belum setengah dari jumlah tersebut yang dapat diperbaiki kembali. Masalahnya bermacam-macam mulai dari masalah anggaran (dana/keuangan) yang belum ada, lokasi yang dianggap rawan terhadap bencana (abrasi air laut), sampai kepada persoalan tenaga kerja trampil yang dianggap kurang.

Kemudian, di Aceh Besar, menurut Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, sampai pada 9 September 2005 masih terdapat 104.411 pengungsi yang lokasi pengungsianya tersebar di 22 kecamatan yang ada di daerah ini. Pada bulan Januari 2006, baru sebagian kecil dari pengungsi tersebut sudah mendapatkan rumah yang dibangun oleh lembaga-lembaga donor yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Tzu Chi Foundation dari Taiwan, misalnya, yang mengelola lokasi tenda-tenda pengungsi di Jantho Baru sedang membangun perumahan di dekat Banda Aceh, diperuntukkan bagi para pengungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Dari sekitar 500 KK (Kepala Keluarga) yang menghuni tenda-tenda di camp pengungsi Jantho Baru, sudah ada 200 KK yang sudah dapat rumah. Rumah yang didapat adalah berbentuk kopel, tipe 36 dengan luas tanah masing-masing 76 meter persegi, halaman depan dan belakang masih tersisa masing-masing sekitar 4 meter, samping kiri dan kanan 1 meter. Bagi para pengungsi di Jantho Baru tampaknya Tzu Chi memiliki reputasi yang baik. Seorang bapak, Haji M, pengungsi, usia sekitar 67 tahun, isteri dan dua anaknya menjadi korban tsunami, sebelum tsunami sebagai penjual ikan di pasar Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“....Semua akan dapat rumah, jadi kami tidak perlu ragu, bersabar saja menunggu giliran yang penetapannya melalui undian setiap kali ada beberapa rumah yang sudah siap. Tzu Chi sangat perhatian, bantuannya tidak pernah telat. Lihat saja, jatah beras dan gula pasir untuk bulan Februari 2006, hari ini (30 Januari 2006) sudah dibagikan. Insya Allah,

kalau sudah dapat rumah bapak akan kembali berjualan ikan di pasar Banda Aceh, maklum sudah tua dan ketrampilannya cuma itu”.

Ada kesan umum di kalangan pengungsi bahwa hak-hak mereka yang hilang akibat gempa dan tsunami, untuk sebagian terpenuhi kembali secara apa adanya, seperti hak untuk mendapatkan makanan, air bersih, tempat berteduh (tenda-tenda) berkat bantuan lembaga-lembaga donor asing yang masuk ke Aceh sejak hari-hari pertama setelah tsunami. Ketika ditanyakan bantuan atau pemenuhan kebutuhan yang berasal dari pihak pemerintah, seorang ibu, pengungsi dari Lampulo yang tinggal di tenda camp pengungsi Teurebeh, Jantho Makmur, menyatakan sebagai berikut:

“Ketika awal-awal Tsunami memang ada bantuan dari Pemerintah berupa pakaian, ada pakaian yang baru juga ada pakaian bekas. Namun, setelah itu tidak pernah lagi datang bantuannya. Sebutir beras pun belum pernah diterima dari pemerintah. Kemudian, soal jadup (jaminan hidup) sebanyak Rp.3000 per hari (per bulan Rp.90.000) baru diberikan sampai bulan Agustus 2005. Bulan September 2005 sampai saat ini (Januari 2006) belum pernah lagi diberikan. Padahal jatah jadup dijanjikan akan diberi kepada setiap keluarga pengungsi selama 2 tahun”.

Dalam FGD, soal jadup ini juga disinggung oleh seorang peserta dari kalangan pengungsi. Dikatakannya, bahwa soal keterlambatan pemberian jadup memang menjadi pertanyaan, apa dan dimana masalahnya?. Dia mempertanyakan, apakah pemerintah Pusat (Jakarta) belum menurunkannya ke Pemda NAD atau sudah diturunkan, tapi Pemda NAD menyimpan atau mendepositokannya dulu di Bank agar mendapat bunga. Namun, dia yakin jatah jadup sampai Desember 2005 sudah diturunkan pemerintah Pusat, karena menurutnya tahun anggaran sekarang berakhir bulan Desember. Kalau jatah jadup tahun 2006 mungkin belum karena masih dalam proses. Mungkin juga Pemda belum membagikan karena harus mendata kembali jumlah pengungsi secara benar. Soalnya, pada waktu pembagian jadup yang lalu ternyata banyak pengungsi yang

mengambil jatah 2 kali bahkan ada yang lebih. Sudah ambil di camp, kemudian pergi lagi ke desa asalnya untuk mengambil jatah. “Entahlah, sebenarnya ada rasa malu mengungkapkan hal begini di forum seperti ini, tapi jadup itu sungguh sangat kami butuhkan sekeluarga yang selama berbulan-bulan tidak bekerja, tidak mempunyai sumber penghasilan tetap” katanya dengan penuh harap mengakhiri pembicaraan.

5.2. Antisipasi dan Sistem Penanggulangan Akibat Bencana

Pada umumnya peserta FGD menyatakan bahwa bencana tsunami adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Bahkan sebagian mengatakan bahwa ketika orang-orang berlarian dan berteriak adanya banjir besar yang berasal dari laut, gelombang raksasa muncul dari laut menyusul gempa yang terjadi hanya beberapa menit sebelumnya, sebagian malah tidak percaya. Antisipasi terhadap datangnya bencana tsunami dapat dikatakan diluar pemikiran mereka. Mereka belum pernah punya pengalaman menghadapi bencana seperti itu.

Berbeda halnya dengan penduduk Pulau Simeulue yang pulaunya sering dilanda gempa dan disusul dengan gelombang tsunami, mereka sudah terbiasa berlari ke tempat-tempat tinggi yang diperkirakan tidak akan dicapai oleh gelombang laut yang dahsyat. Oleh karena itu, ketika tsunami terjadi 26 Desember 2004 penduduk Pulau Simeulue yang korban (hilang/meninggal) hanya 1 orang, padahal rumah mereka yang rusak 15.415 buah. Sementara itu penduduk Banda Aceh yang korban (hilang/meninggal) mencapai 64.552, Aceh Besar 43.902, Sabang 108, Aceh Jaya 77, Aceh Barat 2.911, Pidie 2.091, Aceh Selatan 1.086, serta daerah-daerah yang berbatasan dengan pantai lainnya banyak menjadi korban tersapu oleh air bah yang tingginya melebihi atap rumah. Data selengkapnya lihat tabel 15.

Tabel 15 : Korban Bencana Alam Gempa Bumi/Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jumat, 18 Februari 2005, Pukul 03.00 WIB

No.	Kab./Kota	Dirawat	Hilang/ Meninggal	Mengungsi	Rumah Rusak
1	Bireun	187	58	15.546	5.745
2	Aceh Timur	0	0	13.710	0
3	Aceh Utara	160	401	20.942	5.487
4	Banda Aceh	0	64.552	39.509	0
5	Lhokseumawe	75	11	20.084	913
6	Pidie	0	2.091	64.613	0
7	Sabang	0	108	4.403	0
8	Aceh Tengah	229	227	4.005	0
9	Aceh Jaya	0	77	40.382	0
10	Aceh Besar	0	43.902	71.675	0
11	Simeulue	135	1	18.009	15.415
12	Aceh Selatan	10	1.086	16.188	0
13	Aceh Barat	0	2.911	74.056	0
14	Aceh Barat Daya	0	0	7.943	0
15	Nagan Raya	0	865	17.040	0
16	Aceh Tenggara	0	0	0	0
17	Gayo Lues	0	0	0	0
18	Aceh Singkil	0	4	105	0
19	Aceh Tamiang	0	0	3.100	0
20	Langsa	0	0	10.370	0
21	Bener Meriah	0	0	1.204	0
Jumlah		796	166.344	442.864	27.560

Sumber: Posko Direktorat BSKBA Departemen Sosial RI

Belum adanya pengalaman menghadapi tsunami menyebabkan masyarakat di Aceh Besar juga tidak atau kurang memiliki kesiapan dalam menanggulangi akibat bencana tsunami. Dapat dikatakan bahwa mereka juga tidak berdaya karena masih dibayang-bayangi oleh bencana yang maha dahsyat itu, masih dalam

suasana duka ditinggalkan ayah, ibu, anak, keluarga yang meninggal akibat hempasan gelombang tsunami, serta kendala-kendala lainnya. Sistem penanggulangan akibat bencana yang kemudian datang berasal dari berbagai negara dan daerah-daerah di Indonesia, melibatkan bermacam-macam unsur – pemerintah, NGO/LSM, kelompok masyarakat daerah, kelompok keagamaan, dlsb.- yang secara bersama-sama dan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai saat ini, masih membantu masyarakat dan pemerintah daerah Aceh. Sistem penanggulangan yang mereka tunjukkan, terutama oleh NGO/LSM asing ialah penanggulangan secara total, langsung ke warga korban, tanpa pamrih, berdasarkan rasa kemanusiaan.

Bertolak dari sistem penanggulangan akibat bencana seperti itulah, menyebabkan banyak warga masyarakat korban tsunami yang saat ini masih dan/atau pernah berstatus pengungsi membandingkannya dengan kinerja pemerintah dalam memberikan bantuan. Dalam memberikan bantuan, mereka menilai pemerintah tidak secara total (pilih kasih, ada korban yang mendapat bantuan beberapa kali sementara ada juga yang tidak dibantu, dll), melalui perantara menyerupai sistem birokrasi pemerintahan, seringkali disertai dengan kepentingan yang bersifat politis.

5.3. Deprivasi, Lembaga Pemerintahan dan Pranata Sosial

Sebelumnya telah disinggung mengenai keadaan dan peranan kelembagaan pemerintahan dan fungsi pranata sosial yang hilang, berkurang dan merosot akibat adanya berbagai UU yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat, antara lain UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Inilah warisan dari salah satu produk UU di zaman Orde Baru yang sebenarnya tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi pada umumnya terjadi juga di daerah-daerah di luar Jawa, seperti di Sumatera Barat dengan sistem ke-nagari-annya, di Sulawesi Selatan dengan “wanua”-nya, di Nusa Tenggara Timur dengan sistem ke-suku-annya, dan lain-lain. Bagi Aceh sampai saat ini, hilang dan/atau berkurangnya sebagian fungsi dari pranata sosial karena imbas dari peraturan pemerintah hanyalah salah satu sumber atau sumbernya

yang pertama. Sumbernya yang kedua ialah karena berlanjutnya dan berlarut-larutnya konflik di daerah serambi Mekah tersebut sejak Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945. Kemudian sumber hilangnya fungsi pranata sosial yang ketiga ialah dengan adanya bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang melanda sebagian besar wilayah pantai propinsi dengan letak paling barat di Indonesia itu.

Hilang atau berkurangnya fungsi pranata sosial di Aceh karena pengaruh UU dari Pusat sangat berpengaruh di wilayah pedalaman atau pedesaan. Menurut para peserta FGD di Aceh Besar, pada masa lalu pranata sosial adat di pedesaan terkonsentrasi pada peranan kepala desa (*Keuchik*) karena seorang *keuchik* selain bertindak sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, juga merangkap sebagai Ketua Majelis Adat yang fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa. Hakim Perdamaian Desa mempunyai kewenangan luas untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Kewenangan mengadili yang dimaksud adalah meliputi semua perbuatan illegal yang terjadi sehingga merusak keseimbangan hukum masyarakat. Tindakan hukum harus ditegakkan bukan dengan tujuan memberi hukuman kepada sipelaku semata, tetapi yang lebih penting adalah memulihkan kembali keseimbangan hukum masyarakat.

Dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang bertujuan menyeragamkan fungsi kepala desa hanya sebagai kepala pemerintahan di bawah camat, maka peranan *keuchik* di Aceh sebagai Ketua Majelis Adat di tingkat desa dan Hakim Perdamaian Desa tidak diakui. Kondisi ini juga membawa pengaruh hilangnya peranan dari anggota-anggota majelis desa. Terlepas dari soal hukum tersebut, peranan *keuchik* sebagai kepala pemerintahan menjalankan organisasi pemerintahan, langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Keuchik* dibantu oleh sejumlah perangkat desa yang merupakan lembaga (pranata) yang hidup dalam masyarakat (lihat, Keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar, Nomor 1, Tahun 1997 tentang Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar), yaitu:

- Sekretaris,
- Tuha Peut,
- Teungku Meunasah,
- Keujruen/Peutua Blang,
- Panglima Laot,
- Peutua Sunoneubok,
- Haria Peukan,
- Syahbanda.

Konflik Aceh yang berkepanjangan sebagai faktor yang menghilangkan sebagian fungsi pranata sosial, terutama dirasakan di tingkat desa dan di tingkat kecamatan. Masalahnya adalah terletak, antara lain pada instabilitas keamanan wilayah, ketidakmampuan pejabat dan perangkat pemerintahannya menjalankan roda pemerintahan secara baik, juga ada keengganan warga masyarakat untuk mendatangi kantor kepala desa dan kantor camat karena takut dianggap melakukan pemihakan. Dalam keadaan konflik, lembaga atau pranata sosial juga tidak berfungsi maksimal dan, oleh karenanya, tidak pula mengherankan apabila tatanan sosial menjadi tidak teratur dan terbengkalai.

Kelembagaan pemerintahan tingkat kecamatan dan tingkat desa di Aceh yang tidak berfungsi di masa konflik, diinformasikan oleh suatu penelitian yang dilakukan LIPI (lihat, Patji, dkk., 2004). Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa sebelum Operasi Terpadu di Aceh yang dilaksanakan mulai Mei 2003, terdapat 36 dari 230 kecamatan tidak berfungsi sehingga para camatnya diberhentikan dari jabatannya dengan alasan tidak dapat menjalankan tugas. Dalam kondisi konflik, juga terdapat 609 pemerintahan *gampong* (desa) dari 5.477 desa yang ada di Aceh, terutama di wilayah pedesaan/pedalaman, tidak berfungsi. Desa-desa yang tidak berfungsi tersebut tersebar di 8 kabupaten, yaitu Aceh Besar, Pidie, Bureuen,

Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya.

Untuk kepentingan pelaksanaan operasi militer, kecamatan-kecamatan dan desa-desa di Aceh juga diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kecamatan/desa putih, kecamatan/desa abu-abu dan kecamatan/desa hitam. Kecamatan putih ada sebanyak 227, kecamatan abu-abu 151 dan kecamatan hitam 76, sedangkan desa putih sebanyak 3, desa abu-abu 1.594 dan desa hitam 592. Pengelompokan wilayah kecamatan dan desa itu menunjukkan tingkat kerawannya, dari yang kerawanannya rendah (putih), sedang (abu-abu) dan tinggi (hitam). Apabila tingkat kerawanan ini diibaratkan dengan fungsi-fungsi pemerintahan dari kecamatan/desa, maka dapat diketahui betapa masih banyaknya kecamatan/desa yang tidak berfungsi karena kondisinya sebagai daerah konflik.

Kemudian, bencana tsunami sebagai faktor penyebab hilang dan/atau merosotnya fungsi dari lembaga pemerintahan dan pranata sosial, mungkin bisa tergambar dari banyaknya wilayah (kabupaten/kecamatan/desa), sarana/prasarana sosial yang rusak, juga banyaknya pegawai dan karyawan yang menjadi korban terkena bencana dahsyat itu. Di Aceh Besar, terdapat sekurang-kurangnya 7 dari 22 kecamatan yang terkena tsunami, yaitu Leupung, Masjid Raya, Peukan Bada, Lhoong, Lhoknga, Pulo Aceh dan Baitussalam. Dalam 7 kecamatan tersebut terdapat kurang lebih 100 desa yang tersapu oleh gelombang tsunami.

Di Kabupaten Aceh Besar pegawai (PNS dan pegawai honorer/bakti) yang menjadi korban tsunami berjumlah 1.192 orang, meninggal berjumlah 314 jiwa dan hilang 878 orang. Dengan korban sebanyak itu secara pasti membawa pengaruh terhadap merosotnya kinerja pemerintahan di Aceh Besar. Kemerosotan itu juga disebabkan oleh kantor yang rusak. Salah satu kecamatan yang terparah adalah Lhoknga. Di kecamatan ini jumlah korban yang meninggal mencapai 5.473 jiwa dan dinyatakan hilang 1.735 jiwa. Kerusakan yang terjadi akibat tsunami terdiri dari 2.579 unit rumah

penduduk, 270 unit ruko/toko, 24 unit sekolah, 4 masjid, 55 unit meunasah/mushallah, 332,3 km jalan yang rusak, 35 unit kantor, 2.155 ha sawah, dan lain-lain. Adanya kerusakan beberapa mesjid dan sejumlah meunasah/mushallah berdampak terhadap menurunnya peran pranata sosial di Kecamatan Lhoknga. Keadaan seperti ini juga dapat dijumpai di kecamatan-kecamatan lain yang terkena bencana gempa dan tsunami.

6. Tindakan Kolektif

6.1. Respon dan Reaksi Terhadap Peristiwa

Masyarakat Aceh, termasuk penduduk Aceh Besar, merupakan kelompok yang sangat peka, kritis dan reaktif terhadap berbagai peristiwa, seperti ketidakadilan, penindasan, penjajahan, konflik yang muncul dalam kehidupan mereka. Sifat responsif itu tidak muncul begitu saja sebagai suatu yang kebetulan, juga tidak bersifat insidental, tetapi nampaknya sudah ditanamkan sejak seorang Aceh masih pada usia kanak-kanak sehingga menjadi bagian dari karakternya bersama masyarakatnya ketika sudah menjadi orang dewasa. Dalam merespon tantangan yang dihadapi, apabila mereka menganggap diri berpijak pada kebenaran dan harga diri, tidak kurang dari mereka bersedia mati syahid. Dalam bukunya berjudul *Adat Atjeh* (1970:196), Moehammad Hoesin menulis sebagai berikut:

“Dalam daerahnja masing² Uleebalang² dari Keradjaan Atjeh Darussalam, begitu djuga Panglima² Sagoe dibenarkan untuk mengangkat Panglima² Perang guna kepentingan pertahanan Negeri, sementara pemuda²nja menjediakan dirinja untuk kepentingan Keradjaan dan Agamanja. Semangat sjahid hidup dalam dada mereka, karena mereka telah dididik sedjak ketjil oleh ibunja masing². Dalam peperangan mereka selalu berusaha untuk mendapat kemenangan, tetapi rela djuga mati sjahid untuk hidup selama-lamanya disisi Allah”.

Sikap kristis, responsif rakyat Aceh senantiasa tumbuh, berubah dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nyata, juga berlandaskan cara berfikir dan pandangan hidup (*weltanschauung*) ke-Aceh-an yang secara keseluruhan merupakan identitas sosial budaya dari masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat dimana budaya dan adat istiadat itu hidup dan berkembang. Dengan kata lain sikap responsif itu juga bersifat dinamis, tidak statis dalam keberadaannya. Sikap demikian itu dapat berubah sesuai dengan keadaan yang melingkupinya. “Kalau sikap responsif orang Aceh itu bersifat statis, tidak mungkinlah terjadi perundingan damai Helsinki antara pihak pemerintah Indonesia dan GAM yang, Alhamdulillah, telah mulai membuahakan hasil yakni berangsur-angsur pulihnya keamanan di Aceh baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan”, demikian seorang peserta FGD menjelaskan.

Selain ditanamkan sejak masih di ayunan (masa kanak-kanak) semangat responsif juga ditumbuhkan dari pengalaman hidup bermasyarakat dan bernegara yang nampaknya tidak pernah sepi dari tantangan, konflik, dan perang. Pengalaman sosial itu menyejarah (berdimensi historis) telah muncul sejak masa-masa kerajaan di Aceh. Dapat dikatakan bahwa masa kebangkitan Kerajaan Aceh Darussalam dimulai ketika Sultan Alaidin Ali Muhgaiyat Syah (916-936 H/1511-1530 M) menyerang dan melumpuhkan Portugis di beberapa kerajaan, antara lain Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Peureulak, Kerajaan Daya, Kerajaan Pedir, Kerajaan Beunua dan Kerajaan Aru di Sumatera Timur dan Malaka di Semenanjung Malaysia dan, kemudian, menyatukan semuanya ke dalam Kerajaan Aceh Darussalam.

Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam telah muncul dual hal yang menjadi dasar mengapa [Kerajaan] Aceh dan masyarakatnya sangat responsif terhadap berbagai masalah. *Pertama*, tanggapan terhadap keadaan kerajaan yang tidak terorganisir, kurang maju dan berkembang. Untuk ini, pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Suah II Abdul Qahhar (945-979 H/1539-1671 M) disusun

Undang Undang Dasar Negara dan diberi nama “*Kanuen Al Asyi*” yang berdasarkan syariah Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam () kanun tersebut disempurnakan dan diberi nama “*Kanuen Al-Asyi Meukuta Alam*”. Kitab UUD ini disusun oleh Sayyid Abdullah di Muelek yang selain dikenal sebagai seorang sastrawan, juga ulama, politisi dan negarawan. Berdasarkan kitab UUD itulah diperbaiki, disempurnakan dan direstrukturisasi berbagai dimensi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, antara lain bentuk negara (Kerajaan), nama kerajaan, sebutan kepala negara atau raja (*Sultan Imam Adil*), wakil kepala pemerintahan (*Kadi Mailkul Adil*), perdana menteri dan menteri-menteri (*Wazir*). Dalam struktur kerajaan, selain pemerintah pusat, di daerah-daerah terdapat kelembagaan yang langsung mengurus kepentingan masyarakat, seperti *gampong* (kampung/desa), *meukim* (federasi beberapa gampong), *nanggroe* (negeri atau kecamatan) dan *sagoe* (federasi beberapa negeri dalam kabupaten, seperti di Aceh Besar terdapat 3 (tiga) sagoe) yang masih bertahan sampai saat ini.

Kedua, respon atau tanggapan terhadap intervensi bangsa kolonial (Portugis dan Belanda) yang ingin menaklukkan Kerajaan Aceh dan merusak tatanan sosial masyarakatnya. Dalam menghadapi masalah ini, dalam masa Kerajaan Aceh Darussalam muncul perlawanan rakyat yang gigih dan berani, meskipun dalam waktu dan di tempat tertentu ada *uleebalang* (pemimpin lokal) tertentu yang membelot dan berhianat. Secara menyeluruh semangat juang untuk membela negara (kerajaan) didorong oleh keyakinan rakyat Aceh yang sangat kuat terhadap ajaran Islam sebagai pedoman menjalani segala aspek hidup dan kehidupan. Keyakinan ini dipertentangkan dengan kepercayaan bangsa-bangsa asing itu yang non-Islam dan perang melawan mereka adalah “Perang Sabil” (Perang di Jalan Allah). Itulah sebabnya, ketika dalam masa itu dimunculkan sebuah karya tulis yang disebut “Hikayat Perang Sabil” oleh Teungku Muhammad Pante Kulu atau yang lebih terkenal dengan nama “Teungku Chik Pente Kulu” semakin menambah-nambah semangat rakyat Aceh dalam menentang agresi bangsa kolonial, terutama

Belanda. Hikayat Perang Sabil buah tangannya, diserahkan oleh Teungku Chik Pante Kulu kepada Teungku Chik di Tiro sebagai Panglima Perang Angkatan Sabil. Strategi perang rakyat Aceh ini membuat Belanda tidak pernah dapat menguasai Aceh sepenuhnya sampai Jepang masuk di Aceh dan di daerah-daerah Indonesia lainnya Sepenggal contoh isi Hikayat Perang Sabil, sebagai berikut (A. Hasyimi, 1977: 57-58).

*Kendati beracun rencong dan pedang,
Hikayat Perang Sabil lebih berbisa,
Belanda takut lutut bergoyang,
Kissah dilarang menyimpan-membaca.*

*Di zaman Belanda hokayat dilarang,
Siapa menyimpan hukuman berganda,
Karena kandungan merangsang perang,
Mengobar semangat melawan Belanda.*

*Demikian kissah mengandung racun,
Mematikan kafir Belanda celaka,
Penyimpan dihukum tiada ampun,
Hikayat dirampas pembaca disiksa.*

*Kaki tangan Belanda berkeliaran,
Siang malam sibuk mencari,
Demi diketahui siapa penyimpan,
Kepada Belanda laporan diberi.*

*Sesaat ketika serdadupun datang,
Hikayat disita, pemilik digari,
Kepada Belanda dipersembahkan,
Penyimpandigiring ke dalam tangsi.*

*Demikian hikayat merangsang perang,
Membangkitkan semangat pendengar berita,
Di mana jumpa Belanda di cencang,
Hilang melayang cinta dunia.*

Kesadaran rakyat Aceh tetap sampai saat ini bahwa segala jenis perang, perlawanan, pemberontakan, pasti ada resikonya. Seorang peserta FGD, menyatakan, bahkan tidak hanya terhadap masalah perang yang memang menantang bahaya, berani hidup pun pasti ada resikonya. Artinya kita hidup memerlukan pengorbanan dan, oleh karena itu, kita harus selalu mengharapkan ridho Allah, tidak berputus asa ketika diberikan cobaan. Janganlah kita mengatakan iman kuat tetapi ketika ada cobaan sudah goyah. Jangankan karena Tsunami, anak kita saja sakit seringkali kita sudah tidak bisa menguasai diri. Tsunami adalah cobaan, ujian, dari Allah kepada hamba-hambaNya.

Tetapi mengapa bagi orang Aceh, beberapa bulan setelah Tsunami, sudah seolah-olah tidak terjadi apa-apa walaupun korban sangat banyak ditelan bencana yang sangat dahsyat itu, semuanya disebabkan oleh keyakinan kepada Allah bahwa gempa dan tsunami itu adalah ujian. Emas saja kalau tidak diuji, tidak diketahui apa itu emas palsu atau murni. Jadi semua ada hikmahnya.

6.2. Keterasingan dan Keikutsertaan Gerakan Massa

Keterasingan dari lingkungan dan kehidupan sosial budaya yang normal, yaitu kondisi yang semestinya sesuai dengan kodrat kelahiran dan perkembangan seseorang, memang merupakan suatu masalah yang tidak hanya membingungkan tetapi juga menyakitkan. Merasa asing pada lingkungan dan kehidupan dimana seseorang mengalami masa kanak-kanak, terus remaja, kemudian menjadi dewasa, menjadikan orang tersebut pada posisi “mempertanyakan, memprotes” terhadap apa yang dialaminya. Dalam keadaan seperti ini, seringkali lebih sulit melakukan introspeksi diri dibandingkan dengan menyalahkan orang lain. Sebagai warga masyarakat dan suatu negara, sasaran protesnya bukan kepada lingkungan sosialnya tetapi kepada siapa yang mengendalikan negara, yaitu pemerintahnya.

Kondisi seperti inilah yang dialami rakyat Aceh selama bertahun-tahun setelah Indonesia merdeka, dimana kemerdekaan itu,

secara politis, dianggap bukan sesuatu yang membebaskan, menguntungkan, tetapi menyebabkan mereka merasa “terjebak” dalam suatu konstruksi kenegaraan yang “asing”. Mungkin untuk sebagian besar rakyat Aceh keadaan demikian itu adalah suatu konsekuensi, resiko, menjadi bagian dari suatu negara, tetapi bagi yang lainnya, dalam jumlah yang lebih kecil tetapi bersuara sangat lantang, adalah suatu bentuk pelecehan terhadap kondisi sosial budaya Aceh. Juga hal itu ditengarai sebagai bentuk ketidak-konsistenan negara terhadap pluralitas masyarakat Indonesia.

Mengapa Aceh bergolak di masa lalu?. Masalahnya bukan hanya terletak pada kedudukan Aceh yang merasa dirugikan dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia, tetapi juga merasa terasing dengan sistem politik pemerintahan nasional. Selain itu masyarakat Aceh juga merasa ada upaya-upaya negara sengaja mengasingkan mereka dari sistem-sistem ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya ke-Aceh-an masa silam yang sudah mapan, sudah teruji dapat menyebarkan rasa keadilan, berpotensi mensejahterakan, yang mereka hormati, banggakan dan warisi secara turun-temurun. Namun demikian, keterasingan itu tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga bisa bersumber dari faktor internal. Dalam kasus Aceh, penyebab keterasingan internal yang mencolok adalah tarik-menarik antara keinginan untuk menyesuaikan diri dengan paradigma perubahan, misalnya sistem politik demokrasi (kerajaan) yang diangankan oleh petinggi GAM, dengan sistem politik Islam dalam negara republik yang diinginkan oleh DI/TII Teungku Daud Beureueh.

Munculnya gerakan perlawanan dari sebagian orang Aceh terhadap republik pada masa lalu tampaknya memang tidak terlepas dari masalah-masalah yang diuraikan di atas. Hanya saja, postulat ideologis ala GAM maupun DI/TII tersebut adalah merupakan “titik api” perlawanan, tetapi pemantik penyebarannya adalah masalah ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang tidak menunjang bagi kehidupan. Banyak dari anggota perlawanan yang bergabung ke gerakan DI/TII dan GAM, sebenarnya juga pada gerakan massa

dalam rapat Referendum yang dipelopori oleh mahasiswa Aceh pada masa lalu, adalah mereka yang tidak mendapat akses dan eksis secara layak dalam bidang ekonomi dan mereka yang merasa bahwa Aceh diperlakukan tidak adil.

6.3. Pembangunan dan Perubahan Sosial

Gempa dan tsunami adalah tonggak penanda antara Aceh masa lalu dan Aceh pada masa-masa yang akan datang. Momentum ini harus diperlakukan demikian agar masa kelam Aceh di masa lalu tidak lagi terulang, sesuatu yang baik di masa lalu harus ditingkatkan kualitasnya, pada saat sekarang inilah kesempatan merancang, mempersiapkan Aceh yang lebih baik di masa depan. Prinsip demikian tampaknya menjadi intisari yang berhubungan dengan sub topik diskusi pembangunan dan perubahan sosial.

Beberapa masalah pembangunan yang muncul dalam diskusi terfokus antara lain, menyoroti fungsi camat yang pada masa lalu adalah kepala wilayah kecamatan. Dengan posisi itu seorang camat mempunyai keleluasaan dan otoritas yang lebih jelas dalam menjalankan tugas pelayanannya, memiliki peluang yang lebih besar untuk merencanakan apa-apa yang terbaik untuk wilayah kecamatan dan masyarakatnya. Setelah adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Perpu No 3 Tahun 2005 Perubahan Atas UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka posisi camat adalah hanya sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan yang dilimpahkan sebagian dari wewenang bupati atau walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Dengan adanya UU tersebut perangkat pemerintahan kecamatan sering meninggalkan kantor lebih cepat, pulang jam 14,00, akibatnya urusan rakyat tidak terjangkau.

Kemudian, mengenai budget. Dahulu ada pos anggaran camat dengan nomor kode 007, sebelum diganti dengan rekening. *Budget* tersebut diperuntukkan untuk macam-macam kegiatan yang dirancang

sendiri oleh camat, termasuk aktivitas yang harus dilakukan secara mendadak (segera) karena kepentingan yang mendesak. Dari kebiasaan lama beralih kepada ketentuan baru sesuai amanat UU No. 32, dimana anggaran camat juga bagian dari anggaran bupati/walikota menjadikan camat pelit, kadang-kadang suguhan minum saja pada suatu pertemuan tidak ada. Sementara itu tanggungjawabnya tidak berkurang.

Mengenai masalah ekonomi yang lebih makro (nasional), khususnya menyangkut persoalan kenaikan harga BBM, entah karena bodoh atau karena lebih pandai membaca politik, orang Aceh tidak bereaksi sama sekali. Mengapa demikian, karena orang Aceh sangat mengerti bahwa di belakang (sponsor) para demonstran sesungguhnya adalah para penyelundup BBM pada masa lalu. Oleh karena itu orang Aceh tidak mau ikut-ikutan demo BBM. Sesuatu yang jelas bantuan dari subsidi BBM sudah terlaksana, sebagian rakyat miskin yang berhak sudah menikmati, hanya saja belum semuanya. Berbeda dengan BBM, pemerintah masih enggan membeli gabah rakyat dengan harga yang agak tinggi. Kecendrungan melakukan impor beras karena masih ada cukong dan/atau konglomerat yang bermain. Sebenarnya yang membuat ekonomi Indonesia terpuruk adalah konglomerat yang kegiatannya mengeksploitasi hutan, termasuk hutan di Aceh. Selain sudah melakukan eksploitasi, untuk HTI (Hutan Tanaman Industri), misalnya, budgetnya semestinya sudah cukup kalau Rp.20 trilyun, malah di-mark-up-nya menjadi Rp.40 trilyum dengan berbagai cara, alasan dan kerjasama yang tidak jelas, tetapi sangat jelas merugikan negara.

Dalam rangka peningkatan ekonomi dan menumbuhkan rasa keadilan bagi rakyat, maka diharapkan dimana ada SDA (Sumber Daya Alam) di situ didirikan pabrik. Kebijakan Menteri-menteri di bidang ekonomi sudah waktunya harus berorientasi ke kepentingan daerah-daerah jangan ke “pusat ekonomi” saja. Dalam soal telur saja. Aceh tidak bisa menjadi salah satu daerah produksi, masalahnya kemudahan untuk itu hanya diberikan atau ditumpuk ke Sumatera

Utara. Jadi yang perlu adanya kebijakan politik ekonomi lintas batas daerah kerja.

Menyangkut masalah pembangunan di Aceh saat ini, lebih setahun setelah gempa dan Tsunami masih tampak peranan pihak asing yang sangat besar. Di berbagai wilayah di Aceh Besar, terutama di wilayah-wilayah kecamatan yang terkena langsung Tsunami, pembangunan bermacam sektor dilakukan. Sebagai contoh, di Pulo Aceh dan Peukan Bada, Palang Merah Inggeris (BRCS) melalui Program Rehabilitasi dan Konstruksi selama ini telah memberikan modal usaha (program cash grant) untuk ribuan korban (KK). Untuk pemberdayaan ekonomi rakyat di Aceh Besar, sampai bulan Maret 2006, telah menjangkau sebanyak 4.900 KK dengan total bantuan 800.000 dolar Amerika.

Pada saat ini, program pembangunan dengan bantuan pihak asing tidak lagi hanya berorientasi semata-mata kepada wilayah, sarana dan prasarana yang rusak dan kelompok masyarakat korban gempa dan tsunami, tetapi juga terhadap wilayah dan masyarakat Aceh pada umumnya. Sebagai contoh, pihak Unicef, dengan hibah murni, membantu peningkatan suplai air bersih kepada masyarakat melalui dukungan perbaikan instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Montala, di Aceh Besar. Untuk ini Unicef mengalokasikan dana 1,8 juta dolarAS atau berkisar Rp.17 milyar. Mengapa masalah air menjadi perhatian, menurut pihak Unicef karena masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam menjadikan air bersih sebagai salah satu hal terpenting dalam kehidupan mereka. Umat muslim menggunakan air lima kali sehari untuk berwudhu sebelum mendirikan shalat. Alasan dibalik bantuan tersebut cukup sederhana saja, namun mempunyai akar yang kokoh dan tertanam dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh.

Forum diskusi terfokus berpendapat bahwa dengan adanya bantuan asing secara besar-besaran di Aceh pasca tsunami memang telah membangkitkan gairah kehidupan sosial budaya sebagian rakyat dan bergulirnya roda perekonomian Aceh secara bertahap. Bahkan

untuk orang atau kelompok tertentu adanya bantuan asing merupakan suatu keajaiban yang merubah kehidupannya yang tadinya biasa-biasa saja menjadi seperti OKB (Orang Kaya Baru). Sesuatu yang perlu disikapi segera ialah jangan sampai bantuan-bantuan tersebut menyebabkan masyarakat Aceh tidak kreatif, menjadi malas, karena terbiasa hanya menunggu bantuan. Bantuan-bantuan yang selama setahun terakhir diterima para korban pengungsi juga menghasilkan paradoks kehidupan antara pengungsi yang masih menghuni tenda-tenda darurat dengan mereka yang mampu mengambil keuntungan. Artinya, muncul pula gejala ketimpangan pendapatan di antara beberapa kelompok dalam masyarakat. Keadaan seperti ini harus diantisipasi dampak sosialnya sedini mungkin oleh pemerintah. Selain itu, peran pemerintah dan swasta nasional harus pula disiapkan untuk menggantikan posisi pihak-pihak asing apabila sampai waktunya mereka harus kembali ke negaranya.

7. Penutup

Menutup seluruh uraian dan pembahasan tentang SEWS (*Social Early Warning System*) berdasarkan hasil diskusi terfokus, wawancara mendalam dan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah bagi atau dipermasalahkan oleh masyarakat Aceh Besar, dapat dikemukakan hal-kal sebagai berikut:

- (1) Gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 harus menjadi momentum bagi perubahan Aceh dan masyarakatnya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bencana itu harus menjadi pembeda antara Aceh masa lalu dan Aceh di masa yang akan datang.
- (2) Di Aceh, jumlah korban tewas/hilang akibat gempa dan tsunami (data Posko Direktorat BSKBA Departemen Sosial RI per 18 Februari 2005) berjumlah 166.344 orang dan masih menyisakan pengungsi sebanyak 442.864 orang. Korban terbanyak adalah mereka yang berdiam di wilayah kabupaten pantai barat dan utara dataran Provinsi NAD karena minimnya pengetahuan dan pengalaman tentang dan menghadapi bencana tsunami. Mereka

tidak memiliki sikap antisipatif terhadap tsunami seperti dimiliki oleh penduduk Pulau Simeleue.

- (3) Gempa dan tsunami hanyalah faktor anomie yang terbaru dalam sejarah kehidupan masyarakat Aceh. Faktor anomie sebelumnya dapat dikatakan dikuasai oleh masalah konflik yang beruntun sejak dari masa kerajaan, masa awal kemerdekaan RI, masa pemerintahan Orde Baru sampai masa reformasi saat ini.
- (4) Masalah deprivasi yang sesungguhnya sangat dirasakan oleh rakyat Aceh masih berkaitan dengan konflik, yaitu selama bertahun-tahun kehilangan rasa aman. Apabila konflik dianggap cobaan dan peringatan (ujian) maka bencana gempa dan tsunami adalah cobaan, ujian dan bencana.
- (5) Secara kolektif masyarakat Aceh sangat aktif dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi (seperti konflik dan bencana). Respon terhadap konflik selain disebabkan oleh pengalaman selama bertahun-tahun, juga mereka mewarisi semangat perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan dari generasi ke generasi. Respon terhadap bencana yang biasanya disikapi secara “pasrah” dan “wajar” saja karena kedalaman paham mereka terhadap ajaran agama (Islam) bahwa segala sesuatunya adalah dari dan kembali kepada Tuhan YMK.

BAB III

SISTEM PERINGATAN DINI SOSIAL DI KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

1. Pendahuluan

Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukota Tapaktuan, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang terletak di pantai Barat-Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Singkil
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Pada tahun 2000, Kabupaten Aceh Selatan dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten induk, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Saat ini secara administrative, Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 16 Kecamatan, 43 Pemukiman dan 247 Desa/Kelurahan.

Keberadaan Kabupaten Aceh Selatan tidak lepas dari legenda yang diketahui oleh sebagian besar penduduknya, yaitu legenda tentang Tuan Tapa dan Putri Naga. Sebuah kisah Tuan Tapa yang dipercaya sebagai seorang Auliya yang pernah hidup di daerah tersebut dan perkelahiannya dengan sepasang Naga yang berasal dari Negeri Cina. Beberapa tempat di Kabupaten Aceh selatan antara lain seperti Wilayah Batu Hitam (berasal dari hati naga), Wilayah Batu Merah (daerah yang terkena ceceran darah naga), Air Dingin (tempat putri naga mandi), dan beberapa tempat lainnya, dikaitkan dengan kisah dalam legenda ini. Bahkan nama Tapaktuan juga berasal dari adanya legenda ini.

Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan tidak menjadi korban dan tidak terkena peristiwa tragis Tsunami, tetapi pada umumnya daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan merasakan kepahitan dan kesulitan yang cukup berat pada masa-masa konflik. Banyak sekali kisah memilukan yang terjadi apada masa konflik. Seorang informan menyatakan, bila ingin mendengarkan seluruh kisah sedih itu, tidak cukup dengan waktu semalam suntuk. Lagipula nampaknya mereka sangat berhati-hati dalam mengutarakan berbagai kisah pahit tersebut. Tercermin dari ucapan mereka "*kami tidak mau bercerita apa adanya jika tidak ada jaminan dari Bapak, bahwa kami tidak akan mendapat masalah*". Pada masa konflik, banyak hal antara lain suasana konflik, kontak senjata, saling curiga, terutama kepada orang luar yang tidak dikenal. Kisah-kisah yang berlatar belakang salah sangka, pengungsian, dan siskamling banyak mendatangkan derita bagi masyarakat Aceh Selatan, terutama kelompok masyarakat biasa. Mereka seakan berada terjepit ditengah-tengah antara Gam dan TNI Polri. Salah sedikit saja terhadap salah satu pihak, bisa mengundang bencana yang mungkin mengarah pada kerugian harta atau bahkan jiwa. Kadang tidak bersalahpun, jika badan sedang naas, bencana bisa saja datang. Salah satu contoh misalnya, jika nama seorang warga biasa kebetulan sama dengan nama salah seorang anggota Gam, warga biasa tersebut memperoleh kesulitan karenanya. Artinya, pada masa-masa itu, secara umum dapat dikatakan tidak ada ketenangan dan ketenteraman di kalangan masyarakat biasa, apalagi kesejahteraan. Bagaimana tidak? Mereka yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, tidak berani mengolah tanahnya atau memanen hasil kebunnya yang berada di bukit-bukit. Karena bila melakukan hal itu, jikalau tidak diganggu oleh kelompok Gam, mereka bisa dicurigai sebagai anggota Gam oleh kelompok TNI Polri. Diganggu kelompok Gam atau dicurigai sebagai anggota Gam oleh kalangan TNI Polri, sama-sama mengundang masalah bagi mereka. Sementara aktivitas pertanian sulit dilakukan, pekerjaan lain juga sulit diperoleh. Akhirnya mereka terbiasa dengan pasrah menjalani keadaan pahit itu.

Fenomena beratnya kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada masa konflik, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, antara lain dapat dilihat dari gambaran laju pertumbuhan PDRB antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Laju pertumbuhan Sektor pertanian, sejak tahun 1998 sampai tahun 2001, tidak pernah mencapai angka 2%. Pada tahun 1998, dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sector pertanian Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan negative hingga mencapai sebesar -1,45%. Pada tahun 1999, walaupun pada saat itu sedang terjadi kenaikan harga beberapa jenis komoditi seperti nilam dan pala, pertumbuhan PDRB sector pertanian beranjak naik, tetapi juga dalam range yang tidak begitu besar, hanya mencapai angka sebesar 0,92%. Keadaan kenaikan ini malahan menurun lagi pada tahun 2000 dengan angka yang cukup signifikan menjadi 0,18%. Selama periode ini, laju pertumbuhan tertinggi dialami pada tahun 2001, walaupun juga dengan angka yang tidak mencapai 2%, hanya 1,78% saja.

Sektor lain yang juga bisa dianggap sebagai gambaran aktivitas masyarakat umum adalah sector perdagangan, hotel dan restoran, sector bangunan dan konstruksi, sector industri pengolahan serta sector jasa-jasa. Pada ketiga sector ini, gambaran laju pertumbuhan juga tidak menggembirakan. Memberikan gambaran sulitnya kehidupan masyarakat pada masa-masa konflik. Pada sector Perdagangan, Hotel dan Restoran, selama periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 bahkan tidak pernah terjadi laju pertumbuhan yang mencapai 1,5%. Pada tahun 1998 ketika krisis melanda Indonesia, pertumbuhan sector ini mencapai angka negatif sebesar -4,83% yang menggambarkan keterpurukan kehidupan masyarakat yang cukup dalam. Pada tahun 1999, walaupun tidak mengalami pertumbuhan negative, laju pertumbuhannya hanya mencapai 0,54%, Keadaan ini kembali merosot pada tahun 2000 menjadi 0,28%. Sedangkan pada tahun 2001, yang dianggap sebagai keadaan terbaik pada periode inipun laju pertumbuhan sector ini hanya mencapai 1,15%. Kondisi PDRB sector Perdagangan, Hotel dan Restoran

Kabupaten Aceh selatan ini, bila dikaitkan dengan potensi keindahan alam dan banyaknya obyek wisata sejarah yang terdapat disana dapat dianggap[cukup memprihatinkan. Apalagi jika dikaitkan dengan letak sebagai lintasan jalan dari Kota Medan menuju Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Singkil, sangat mungkin bagi Kabupaten Aceh Selatan untuk memompa naik sector ini dan mencapai angka pertumbuhan yang relative tinggi.

Sektor Bangunan/Konstruksi juga memperlihatkan laju pertumbuhan yang dapat dikatakan relative rendah. Pada tahun 1998, sector ini mangalami keterpurukan yang cukup dalam, merosot hingga mencapai angka -21,12%. Kemudian pada tahun 1999, walaupun agak membaik, tetapi belum bisa beranjak ke angka positif, masih memiliki laju pertumbuhan negative sebesar -5,35%. Pada tahun 2000, walaupun sudah lepas dari pertumbuhan negative, namun baru hanya bisa mencapai angka yang rendah sebesar 1,08%, yang kemudian pada tahun 2001 angka pertumbuhan ini turun lagi menjadi hanya sebesar 0,86%.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Aceh Selatan ternyata menunjukkan angka perkembangan yang paling memprihatinkan. Jika sector-sector lain pada tahun 2001 sudah menunjukkan angka pertumbuhan positif (meskipun relative rendah), laju pertumbuhan sector ini malahan menunjukkan angka yang makin terpuruk. Bermula pada tahun 1998 yang menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 5,46%, pada tahun 1999 merosot sangat signifikan menjadi -0.80%, kemudian mengalami perbaikan sedikit pada tahun 2000 menjadi 0,18, dan pada tahun 2001, jatuh lagi kedalam angka negative sebesar -2,24%

Keadaan tidak jauh berbeda juga diperlihatkan pada sector Jasa-jasa. Walaupun tidak pernah menginjak angka pertumbuhan negative, laju pertumbuhan sector ini dari tahun ke tahun menunjukkan stagnansi. Pada tahun 1998 menunjukkan angka 1,73% yang pada tahun 1999 turun menjadi 0,14%, dan kemudian pada

tahun 2000 turun lagi menjadi 0,04%. Baru kemudia pada tahun 2001 mulai menggeliat naik menjadi sebesar 1,66%.

Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 secara makro menunjukkan laju pertumbuhan umumnya relative rendah. Pada tahun 1998 malahan menunjukkan pertumbuhan negative sebesar -4,52%. Pada tahun 1999 beranjak naik ke angka positif sebesar 1,67%, yang kemudian naik menjadi 1,82% pada tahun 2000 dan naik lagi menjadi sebesar 1,94% pada tahun 2001. Dapat dilihat disini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan belum pernah bisa mencapai angka 2%. Dari tahun ke tahun, sector yang menunjukkan angka mencolok adalah sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Walaupun sector ini pada tahun 1998 terpuruk sangat dalam mencapai angka negative sebesar -79,49%, pada tahun 1999, melompat sangat tinggi menjadi 217,41%, Kemudian lain lagi dengan angka cukup tinggi pada tahun 2000 menjadi sebesar 86,57%, dan tetap naik dengan angka sebesar 19,34%. Dengan melihat gambaran pertumbuhan sector-sector ini, dapat diduga bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Selatan masih sangat mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat.

Sampai dengan tahun 2006, walaupun pertumbuhan ekonomi relatif lebih baik, tetapi sector penting yang menggambarkan kehidupan rakyat banyak, masih juga belum menggembirakan. Sektor Pertanian yang pada tahun 2003 dan 2004 menunjukkan angka kenaikan lebih dari 4%, pada tahun 2005 kembali turun hanya mencapai 2% lebih. Bahkan pada tahun 2006, hanya menunjukkan kenaikan 0,62% saja. Sektor industri pengolahan menunjukkan angka cukup menggembirakan dengan trend yang dari tahun ke tahun cenderung naik. Sehingga pada tahun 2006 mencatat kenaikan sebesar 7%. Demikian juga halnya dengan sector perdagangan, hotel dan restoran yang menunjukkan kecenderungan terus naik sehingga pada tahun 2006 mencatat kenaikan sebesar 5,69%. Secara lebih jelas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16 : Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2002-2006

Lapangan Usaha	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
Pertanian	2,45	4,38	4,29	2,38	0,62
Pertambangan dan Penggalian	2,84	4,05	3,92	6,45	7,13
Industri Pengolahan	3,15	3,13	4,67	5,08	7,01
Listrik dan Air Minum	0,96	4,90	4,56	1,42	1,34
Bangunan	1,62	3,43	4,00	5,13	6,75
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,46	5,51	4,55	5,79	5,69
Pengangkutan dan Komunikasi	7,34	8,62	7,30	10,76	6,04
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,16	2,20	6,85	20,10	-3,58
Jasa-jasa	0,07	1,04	2,55	2,12	1,59
Produk Domestik Regional Bruto	2,28	3,96	4,19	4,06	2,96

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Selatan, Kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, Agustus 2007.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Setelah 2 (dua) tahun menjalani masa perdamaian di Kabupaten Aceh Selatan, diakui oleh masyarakat bahwa secara umum keamanan sudah membaik. Roda kehidupan masyarakat sudah berjalan kembali. Aktivitas pertanian, perkebunan dan penangkapan ikan juga sudah makin berkembang kembali walaupun masih belum maksimal. Ketenangan dan ketenteraman masyarakat meningkat secara sangat signifikan, walaupun masih ada beberapa masalah keamanan seperti misalnya beberapa peristiwa kriminalitas perondongan atau perampokan yang terjadi di beberapa tempat yang sunyi dan rawan, gangguan mengamuknya beberapa ekor harimau yang masuk kampung di Kecamatan Labuan Haji Timur dan Kecamatan Meukek yang menelan korban 6 (enam) orang meninggal. Pada saat penelitian dilakukan, telah tertangkap 2 (dua) ekor harimau dan disinyalir masih ada 2(dua) ekor harimau lagi yang masih

berkeliraran. Di Kecamatan Trumon juga ada gajah yang masuk kampong dan mengamuk, tetapi kemudian masalah ini bisa selesai, gajah bisa dihalau masuk hutan kembali. Masalah-masalah keamanan ini menyebabkan petani yang ingin berkebun¹, tetap masih harus berhati-hati ketika mengolah kebunnya yang berada di bukit-bukit dan tepi hutan.

Di samping persoalan keamanan yang belum benar-benar tuntas, di kalangan masyarakat petani pala², muncul persoalan yang sangat menghantui mereka. Terdapat semacam hama penggerek yang tengah menyerang tanaman pala masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Menurut informan aparat pemerintah daerah Kabupaten, kira-kira sudah sekitar 90% dari tanaman pala di Kabupaten Aceh Selatan sudah terserang hama tersebut. Konon, untuk membasmi hama pala tersebut, seluruh tanaman pala yang terdapat di Aceh Selatan harus dibakar, karena jika tidak, walaupun ditanam kembali benih pala yang baru, tetap masih akan terkena hama yang belum musnah jika tidak dibakar. Solusi memberantas hama pala ini mendatangkan kekhawatiran di kalangan petani pala, karena dengan solusi demikian, maka kehilangan sumber penghasilan utama. Informasi lebih lanjut yang diperoleh peneliti, ternyata menurut penelitian pihak aparat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perkebunan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, hama penggerek ternyata bukan satu-satunya hama tanaman pala yang menyerang tanaman pala di Kabupaten Aceh Selatan. Teridentifikasi jenis hama lain yang disebut kanker akar yang telah menyerang tanaman pala di Aceh Selatan. Menurut informan tersebut, diduga hama kanker akarlah yang menyebabkan kematian tanaman pala, sedangkan hama penggerek hanya menghabiskan

¹ Kebun mereka umumnya terdiri dari 2(dua) macam. Kebun yang terdapat di pekarangan rumah, yang luasnya relative kecil dan kebun yang pada umumnya cukup luas, berada agak jauh dari rumah, di bukit-bukit dan tepi hutan.

² Pala merupakan hasil perkebunan utama bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Daging pala diolah untuk dijadikan makanan, sedangkan bijinya menjadi bahan rempah yang dijual di Kota Medan.

batang dari tanaman yang telah mati setelah terkena hama jenis kanker akar. Penelitian UPT Dinas Perkebunan Provinsi NAD tentang hama tanaman pala ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Penelitian ini masih pada tahap awal, rencananya akan melibatkan para ahli hama tanaman untuk menyelidikinya lebih lanjut.

Di kalangan masyarakat nelayan, juga bukan tidak ada persoalan. Alat penangkapan ikan mereka yang umumnya masih relative sederhana, walaupun sudah memperoleh bantuan dari pemerintah berupa alat penangkapan ikan yang relative lebih baik, tetap saja masih mengalami kesulitan ketika melakukan penangkapan ikan di laut. Karena dalam menangkap ikan, mereka berhadapan dan bersaing dengan para nelayan yang berasal dari daerah lain misalnya Sibolga, yang telah memiliki alat penangkap ikan yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan alat penangkapan ikan yang dimiliki nelayan Kabupaten Aceh Selatan. Kekalahan mereka bersaing dalam beralatan, menyebabkan mereka hanya dapat menangkap ikan sisa-sisa dari tangkapan nelayan yang berasal dari Sibolga. Belum lagi ketika bersaing dengan kapal nelayan asing seperti Thailand yang kadang juga masuk ke daerah penangkapan ikan mereka.

Kendati terdapat berbagai masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat petani dan nelayan, kehidupan dan mata pencaharian mereka ternyata lebih jelas dibanding dengan kelompok masyarakat lain yang jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka adalah yang bukan pegawai negeri, bukan nelayan dan tidak juga memiliki lahan untuk bertani, ditambah dengan sulit memperoleh pekerjaan di luar sector pertanian dan perikanan. Pada waktu setelah terjadinya peristiwa Gempa dan Tsunami, sebagian dari mereka dengan terpaksa pergi ke Kabupaten lain yang terkena musibah gempa dan Tsunami dan kini sedang giat melaksanakan pembangunan perumahan dan infrastruktur

lainnya, mereka mencari kerja sebagai tenaga kenek³ bangunan dengan upah sebesar Rp 35.000,- per hari. Jika memiliki keterampilan sebagai Tukang, mereka memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- sehari. Tetapi pada akhir-akhir ini, setelah mengadakan kalkulasi antara upah yang diterima dengan biaya hidup di tempat kerja dan transportasi pulang ke kampung, ternyata hanya impas saja, tidak menghasilkan apa-apa untuk dibawa ke rumah. Bila dibandingkan lagi dengan risiko harus meninggalkan rumah tangga mereka, dianggap sebagai keadaan yang rugi. Oleh sebab itu, maka kini semakin jarang warga yang pergi bekerja menjadi kenek tersebut.

Dalam pandangan sebagian informan, di samping sebagian besar warga masyarakat yang pada umumnya masih bergulat dengan persoalan ekonomi, ada juga kelompok anggota masyarakat yang banyak mendapat fasilitas dan kemudahan ekonomi dengan adanya perdamaian Helsinki. Dikaitkan dengan peristiwa perdamaian dan konflik, mereka mengelompokkan masyarakat menjadi paling sedikit 6 (enam) kelompok antara lain :

- (1) Kelompok Aparat Pemerintah termasuk Anggota DPRK
- (2) Kelompok GAM elite yang turun gunung setelah perdamaian
- (3) Kelompok GAM prajurit yang turun gunung setelah perdamaian
- (4) Kelompok GAM yang turun gunung sebelum perdamaian
- (5) Kelompok masyarakat biasa bukan korban konflik
- (6) Kelompok masyarakat biasa korban konflik

Kelompok 1 dan 2 pada kategorisasi di atas dianggap yang paling mencolok menikmati hasil perdamaian Helsinki. Kemudahan dalam berusaha dan peningkatan kesejahteraan terlihat jelas pada kelompok-kelompok ini. Sedangkan kelompok ketiga, meskipun tidak memperoleh kemudahan seperti yang diperoleh kelompok 1 dan 2, masih memperoleh perhatian dari pemerintah dalam bentuk bantuan-bantuan yang ditujukan kepada mereka.

³ Tenaga bangunan yang dianggap tidak memiliki keterampilan pertukangan, yang pekerjaannya membantu Tukang yang dianggap memiliki keterampilan pertukangan.

Persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah kurangnya perhatian terhadap kelompok-kelompok masyarakat lain, selain ketiga kelompok yang telah disebutkan di atas, terutama para anggota masyarakat korban konflik. Pada tahun lalu (2006), pernah ada pengumuman dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat untuk mengajukan proposal mengenai bantuan dari pemerintah daerah yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat. Tetapi setelah beramai-ramai dan agak tergesa-gesa warga menyusun proposal, yang kemudian diajukan kepada pemerintah daerah, ternyata sampai saat penelitian dilakukan tidak ada kabar beritanya lagi. Tidak juga ada penjelasan sampai dimana nasib proposal tersebut, apakah diproses atau tidak, akan dikabulkan atau tidak, dan apa yang menjadi masalahnya. Jika proposal tidak memenuhi syarat, syarat apa yang tidak dipenuhi? Kesenjangan komunikasi ini mendatangkan berbagai syak wasangka warga masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan menjadi salah satu aspek yang menyebabkan menipisnya kepercayaan warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam bidang kehidupan politik, komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan hasil pemilu tahun 2004 menunjukkan penyebaran yang cukup luas. Jumlah anggota DPRK yang sebanyak 25 (dua puluh lima) tersebar dalam 10 partai politik. Dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional yang berhasil paling banyak memperoleh kursi, masing-masing sebanyak 5 (lima) orang. Komposisi tersebut menggambarkan tidak adanya dominasi salah satu partai di dalam DPRK Aceh Selatan. Persebaran keanggotaan DPRK Aceh Selatan menurut Partai Politik terdiri dari :

- | | |
|--|---------|
| (1) Partai Persatuan Pembangunan sebanyak | 5 orang |
| (2) Partai Demokrat sebanyak | 1 orang |
| (3) Partai Amanat Nasional sebanyak | 5 orang |
| (4) Partai Pelopor sebanyak | 1 orang |
| (5) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak | 3 orang |
| (6) Partai Golongan Karya sebanyak | 3 orang |

- | | | |
|------|--|---------|
| (7) | Partai Bulan Bintang sebanyak | 3 orang |
| (8) | Partai Karya Peduli Bangsa sebanyak | 1 orang |
| (9) | Partai Bintang Reformasi sebanyak | 2 orang |
| (10) | Partai Perhimpunan Indonesia Baru sebanyak | 1 orang |

Pada tanggal 25 November 2007 yang baru lalu, di Kabupaten Aceh Selatan telah diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh rakyat. Berbagai persiapan menjelang Pilkada sudah dilakukan antara lain pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, seleksi pasangan calon Bupati dan berbagai persiapan lainnya. Untuk mengantisipasi masalah keamanan, dilakukan juga penambahan jumlah aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan, terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri. Terhadap seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri dilakukan seleksi. Seleksi tersebut terdiri dari persyaratan administrative antara lain seperti syarat dukungan pencalonan, dan seleksi kemampuan pasangan calon antara lain membaca Al Qur'an.

Setelah melalui seleksi, dari 22 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang berhasil lolos dan ditetapkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebanyak 13 (tiga belas) pasangan calon. Keadaan menarik dari komposisi para pasangan calon, selain jumlah pasangan calon yang relatif banyak, dari 13 calon yang berhasil lolos seleksi, hanya terdapat 4 (empat) pasang calon atau kira-kira 30% saja yang maju dengan dukungan partai politik yaitu:

- (1) Pasangan Drs. Tio Achriyat dan Drs. Tgk. H. Zulkarnain M diusung oleh PAN
- (2) Pasangan H. Azwir, S. Sos dan H. Abdul Karim, SE diusung oleh PBB dan Partai Demokrat
- (3) Pasangan Drs. H. Harfana Hasan, MM dan Mawardi Adami, S. Ag diusung oleh PPP
- (4) Pasangan Drs. H. Rabiun BS. AK dan Drs. Mawardi Jamal, M. Sc diusung oleh partai PIB dab PKPI.

Sembilan pasang calon lainnya hampir mencapai 70%, maju sebagai calon independent, tanpa dukungan salah satu partai.

Fenomena ini menggambarkan adanya gejala kecenderungan tidak butuhnya para calon terhadap dukungan partai politik. Pendapat beberapa informan tentang fenomena ini antara lain, adanya wacana yang berkembang di dalam masyarakat, bahwa masyarakat akan lebih suka memilih calon independent, karena ada dugaan calon yang maju dengan dukungan partai politik, jika terpilih, besar kemungkinan akan melakukan tindakan KKN untuk membalas jasa kepada partai yang mendukungnya. Wacana yang beredar di kalangan masyarakat tersebut nampaknya sebagian cukup terbukti dengan melihat hasil pilkada putaran pertama pada tanggal 25 November 2007, ternyata pilkada putaran pertama telah dimenangkan oleh pasangan independen dengan jumlah pemilih sebanyak 22%, dan yang berhasil menjadi pemenang pada ranking kedua, adalah pasangan H. Azwir, S. Sos dengan H. Abdul Karim, SE yang diusung oleh PBB dan Partai Demokrat. Karena tidak ada pasangan yang menang mutlak, maka akan dilakukan pilkada putaran kedua pada bulan Januari 2008 yang akan datang.

Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh Selatan nampak pada jawaban terhadap pertanyaan *"Dibandingkan dengan dua tahun lalu, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekarang sudah lebih baik"*. Ternyata yang menyatakan kurang atau tidak benar mencapai 50,7%, ditambah lagi sebanyak 7% yang menyatakan sangat tidak benar. Walaupun ada sebanyak 38,7 % menyatakan benar dan 3,4 % menjawab benar sekali. Frekuensi persebaran jawaban secara lengkap nampak jelas pada tabel di bawah

Persebaran jawaban ini memberikan arti sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Selatan masih belum melihat dan merasakan perubahan perbaikan kondisi sosial ekonomi, walaupun keamanan setelah masa perdamaian Helsinki, diakui sudah menjadi lebih baik.

Jawaban ini jika dikaitkan dengan jawaban pada pertanyaan *"Dibandingkan dengan dua tahun lalu, kondisi pelayanan umum yang diberikan Pemerintah Daerah Lebih Baik"*, ternyata total responden yang menyatakan benar hanya sejumlah 42,5%. Selebihnya, 57,5%, menyatakan kurang, tidak atau sangat tidak benar. Persebaran jawaban responden selengkapnya, dapat dilihat pada tabel kondisi kehidupan sosial ekonomi di bawah ini.

Persebaran jawaban ini menunjukkan adanya ketidakpuasan sebagian besar masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah. Kondisi sosial ekonomi yang dianggap belum membaik, karena kinerja aparat Pemerintah Daerah yang belum baik. Jika dikaitkan dengan pernyataan informan, ternyata masyarakat Kabupaten Aceh Selatan juga membandingkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten-kabupaten tetangga mereka, terutama Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Kedua Kabupaten tersebut dianggap telah berhasil meraih kemajuan yang cukup signifikan dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakatnya. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan yang dianggap sebagai kabupaten induk, masih saja berjalan di tempat, tidak maju-maju. Sebagian informan berpendapat hal ini karena aparat pemerintah hanya memikirkan kemajuan sendiri, kurang memikirkan kepentingan masyarakat.

Sedangkan persebaran jawaban terhadap pertanyaan *"Dibandingkan dengan dua tahun lalu, kondisi kehidupan sosial ekonomi korban konflik sekarang sudah lebih baik."*, sebagian besar responden menyatakan benar (51,0%), walaupun masih cukup banyak responden yang menjawab kurang benar (27,7%) dan bahkan ada juga yang menyatakan sangat tidak benar (4,7%).

Banyak responden yang menyatakan benar nampaknya dikaitkan dengan kondisi keamanan yang dianggap sudah jauh lebih baik. Sedangkan masih banyaknya responden yang menjawab kurang benar, nampaknya dikaitkan dengan belum adanya upaya pemerintah

untuk memproses penggantian kerugian berupa kerugian harta atau kompensasi lain terhadap para korban konflik.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan masih kurang menggembirakan. Perencanaan pembangunan belum banyak mempertimbangkan pendapat masyarakat. Hanya 34,0% responden yang menjawab benar terhadap pertanyaan "*Perencanaan pembangunan fisik telah mempertimbangkan pendapat masyarakat*". Sedangkan sebagian besar selebihnya (66%), menyatakan kurang, tidak, atau sangat tidak benar. Persebaran lengkap jawaban terhadap pertanyaan ini nampak pada tabel kondisi kehidupan sosial ekonomi di bawah ini.

Menurut beberapa informan belum ada langkah-langkah dari Pemerintah Daerah untuk menghimpun aspirasi masyarakat secara substansial, dan mempertimbangkannya dalam perencanaan pembangunan daerah.

Keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam penyusunan program pembangunan juga masih terbatas. Sebagian besar responden (57,6%) menyatakan kurang, tidak dan sangat tidak benar terhadap pertanyaan "*Tokoh adat dan masyarakat terlibat dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan*". Frekuensi jawaban terhadap pertanyaan ini, secara lengkap tergambar pada tabel di bawah.

Di sisi lain, sebagian masyarakat menganggap Pemerintah belum memahami budaya masyarakat Aceh dalam menangani pembangunan di Aceh Selatan. Pendapat ini nampak dari frekuensi jawaban terhadap pertanyaan "*Cara menangani pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah cukup memahami budaya masyarakat Aceh*". Ternyata sebagian besar responden menyatakan kurang, tidak atau sangat tidak benar (62,2%) terhadap pernyataan ini. Frekuensi jawaban selengkapannya dapat dilihat pada tabel Kondisi Sosial Ekonomi.

Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan selama ini tidak sejalan dengan budaya masyarakat Aceh Selatan. Jika Jawaban atas ketiga pertanyaan terakhir ini saling dikaitkan, maka diperoleh gambaran bawah dengan kurangnya keterlibatan partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses pembangunan sejak tahap perencanaan, maka tidak mengherankan jika pembangunan kurang sejalan dengan budaya Aceh Selatan.

Dalam hal hubungan masyarakat Aceh Selatan dengan pendatang dari daerah lain, menunjukkan gambaran yang positif. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar, sebanyak 63,1% responden yang menjawab benar dan benar sekali terhadap pertanyaan "*Sekarang ini, pandangan masyarakat terhadap para pendatang dari daerah lain semakin baik*". Persebaran jawaban selengkapnya dapat dilihat pada tabel Kondisi sosial ekonomi.

Persebaran jawaban ini dapat dimengerti, sebab masyarakat Aceh Selatan memang sudah sejak lama banyak berhubungan dengan orang-orang dari luar daerah Aceh, terutama dengan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Hal ini antara lain karena secara geografis, Kabupaten Aceh Selatan lebih dekat dengan daerah Sumatera Utara ketimbang dengan Banda Aceh. Bahkan jarak Kabupaten Aceh Selatan ke Kota Medan lebih pendek daripada jarak antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Banda Aceh. Sehingga, baik dalam hubungan produksi berupa pengiriman dan penjualan hasil pertanian dan perikanan, maupun hubungan konsumsi berupa pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat Aceh Selatan lebih banyak berhubungan dengan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, mobilitas kendaraan antara Tapaktuan dengan Medan, juga lebih banyak dibanding mobilitas kendaraan antara Tapaktuan dengan Banda Aceh. Misalnya saja, orang Tapaktuan yang ingin pergi ke Jakarta, pada umumnya naik pesawat dari Medan, bukan dari Banda Aceh.

Dalam hal penerimaan masyarakat terhadap para relawan dan pekerja sosial dari luar daerah Aceh, ternyata memperoleh jawaban sangat positif. Pada umumnya responden (81,5%) menyatakan benar dan benar sekali terhadap pertanyaan "*Masyarakat menerima baik relawan dan pekerja sosial dari manapun yang datang membantu*" Distribusi frekuensi selengkapnya nampak pada tabel kondisi sosial ekonomi.

Pernyataan "*yang datang membantu*" nampaknya merupakan unsur utama yang menyebabkan masyarakat Aceh Selatan menerima para relawan dan pekerja sosial (LSM), mengingat kondisi sosial ekonomi yang masih belum baik. Berbagai keterbatasan yang mereka hadapi, dan kinerja aparat pemerintah daerah yang belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menciptakan ketidakberdayaan yang melingkupi banyak sisi kehidupan sosial ekonomi mereka. Harapan masyarakat Aceh Selatan terhadap bantuan dari luar juga sangat kentara. Sebagian besar masyarakat Aceh Selatan menjadi tergantung pada bantuan yang mereka terima. Hal ini nampak dari jawaban responden terhadap pernyataan "*Masyarakat Aceh sangat mandiri sehingga bantuan yang diterima tidak menimbulkan sikap ketergantungan*" Sebagian besar responden (63,6%) menyatakan pernyataan ini kurang, tidak atau sangat tidak benar. Distribusi frekuensi selengkapnya jawaban atas pernyataan ini nampak pada tabel kondisi sosial ekonomi di bawah ini.

Artinya, mereka mengakui adanya sikap ketergantungan masyarakat Aceh Selatan terhadap bantuan dari luar. Adanya sikap ketergantungan ini nampaknya juga memperoleh penekanan dalam ekspresinya. Hal ini nampak dari banyaknya responden yang menyatakan tidak benar (20,2%) dan bahkan cukup banyaknya responden yang menyatakan sangat tidak benar (10,1%) terhadap pernyataan di atas.

Akan tetapi dibalik semua itu, ternyata penghargaan dan kepatuhan sebagian besar masyarakat Aceh Selatan terhadap nilai-nilai adat dan agama masih bertahan. Hal ini dapat dilihat dari

distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan *"Banyak anggota masyarakat lupa untuk berpegang pada ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup"* sebagai berikut.

Nampak pada tabel, sebanyak 61,6% responden menyatakan kurang, tidak atau sangat tidak benar. Penekanan sanggahan terhadap pernyataan ini juga nampak dari cukup banyaknya responden yang menyatakan pernyataan ini tidak benar (20,5%) dan sangat tidak benar (16,2%).

Demikian juga respon positif yang sangat dominan terhadap pernyataan *"Nilai-nilai budaya dan adat tetap dipegang teguh sebagai pedoman perilaku seluruh masyarakat"* Terdapat sebanyak 78,2% responden yang menyatakan benar dan benar sekali. Adanya penekanan pada respon ini juga nampak dari banyaknya responden yang menyatakan bahwa pernyataan ini benar sekali (24,2%). Distribusi frekuensi jawaban selengkapanya adalah sebagai berikut :

Tabel 17 : Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi

No	Pertanyaan	Jawaban Responden					Total
		STB	TB	KB	B	BS	
1	Dibandingkan dengan dua tahun lalu, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekarang sudah lebih baik	7,1%	19,5%	31,3%	38,7%	3,4%	100%
2	Dibandingkan dengan dua tahun lalu, kondisi pelayanan umum yang diberikan Pemerintah Daerah Lebih Baik	3,7%	14,8%	39,1%	39,1%	3,4%	100%
3	Dibandingkan dengan dua tahun lalu, kondisi kehidupan sosial ekonomi korban konflik sekarang sudah lebih baik	4,7%	9,1%	27,7%	51,0%	7,4%	100%
4	Perencanaan pembangunan fisik telah mempertimbangkan pendapat masyarakat	4,1%	29,9%	32,0%	30,6%	3,4%	
5	Tokoh adat dan masyarakat terlibat dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan	5,4 %	22,6%	29,6%	35,0%	7,4%	100%

6	Cara menangani pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah cukup memahami budaya masyarakat Aceh	5,1%	15,2%	41,9%	32,8%	5,1%	100%
7	Sekarang ini, pandangan masyarakat terhadap para pendatang dari daerah lain semakin baik	4,4%	7,1%	25,3%	61,1%	2,0%	100%
8	Masyarakat menerima baik relawan dan pekerja sosial dari manapun yang datang membantu	2,3%	4,0%	12,1%	53,0%	28,5%	100%
9	Masyarakat Aceh sangat mandiri sehingga bantuan yang diterima tidak menimbulkan sikap ketergantungan	10,1%	20,2%	33,3%	33,3%	3,0%	100%
10	Banyak anggota masyarakat lupa untuk berpegang pada ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup	16,2%	20,5%	24,9%	30,0%	8,4%	100%
11	Nilai-nilai budaya dan adat tetap dipegang teguh sebagai pedoman perilaku seluruh masyarakat	1,0%	5,0%	15,8%	54,0%	24,2%	100%

3. Anomie

Seperti telah disinggung di atas, kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya masih kurang mengembirakan. Keadaan ini sebagai akibat berlangsungnya konflik yang berkepanjangan, ditambah dengan berbagai masalah yang muncul pada waktu pasca konflik. Masalah-masalah yang masih harus dihadapi masyarakat Aceh Selatan pada saat penelitian dilakukan adalah seperti adanya hama tanaman pala, persaingan dengan nelayan yang berasal dari daerah lain dalam penangkapan ikan, dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi mereka yang bukan petani dan nelayan, Baik dalam wawancara maupun dengan pengamatan, ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi tersebut nampak cukup besar. Ketidakberdayaan masyarakat untuk mengatasi sendiri masalah-masalah structural yang

tengah mereka hadapi, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat mencari kambing hitam. Di lain pihak, menurut pandangan sebagian anggota masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, pemerintah daerah Kabupaten termasuk para anggota DPRK dianggap sibuk dengan diri mereka sendiri dan kurang memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat. Hal ini muncul berdasarkan pemandangan sehari-hari di kalangan aparat Pemerintah Kabupaten. Para aparat nampak selalu sibuk dan banyak urusan, penampilan mereka pun nampak “lebih gagah” daripada masyarakat biasa, tetapi kinerja mereka belum dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat. Belum ada program pemerintah kabupaten yang dianggap secara langsung ingin mengangkat kesejahteraan masyarakat secara umum kecuali bantuan kepada pihak anggota Gam yang turun gunung setelah adanya perdamaian Helsinki. Bahkan penanganan terhadap penanggulangan hama tanaman pala yang kini menyerang daerah Kabupaten Aceh Selatan juga masih belum nampak.

Dibandingkan dengan perkembangan Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Singkil, yang berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Selatan, kini daerah-daerah tersebut telah berhasil menunjukkan kemajuan yang lebih nyata. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya misalnya, telah dilakukan beberapa kegiatan yang hasilnya untuk kepentingan masyarakat seperti melancarkan saluran air irigasi dan demplot tehnik pembibitan tanaman padi yang lebih efisien dari yang biasanya sebanyak kira-kira 75 Kg per hektar, menjadi hanya kira-kira 17 Kg. Perbandingan kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten tetangga dekat yang telah melaksanakan beberapa program yang langsung dirasakan masyarakat, makin menimbulkan rasa tidak puas di hati sebagian anggota masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah kabupaten Aceh Selatan.

Sebagian dari anggota masyarakat juga memiliki anggapan yang kurang simpatik terhadap para mantan elite Gam dan para kroninya yang pada saat ini sudah menjadi tokoh masyarakat yang

memiliki fasilitas dalam bidang ekonomi. Walaupun ada juga sebagian yang berpendapat bahwa fasilitas yang diperoleh oleh para mantan elite Gam tersebut adalah sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.

Di kalangan masyarakat, muncul suatu ungkapan yang sering mereka sebut “Siapa yang dekat api, maka dialah yang bisa merasakan panas.” Istilah ini untuk menyatakan bahwa hanya mereka yang kenal dekat dengan para pejabatlah yang saat ini bisa meraih fasilitas dan bantuan kesejahteraan dari Pemerintah Daerah. Sedangkan yang tidak memiliki kenalan pejabat tidak memperoleh kepedulian dari pemerintah. Sehingga walaupun tetap diakui sejak adanya perdamaian Helsinki dirasakan kondisi keamanan dan ketenangan yang makin membaik oleh masyarakat, tetapi ketidakpuasan terhadap keadaan dan pemerintah terutama pemerintah kabupaten, tidak menghilang, malahan nampak mulai mengkristal di kalangan sebagian anggota masyarakat. Pandangan yang sebaliknya, ditujukan terhadap Pemerintah Pusat. Ternyata banyak anggota masyarakat yang lebih percaya kepada Pemerintah Pusat dibanding dengan kepada Pemerintah Daerah. Malahan ada pernyataan dari informan. Sebaiknya program bantuan kepada masyarakat langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tanpa melalui Pemerintah Daerah. Karena jika melalui Pemerintah Daerah, bantuan itu mungkin tidak sampai. Jika sampai juga, bantuan tersebut sudah menyusut banyak.

Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang ada, dan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak menyebabkan hilangnya harapan terhadap akan datangnya keadaan yang lebih baik. Salah satu harapan itu adalah pilkada Kabupaten Aceh Selatan yang diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memiliki kepedulian kepada rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

Namun di tengah-tengah ketidakpuasan terhadap kondisi sosial masyarakat, sebagian sistem nilai yang hidup di masyarakat dapat dikatakan tidaklah pudar. Berdasarkan hasil kuesioner, responden masih memegang nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Gambaran ini dapat dilihat dari jawaban atas pernyataan "*Pendidikan tinggi tidak menentukan untuk mendapat kedudukan di pemerintahan*" Terhadap pernyataan ini, terdapat 61,6% responden yang menyatakan kurang, tidak dan sangat tidak setuju. Hal ini membawa arti, sebagian besar anggota masyarakat masih menganggap pentingnya pendidikan untuk mencapai suatu posisi di pemerintahan. Distribusi frekuensi pendapat responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel anomie.

Demikian juga dengan respon terhadap pernyataan "*Saya tidak peduli dengan cara apapun yang ditempuh, yang penting tujuannya tercapai*" Pernyataan ini juga mendapat sanggahan yang cukup keras dari responden. Sebanyak 76,5% responden menyatakan kurang, tidak dan sangat tidak setuju. Malahan tekanan dalam sanggahan ini nampak dari cukup tingginya responden yang menyatakan sangat tidak setuju (22,8%). Artinya, sebagian besar masyarakat masih mempertahankan keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti nampak pada distribusi frekuensi jawaban responden yang selengkapnya pada tabel anomie. Komposisi jawaban responden menunjukkan tidak terjadi anomie dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat, terutama yang menyangkut nilai-nilai adat dan agama.

Demikian juga dengan penghargaan terhadap pendidikan tinggi masih tetap dipegang. Sedangkan jalan pintas nampak tidak disukai masyarakat Aceh Selatan. Hal ini tergambar pada jawaban responden terhadap pernyataan "*Pendidikan tinggi tidak penting, yang penting adalah mempunyai jalan pintas untuk dapat banyak uang*" Sebanyak 87,9% responden menyatakan kurang, tidak dan sangat tidak benar atas pernyataan ini. Bukan hanya itu, tetapi malahan mayoritas responden (50,5%) menyatakan pernyataan ini sangat tidak benar. Distribusi frekuensi selengkapnya dapat dilihat pada tabel anomie di bawah ini.

Berpijak pada jawaban-jawaban responden di atas, sepintas dapat dilihat dalam sistem nilai dalam masyarakat Aceh Selatan tidak

nampak gejala anomie yang cukup kuat. Akan tetapi pada jawaban-jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang juga mengandung nilai-nilai kemasyarakatan, gejala anomie terlihat. Kesadaran terhadap adanya suatu ketidakpastian nampak pada jawaban atas pernyataan *"Walaupun seseorang sudah berusaha keras, hasil yang diperolehnya belum tentu sesuai dengan harapan"* sebagian besar responden, sebanyak 70,7% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan ini. Penekanan persetujuan terhadap kondisi ini juga dapat dilihat dengan adanya 23,6% responden yang menyatakan sangat setuju. Disini nampak keraguan masyarakat akan berjalannya suatu merit sistem yang stabil, yang menjamin hasil baik bagi para pekerja keras. Distribusi frekuensi jawaban secara lengkap dapat dilihat pada tabel anomie di bawah ini.

Kesulitan di bidang ekonomi nampaknya merupakan variabel penting yang mempengaruhi keajegan implementasi sistem nilai pada masyarakat Aceh Selatan. Jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan *"Dalam keadaan serba susah seperti sekaang ini, hanya sedikit orang yang masih punya rasa kebersamaan"* memperoleh persetujuan yang dominan dengan sebanyak 66,3% responden. Penekanan persetujuan responden nampak dari cukup banyaknya jumlah responden yang menyatakan sangat setuju (19,5%). Jawaban ini juga sejalan dengan jawaban reponden terhadap pertanyaan *"Dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, banyak orang hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri"* Sebagian besar rponden memberikan persetujuan dan sangat setuju terhadap pernyataan kondisi ini (64,6%) dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16,8%. Distribusi frekuensi jawaban secara lengkap dapat dilihat pada tabel anomie.

Kondisi ekonomi yang dianggap kurang menggembirakan yang kini dialami oleh sebagian besar masyarakat Aceh Selatan, tidak terjadi pada sebagian kecil anggota masyarakat yang lainnya. Malahan sebagian besar responden, menyatakan kelompok masyarakat tertentu yang relatif makmur dalam kehidupan ekonomi dan memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya, memperoleh peluang untuk menjadi

bertambah makmur. Perkembangan kondisi ekonomi yang berlawanan ini semakin menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang tergolong miskin dengan kelompok masyarakat kaya. Kondisi ini nampak dari jawaban responden terhadap pertanyaan "*Jurang perbedaan antara kaya dan miskin bertambah lebar, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial*" yang mendapat persetujuan dari sebagian besar responden (sebanyak 66,1%), dengan penekanan yang cukup kuat dengan adanya 24,4% responden yang menyatakan sangat setuju. Distribusi frekuensi jawaban secara lengkap dapat dilihat pada tabel anomie.

Himpitan kesulitan ekonomi yang dialami dalam jangka panjang dan dari masa ke masa tidak kunjung terjadi perubahan, bukan tidak mungkin akan menumbuhkan rasa tidak puas yang pada tahap selanjutnya akan melunturkan semakin banyak sistem nilai yang pada saat ini masih dihargai oleh masyarakat Aceh Selatan. Jika penghargaan terhadap sebagian besar sistem nilai luntur, kemungkinan terjadi anarkhi di daerah Aceh Selatan akan menjadi suatu keniscayaan. Indikasi ini nampak pada respon para informan terhadap pernyataan pernyataan "*kehidupan ekonomi yang makin sulit dapat membuat masyarakat/orang kecil menjadi beringas*". Terhadap pertanyaan ini, terdapat 62,2% responden yang setuju dan sangat setuju, dengan penekanan yang nampak dari sebanyak 22,6% responden yang menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan ini. Distribusi frekuensi jawaban responden secara lengkap dapat dilihat pada tabel anomie di bawah ini.

Dalam kondisi ketidakberdayaan masyarakat untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup mereka, kebijakan pemerintah merupakan salah satu kata kunci yang dianggap dapat menstimulasi perubahan menuju kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Akan tetapi, peran yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, dianggap masih tidak sejalan dengan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Ironisnya, kebijakan pemerintah dianggap sering tidak jelas oleh sebagian besar responden. Fenomena ini mengindikasikan adanya gejala anomie dalam hal kebijakan pemerintah. Hal ini dapat

dilihat dari jawaban sebagian besar responden yang setuju dan setuju sekali terhadap pernyataan "*Kebijakan pemerintah sering tidak jelas dan membingungkan banyak orang*" sebanyak 63%. Juga terdapat penekanan yang terlihat dari cukup banyaknya (15,5%) responden yang menyatakan benar sekali terhadap pernyataan ini. Dengan distribusi frekuensi selengkapnya nampak pada tabel anomie.

Selain sering tidak jelas, kebijakan yang diambil pemerintah oleh sebagian besar responden juga dianggap tidak berpihak kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah. Sebagian informan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat secara ketat untuk menebang pohon, bahkan juga terhadap pohon yang ditanam sendiri di pekarangan mereka. Kebijakan ini telah mendatangkan kesulitan pada kelompok masyarakat pengrajin alat-alat rumah tangga. Gambaran tentang kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada masyarakat lemah ini nampak dari jawaban responden terhadap pertanyaan "*Rakyat kecil makin menderita karena kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada golongan ekonomi lemah*" Sebanyak 68,2% responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Banyaknya jumlah responden yang menyatakan sangat setuju (sebanyak 25,8%) menunjukkan akses yang kuat persetujuan terhadap pernyataan ini. Secara lengkap, distribusi frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada tabel anomie berikut ini.

Bukan hanya pada aspek kebijakan pemerintah. Pada pelayanan umum yang dilakukan aparat pemerintah juga dianggap kurang mencerminkan aspek pemerataan pelayanan. Sebagian besar (56,9%) responden menyatakan setuju dan sangat setuju pada pernyataan "*Pelayanan umum baru dapat diperoleh dengan mudah kalau kita kenal pejabat atau mampu membayar sejumlah uang*" dari responden yang menyatakan setuju itu, 15,9% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Distribusi frekuensi lengkap jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut nampak pula pada tabel anomie.

Korupsi di kalangan pemerintah, merupakan persoalan yang paling banyak menjadi sorotan masyarakat. Prasangka bahwa pemerintah daerah marak melakukan korupsi, menjadi salah satu variabel yang menimbulkan ketidaksukaan dan kurangpercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Fenomena ini nampak pada jawaban responden terhadap pertanyaan "*Korupsi di berbagai bidang kehidupan merupakan penyakit sosial yang merajalela*" Sebanyak 78,4% responden menyatakan persetujuan terhadap pernyataan ini. Bahkan pada jawaban responden dalam masalah ini terdapat penekanan yang sangat kuat, dengan adanya 45,6% responden yang menyatakan sangat setuju. Secara lengkap, distribusi frekuensi jawaban lengkap terhadap pertanyaan ini nampak pada tabel anomie.

Anggapan masyarakat bahwa korupsi merupakan persoalan yang menjadi biang keladi yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat Aceh Selatan, nampaknya menempati urutan kedua setelah di urutan pertama adalah masalah konflik. Setelah masa perdamaian dan berlalunya masa konflik, korupsi menjadi naik pada prioritas yang bercokol di anak tangga pertama. Demikian dianggap urgennya persoalan korupsi, sebagian besar responden berpendapat bahwa masalah korupsi adalah prioritas utama yang harus diselesaikan. Bila persoalan korupsi dibiarkan tanpa pembenahan, maka bukan tidak mungkin akan menjadi embrio yang sangat subur bagi munculnya konflik sosial yang baru. Gambaran ini nampak pada jawaban responden terhadap pertanyaan "*Bila pemerintah tidak berhasil memberantas korupsi, akan terjadi revolusi sosial*" Terdapat sebanyak 78,1% responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan ini. Penekanan terhadap pernyataan ini juga cukup kuat dengan adanya sebanyak 27,3% responden yang menyatakan sangat setuju. Distribusi frekuensi secara lengkap jawaban responden pada pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 18 : Anomie

No	Pertanyaan	Jawaban Responden					Total
		STB	TB	KB	B	BS	
1	Pendidikan tinggi tidak menentukan untuk mendapat kedudukan di pemerintahan	9,1%	23,5%	29,0%	25,6%	12,8%	100%
2	Saya tidak peduli dengan cara apapun yang ditempuh, yang penting tujuannya tercapai	22,8%	22,5%	31,2%	17,1%	6,4%	100%
3	Pendidikan tinggi tidak penting, yang penting adalah mempunyai jalan pintas untuk dapat banyak uang	50,5%	14,8%	22,6%	9,8%	2,4%	100%
4	Walaupun seseorang sudah berusaha keras, hasil yang diperolehnya belum tentu sesuai dengan harapan	2,7%	6,7%	19,9%	47,1%	23,6%	100%
5	Dalam keadaan serba susah seperti sekaang ini, hanya sedikit orang yang masih punya rasa kebersamaan	2,0%	8,4%	23,2%	46,8%	19,5%	100%
6	Dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, banyak orang hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri	3,0%	8,8%	23,6%	47,8%	16,8%	100%
7	Jurang perbedaan antara kaya dan miskin bertambah lebar, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial	6,8%	12,2%	14,9%	41,7%	24,4%	100%
8	Kehidupan ekonomi yang makin sulit dapat membuat masyarakat/orang kecil menjadi beringas	5,1%	13,5%	19,3%	39,5%	22,6%	100%
9	Kebijakan pemerintah sering tidak jelas dan membingungkan banyak orang	5,4%	10,4%	21,2%	47,5%	15,5%	100%
10	Rakyat kecil makin menderita karena kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada golongan ekonomi lemah	3,0%	8,8%	23,6%	47,8%	16,8%	100%
11	Pelayanan umum baru dapat diperoleh dengan mudah kalau kita kenal pejabat atau mampu membayar sejumlah uang	9,2%	11,5%	22,4%	41,0%	15,9%	100%

12	Korupsi di berbagai bidang kehidupan merupakan penyakit sosial yang merajalela	9,2%	11,5%	22,4%	41,0%	15,9%	100%
13	Bila pemerintah tidak berhasil memberantas korupsi, akan terjadi revolusi sosial	2,4%	6,4%	13,1%	50,8%	27,3%	100%

4. Modal Sosial

Dengan adanya pengelompokan warga masyarakat menjadi 6 (enam) kelompok seperti telah diuraikan di atas, kepercayaan terhadap sesama anggota masyarakat juga menjadi terpilah-pilah. Terhadap sesama anggota suatu kelompok, terdapat kesan adanya saling percaya. Tetapi dengan sesama warga yang berbeda kelompok, tingkat kepercayaan berbeda-beda, tergantung seberapa jauh mereka saling mengenal satu dengan lainnya. Terhadap anggota kelompok lain yang kurang dikenal, kepercayaan tidak selalu ada dengan sendirinya. Artinya, terdapat dua aspek dalam membentuk adanya saling percaya interpersonal, pertama keanggotaan dalam suatu kelompok status⁴ dan kedua, kedekatan antarpribadi⁵. Kepercayaan bisa diberikan bukan hanya kepada sesama orang yang berasal dari Aceh, tetapi juga terhadap orang yang berasal dari daerah lain. Tetapi kepercayaan tersebut tidak muncul dengan serta merta, melainkan tumbuh bersamaan dengan kedekatan antar pribadi secara berangsur-angsur dengan berjalannya waktu. Dalam hal ini nampak bahwa pengaruh ikatan territorial tidak sekuat pengaruh yang ditimbulkan kedua aspek tersebut. Walaupun ikatan territorial tidak sekuat ikatan yang ditimbulkan oleh kedua aspek tersebut, tetapi pada umumnya territorial tertentu dihuni oleh kelompok status tertentu pula. Sehingga adanya saling kepercayaan dan resiprositas juga nampak pada hubungan antarwarga sekampung.

⁴ Misalnya antarmasyarakat biasa baik yang menjadi korban konflik atau tidak

⁵ Seorang anggota masyarakat biasa bisa saja menaruh kepercayaan kepada kelompok mantan anggota Gam, yang memang dianggap dapat dipercayainya.

Rasa saling percaya yang dimiliki antarwarga sekampung tergambar dari jawaban responden terhadap pernyataan "*Orang kampung ini umumnya memiliki rasa saling percaya*". Terhadap pernyataan ini, terdapat 60,6% responden yang membenarkan. Walaupun responden yang menyatakan kurang benar juga cukup banyak, sebesar 31,6%. Distribusi frekuensi jawaban responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel Modal Sosial.

Seperti halnya dengan kepercayaan, ada tidaknya solidaritas kurang lebih juga dipengaruhi oleh keanggotaan dalam kelompok-kelompok. Tumbuhnya solidaritas juga sejalan dengan tumbuhnya kepercayaan. Bedanya, dalam membentuk solidaritas, ikatan teritorial memberikan pengaruh yang cukup besar terutama ketika berhadapan dengan pihak yang berasal dari luar komunitas tersebut. Artinya, nampak adanya solidaritas yang kuat terhadap antara sesama anggota suatu kelompok, ada pula solidaritas yang cukup kuat antara sesama warga sekampung. Salah satu contoh solidaritas adalah membantu ketika ada orang yang sedang mengalami kesusahan. Ternyata keinginan untuk membantu orang yang sedang mengalami kesusahan masih sangat dominan di kalangan masyarakat Aceh Selatan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan "*Warga kampung ini umumnya senang membantu orang yang sedang berada dalam kesusahan*". Tercatat sebanyak 75,7% responden yang menyatakan kebenaran terhadap kondisi tersebut. Penekanan terhadap kebenaran kondisi ini juga nampak dari adanya 15,2% responden yang menyatakan benar sekali terhadap pernyataan ini. Distribusi frekuensi secara lengkap, dapat dilihat pada tabel modal sosial.

Berbeda dengan kepercayaan dan solidaritas, pada umumnya keberadaan toleransi masyarakat terhadap anggota masyarakat lain lebih longgar, melewati batas-batas kelompok status. Bahkan kepada warga masyarakat lain yang berbeda agama, toleransi untuk menjalankan agama masing-masing juga ada. Toleransi dalam konteks beragama ini baru berubah mencapai batasnya ketika ada orang yang beragama lain melakukan intervensi dan mempengaruhi

warga lainnya untuk ikut masuk ke dalam agamanya. Salah satu bentuk toleransi adalah penghargaan terhadap pendapat orang lain. Dalam masalah ini, sebagian besar masyarakat Aceh Selatan bisa menghargai pendapat orang lain. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan "*Pada umumnya warga di kampung ini bisa menghargai pendapat orang lain*" Terdapat sebagian besar (sebanyak 63,6) responden yang menyatakan kebenaran atas pernyataan tersebut. Walaupun responden yang menyatakan kurang benar juga cukup banyak (sebesar 25,3%). Secara lengkap, distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel modal sosial.

Hubungan sosial antar sesama warga kampung umumnya harmonis. Keucik (Kepala Desa) masih memegang peran sebagai orang yang dituakan tokoh yang cukup dipatuhi. Banyak persoalan antar warga di dalam komunitas yang diselesaikan oleh Keucik. Hubungan warga kampung dengan orang yang berasal dari luar kampung juga relatif baik, sepanjang pendatang dari luar menghormati kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kampung yang didatangi.

Pendapat informan yang diperoleh melalui wawancara dan FGD tersebut, ternyata sejalan dengan jawaban responden terhadap pertanyaan "*Penduduk kampung ini mempunyai hubungan baik antar sesama warga*" terdapat sebanyak 74,1% responden menyatakan kebenaran terhadap pernyataan tersebut. Bahkan nampak penekanan yang cukup kuat pada pernyataan tersebut dengan adanya 21,2% responden yang menyatakan benar sekali. Distribusi frekuensi jawaban secara lengkap, dapat dilihat pada tabel modal sosial yang disajikan di bawah.

Mendukung kondisi hubungan baik antara sesama warga kampung, pergaulan sehari-hari antar sesama warga kampung juga berjalan harmonis. Hal ini juga dapat dilihat pada jawaban responden terhadap pertanyaan "*Pergaulan sehari-hari antar sesama warga kampung ini pada umumnya harmonis*" Terdapat sebanyak 84,1%

responden menyatakan kebenaran atas pernyataan ini. Dengan 18,9% menyatakan benar sekali. Distribusi frekuensi jawaban responden secara lengkap, dapat dilihat pada tabel modal sosial di bawah.

Hubungan yang harmonis bukan hanya terjadi antara sesama warga sekampung, tetapi juga dengan warga lain tetangga kampung. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden terhadap pernyataan "*Hubungan antara warga kampung ini dengan warga kampung tetangga cukup harmonis*" Terdapat sebanyak 84,5% responden yang menyatakan kebenaran pernyataan ini, dengan penekanan yang cukup kuat yang nampak dari adanya 22,2% responden yang menyatakan benar sekali. Distribusi frekuensi jawaban secara lengkap, dapat dilihat pada tabel modal sosial di bawah.

Kepala Kampung (Keuchik) selain menjalankan peran administratif juga menjalankan peran sebagai pemimpin pada teritorial kampung. Banyak persoalan yang terjadi dalam hubungan antar warga, dipercaya untuk diserahkan dan diselesaikan oleh Keuchik. Kondisi ini nampak dari jawaban responden terhadap pernyataan "*Kepala Kampung (Keuchik) dipercaya untuk mendamaikan/menyelesaikan masalah yang terjadi diantara warga se kampung*" Terdapat sebanyak 87,9% responden menyatakan kebenaran pernyataan ini. Penekanan terhadap kondisi ini juga kuat dengan adanya 39,9% responden yang menyatakan benar sekali terhadap kondisi ini. Secara lengkap, distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan ini, dapat dilihat pada tabel modal sosial.

Walaupun hubungan warga dengan warga lain yang se kampung dan berasal dari kampung tetangga dapat dikatakan relatif baik, tetapi ketika merespon kedatangan orang luar, terdapat resistensi yang nampak dari jawaban terhadap pernyataan "*Warga kampung ini umumnya senang menerima pendatang dari luar*", sebagian besar, yakni sebanyak 51,6% responden menyatakan kurang, tidak dan sangat tidak benar terhadap pernyataan ini. Sikap ini nampaknya juga berkaitan dengan masih adanya rasa curiga yang cukup kental

sehingga merasa harus bersikap hati-hati terhadap kedatangan orang dari luar. Hal ini nampak pada jawaban responden terhadap pernyataan "Akibat konflik, warga kampung ini menjadi berhati-hati agar tidak diperalat orang lain" Pada umumnya, sebanyak 89,5% responden menyatakan kebenaran pernyataan ini, dengan adanya penekanan yang kuat yang nampak dari adanya 25,1% responden yang menyatakan bahwa pernyataan ini benar sekali. Distribusi frekuensi jawaban secara lengkap terhadap kedua pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada tabel modal sosial di bawah ini.

Tabel 19 : Modal Sosial

No	Pertanyaan	Jawaban Responden					Total
		STB	TB	KB	B	BS	
1	Orang kampung ini umumnya memiliki rasa saling percaya	1,3%	6,4%	31,6%	48,5%	12,1%	100%
2	Warga kampung ini umumnya senang membantu orang yang sedang berada dalam kesusahan	1,7%	4,1%	18,6%	60,5%	15,2%	100%
3	Pada umumnya warga di kampung ini bisa menghargai pendapat orang lain	1,7%	4,1%	18,6%	60,5%	15,2%	100%
4	Penduduk kampung ini mempunyai hubungan baik antar sesama warga	1,0%	2,0%	22,9%	52,9%	21,2%	100%
5	Pergaulan sehari-hari antar sesama warga kampung ini pada umumnya harmonis	1,0%	2,0%	22,9%	52,9%	21,2%	100%
6	Hubungan antara warga kampung ini dengan warga kampung tetangga cukup harmonis	2,0%	1,7%	11,8%	62,3%	22,2%	100%
7	Kepala Kampung (Keuchik) dipercaya untuk mendamaikan/menyelesaikan masalah yang terjadi diantara warga se kampung	2,0%	1,7%	11,8%	62,3%	22,2%	100%
8	Warga kampung ini umumnya senang menerima pendatang dari luar	0,7%	10,8%	40,1%	37,4%	11,1%	100%
9	Akibat konflik, warga kampung ini menjadi berhati-hati agar tidak diperalat orang lain	-	1,7%	8,8%	64,4%	25,1%	100%

5. Deprivasi

Pada waktu terjadinya konflik, terdapat banyak kasus yang sangat merugikan warga masyarakat biasa. Adanya warga masyarakat biasa yang dianiaya karena dicurigai sebagai anggota Gam oleh aparat keamanan pemerintah, merupakan kejadian yang sering terjadi. Perintah kepada warga untuk mengungsi karena wilayah kampungnya akan menjadi ajang baku serang antara tentara dengan anggota Gam dan kerusakan harta benda akibat pertempuran tersebut, juga kisah yang sudah tidak aneh terlihat. Terbangkalainya kebun yang tidak dirawat karena si pemilik takut keselamatan jiwanya terancam baik oleh tentara maupun oleh anggota Gam jika tetap merawat kebun. Anggota keluarga yang dianiaya tentara karena salah satu anggota keluarga tersebut dikenali sebagai anggota Gam, hijrahnya sebuah keluarga dengan terpaksa ke tempat baru yang dianggap lebih aman, dengan meninggalkan harta benda mereka karena takut diserang anggota Gam, merupakan sebagian gambaran dari banyak sekali peristiwa deprivasi lain yang dialami masyarakat Aceh Selatan pada masa konflik.

Setelah terjadinya perdamaian Helsinki, keamanan membaik. Secara berangsur-angsur pemulihan dilakukan. Pernah muncul wacana yang berasal dari pemerintah daerah untuk mengganti kerugian yang diderita para anggota masyarakat korban konflik. Bahkan anggota masyarakat yang merasa menjadi korban konflik pernah diminta mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan pemerintah. Tetapi tidak seperti direalisasinya bantuan kepada mantan anggota Gam yang turun gunung setelah perdamaian Helsinki dilakukan, sampai pada akhir tahun 2007, realisasi ganti rugi kepada anggota masyarakat korban konflik masih belum dilakukan. Menurut informan, proposal-proposal yang telah diajukan masyarakat tersebut akan dipilah-pilah lebih dulu oleh pemerintah antara korban konflik langsung dengan korban tidak langsung. Tetapi komunikasi pemerintah kepada warga masyarakat tentang informasi pemilahan tersebut tidak terjadi dan agak terabaikan, sehingga muncul kesan yang cukup kuat di kalangan masyarakat, bahwa pemerintah kurang

peduli terhadap korban konflik. Salah satu informan menyatakan sikap dan tindakan pemerintah dalam menangani kasus Aceh pada saat ini sangat sarat dengan muatan politik. Ada kecenderungan pemerintah melakukan pilih kasih sikap kepada suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, dengan pertimbangan manfaat atau keuntungan-keuntungan politik yang dapat diperoleh pemerintah.

Menurut informan tersebut, bantuan terhadap mantan anggota Gam lebih cepat direalisasi karena ada tekanan kuat dari pihak Gam, dan ada juga kepentingan politik pemerintah untuk mengambil hati Gam. Sedangkan ganti rugi kepada masyarakat korban konflik belum direalisasi sebab tidak adanya tekanan politik dari salah satu pihak yang betul-betul ingin memperjuangkan nasib masyarakat korban konflik.

Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa sekarang (2007), kondisi pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat sudah lebih baik. Hal ini nampak dari jawaban responden terhadap pernyataan "*Pelayanan kesehatan yang diperoleh keluarga saya saat ini lebih baik dibanding dua tahun lalu*". Sebagian besar responden (sebanyak 66,0%) menyatakan kebenaran terhadap pernyataan tersebut. Demikian juga dengan jawaban responden terhadap pertanyaan "*Pelayanan pendidikan untuk keluarga saya saat ini lebih baik dibanding dua tahun lalu*" sebagian besar responden (sebanyak 68,3%) juga menyatakan kebenaran atas pernyataan tersebut. Pernyataan serupa juga diperoleh dari responden tentang kemungkinan untuk membangun dan menghidupkan kembali lembaga sosial budaya yang pada masa konflik telah menjadi porak poranda. Hal ini nampak dari jawaban responden terhadap pernyataan "*kemungkinan untuk menghidupkan kembali lembaga sosial budaya di kampung saya lebih besar di banding masa konflik*". Sebagian besar responden (sebanyak 78,7%) menyatakan kebenaran terhadap pernyataan ini, dengan ada penekanan yang cukup kuat yang nampak dari cukup banyaknya responden (17,8%) yang menyatakan

benar sekali. Distribusi frekuensi jawaban responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel tentang deprivasi di bawah ini.

Kenaikan tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta tingginya kemungkinan untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga sosial budaya masyarakat yang diakui oleh sebagian besar anggota masyarakat, tidak sejalan dengan pengakuan masyarakat tentang kondisi ekonomi mereka. Nampaknya bidang ekonomi menjadi persoalan utama bagi sebagian masyarakat Aceh Selatan. Kondisi tingkat ekonomi masyarakat yang sejak perdamaian Helsinki belum banyak berubah, kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan kesulitan untuk memperoleh penghasilan yang sesuai untuk hidup layak, menjadi persoalan utama bagi sebagian besar masyarakat Aceh Selatan. Kesempatan kerja di perusahaan atau pemerintah sangat sulit, sedangkan peluang untuk dapat menciptakan pekerjaan sendiri juga sangat terbatas, antara lain disebabkan karena kelangkaan modal. Di lain pihak, peluang untuk memperoleh bantuan pinjaman modal dari lembaga-lembaga keuangan atau pemerintah juga sangat sulit.

Stagnansi kondisi ekonomi pasca perjanjian Helsinki yang masih dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat nampak dari jawaban responden terhadap pernyataan "*Tingkat kondisi ekonomi saat ini lebih baik dibandingkan dengan dua tahun lalu*" Mayoritas responden (sebanyak 57,3%) menyanggah pernyataan ini. Demikian juga jawaban responden terhadap pernyataan "*Kondisi perekonomian sekarang mendukung kehidupan saya menjadi lebih baik dibanding dua tahun lalu*" sebagian besar responden (sebanyak 57,7%) juga menyanggahnya. Distribusi frekuensi jawaban responden secara lengkap, dapat dilihat pada tabel deprivasi.

Salah satu aspek yang menyebabkan terjadinya stagnansi tingkat perekonomian adalah sulitnya anggota masyarakat untuk memperoleh pekerjaan karena sangat terbatasnya lapangan kerja. Indikasi ini nampak dari jawaban responden terhadap pernyataan "*Sekarang ini, kemungkinan untuk mendapat pekerjaan sesuai*

dengan kemampuan dan keahlian saya lebih besar dibanding dua tahun lalu” Mayoritas responden (sebanyak.51,4%) menyanggah pernyataan ini. Di lain pihak, kemampuan sangat terbatas yang dimiliki anggota masyarakat seperti kualitas sumber daya manusia dan pemilikan modal, telah menyebabkan mereka sangat sulit untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kondisi demikian nampak dari jawaban responden terhadap pernyataan *”Sekarang ini terdapat peluang besar bagi warga kabupaten ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri”* Sebagian besar responden (sebanyak 76,1%) menyanggah pernyataan ini. Penekanan sanggahan responden juga nampak dari banyaknya responden yang menyatakan tidak benar dan sangat tidak benar (sebanyak 22,9% dan 12,8%). Mengenai peluang untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan (bank), banyak informan mengatakan bahwa bank lebih memprioritaskan memberikan pinjaman kepada para pegawai negeri saja, karena pegawai negeri lebih bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bank. Sedangkan peluang untuk memperoleh pinjaman dari pemerintah juga kecil. Hal ini dapat dilihat dari jawaban terhadap pernyataan *”Sekarang ini, warga kabupaten ini mempunyai peluang besar untuk memperoleh bantuan/pinjaman modal usaha dari Pemerintah”* sebagian besar responden (sebanyak 61,7%) menyatakan menyanggahnya, Distribusi frekuensi jawaban responden secara lengkap dapat dilihat pada tabel deprivasi di bawah ini:

Tabel 20 : Deprivasi

No	Pertanyaan	Jawaban Responden					Total
		STB	TB	KB	B	BS	
1	Pelayanan kesehatan yang diperoleh keluarga saya saat ini lebih baik dibanding dua tahun lalu	1,7%	9,4%	22,9%	56,9%	9,1%	100%
2	Pelayanan pendidikan untuk keluarga saya saat ini lebih baik dibanding dua tahun lalu	2,4%	10,5%	18,7%	62,2%	6,1%	100%

3	Kemungkinan untuk menghidupkan kembali lembaga sosial budaya di kampung saya lebih besar di banding masa konflik	1,3%	7,7%	12,1%	60,9%	17,8%	100%
4	Tingkat kondisi ekonomi saat ini lebih baik dibandingkan dengan dua tahun lalu	6,1%	19,2%	32,0%	38,0%	4,7%	100%
5	Kondisi perekonomian sekarang mendukung kehidupan saya menjadi lebih baik dibanding dua tahun lalu	3,0%	20,9%	33,8%	38,9%	3,4%	100%
6	Sekarang ini, kemungkinan untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian saya lebih besar dibanding dua tahun lalu	1,0 %	12,2%	38,2%	41,9%	6,8%	100%
7	Sekarang ini terdapat peluang besar bagi warga kabupaten ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri	12,8%	22,9%	40,4%	20,5%	3,4%	100%
8	Sekarang ini, warga kabupaten ini mempunyai peluang besar untuk memperoleh bantuan/ pinjaman modal usaha dari Pemerintah	6,4%	26,5%	28,8%	34,6%	3,7%	100%

6. Perilaku Kolektif (*Collective Behavior*)

Pada umumnya informan yang pernah menjadi korban konflik beranggapan bahwa keadaan pada masa perdamaian jauh lebih baik dibanding dengan keadaan pada masa konflik. Masyarakat sudah bisa tidur dengan nyenyak, tidak perlu mengadakan ronda atau siskamling lagi, bisa lebih tenang mengusahakan pertanian dan perkebunan, anak-anak juga sudah bisa pergi ke sekolah dengan aman, dan banyak lagi manfaat dan kelonggaran-kelonggaran yang diperoleh masyarakat dengan adanya perdamaian. Kenangan pahit pada masa terjadinya konflik telah mendatangkan trauma cukup dalam di hati masyarakat. Oleh karena itu, mereka berharap, bagaimanapun, peristiwa yang pahit itu jangan sampai terulang lagi, di samping tetap juga berharap agar kesejahteraan mereka makin meningkat.

Posisi masyarakat umum setelah perdamaian sebenarnya tidak jauh berbeda dengan posisi pada masa konflik. Bedanya, jika pada masa konflik mereka berada ditengah-tengah pertempuran bersenjata untuk memperebutkan wilayah dalam status sebagai penonton, sedangkan sekarang pada masa setelah perdamaian, mereka juga dalam status sebagai penonton, berada ditengah-tengah pertempuran politik untuk memperebutkan akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Dalam kondisi tingkat kesejahteraan yang relatif rendah dan dirasakannya ketidakadilan dalam mengakses ke sumber-sumber ekonomi, secara tidak disadari telah terbentuk kesadaran kolektif di kalangan sebagian besar masyarakat berupa ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Namun demikian, kesadaran kolektif ketidakpuasan ini dibatasi pula dengan adanya kesadaran kolektif yang terbentuk dari pengalaman yang cukup lama dan menggoreskan kesan yang cukup dalam di kalangan warga masyarakat, bahwa keadaan konflik sangat menyengsarakan. Katup kesadaran terhadap hal ini yang sangat fungsional meredam kesadaran kolektif akan ketidakpuasan untuk tidak menjadi suatu gerakan kolektif yang bisa mengakibatkan konflik baru. Selain adanya kesadaran tentang sengsaranya masa-masa konflik, terbentuknya segmentasi warga masyarakat menjadi beberapa kelompok yang sulit disatukan, juga menjadi penghambat terjadinya suatu gerakan kolektif yang berasal dari kesadaran kolektif. Adanya kesadaran bahwa salah satu akibat konflik yang sangat merugikan masyarakat adalah hancurnya nilai-nilai moral Aceh yang bersumber dari syariat Islam. Hal ini nampak pada pernyataan sebagian besar responden (74,7%) yang menyatakan setuju terhadap kondisi tersebut. Di samping juga ketidaksetujuan sebagian besar responden (51,9%) terhadap adanya kerusakan yang disertai penjarahan.

Walaupun terdapat beberapa katup yang berpengaruh untuk menghambat terjadinya tindakan kolektif masyarakat yang bisa menyebabkan konflik baru, tetapi sebagian besar indikator yang

kondusif untuk menimbulkan tindakan kolektif nampaknya sudah perlu diwaspadai. Indikator-indikator tersebut antara lain:

- Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa kebijakan politik dan ekonomi tidak memikirkan nasib rakyat (53,0%).
- Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa masyarakat pesimis terhadap kemampuan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat (58,8%).
- Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa rakyat kecil pada umumnya buta politik, sehingga bila ada yang menggerakkan untuk berdemonstrasi menuntut perbaikan nasib pasti banyak yang ikut (60,6%).
- Sebagian besar responden menyatakan kurang, tidak dan sangat tidak setuju bahwa tindak korupsi dan kemaksiatan di kabupaten ini sudah sangat berkurang (77,1%).

Indikator yang sudah sangat perlu mendapat perhatian yang lebih serius adalah sangat besarnya simpati masyarakat terhadap perjuangan untuk menuntut keadilan bagi daerahnya. Kondisi ini terlihat dari jawaban responden terhadap pernyataan "*Masyarakat daerah ini umumnya cinta damai dan bersatu, tetapi mereka juga bersimpati terhadap perjuangan menuntut keadilan bagi daerahnya*" hampir seluruh responden (sebanyak 90,8%) menyatakan setuju terhadap pernyataan ini, dengan adanya penekanan yang kuat dengan jumlah responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 39,3%. Selain itu, kesulitan hidup yang dialami dalam jangka waktu relatif lama, membuat masyarakat lelah bersabar menunggu perbaikan taraf kehidupan. Kondisi ini nampak pada jawaban responden terhadap pertanyaan "*Dalam banyak hal, masyarakat daerah ini tidak bisa bersabar lagi menunggu pemerintah memberikan hak mereka sebagai warga negara*" sebagian besar responden (sebanyak 73,9%) menyatakan setuju dengan pernyataan ini. Secara lebih lengkap, distribusi frekuensi jawaban terhadap kedua pernyataan di atas dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

<i>Masyarakat daerah ini umumnya cinta damai dan bersatu, tetapi mereka juga bersimpati terhadap perjuangan menuntut keadilan bagi daerahnya</i>		<i>Dalam banyak hal, masyarakat daerah ini tidak bisa bersabar lagi menunggu pemerintah memberikan hak mereka sebagai warga negara</i>	
Sangat tidak setuju	1,0 %	Sangat tidak setuju	1,4%
Tidak setuju	1,4%	Tidak setuju	6,1%
Kurang setuju	6,8%	Kurang setuju	18,6%
Setuju	51,5%	Setuju	58,4%
Setuju Sekali	39,3%	Setuju Sekali	15,5%
Total	100%	Total	100%

7. Penutup

Sejak terjadinya perdamaian, kondisi keamanan diakui relatif membaik. Masyarakat merasakan ketenangan untuk kembali menjalani kehidupan normal dan melakukan usaha masing-masing. Perubahan suasana tersebut juga mengalihkan perhatian masyarakat dari yang pada mulanya menyangkut persoalan-persoalan keamanan, ke arah persoalan-persoalan bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menjalani sekian lama masa konflik, menyebabkan masyarakat banyak kehilangan sumber daya yang mereka miliki. Sehingga ketika mulai melihat arah untuk mencapai kesejahteraan, terasa adanya ketidakberdayaan dan kekurangan sumber daya. Di sisi lain, salah satu konsekuensi konflik yang cukup lama dengan berbagai tahapannya, secara tidak disadari telah terbentuk kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Antara kelompok-kelompok itu, masing-masing lebih memiliki kepercayaan dan solidaritas terhadap sesama anggota satu kelompok. Sedangkan dengan anggota kelompok-kelompok lain belum terjalin kepercayaan dan solidaritas yang optimal. Pihak yang dianggap berkewajiban dan paling

diharapkan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan mereka adalah pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Akan tetapi, harapan masyarakat terhadap pemerintah ternyata telah mendatangkan kekecewaan. Pemerintah Daerah termasuk anggota-anggota DPRK yang diharapkan paling bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, ternyata dianggap hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Sedikit sekali kalau tidak dapat dikatakan tidak memiliki kepedulian terhadap keadaan kesejahteraan rakyat. Sebagian menganggap pemerintah tidak ingin melakukan perbaikan tingkat kondisi kesejahteraan masyarakat. Banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dianggap bisa dipecahkan dengan bantuan pemerintah, masih belum dilakukan. Sehingga lambat laun, harapan-harapan yang ditujukan kepada pemerintah, berubah menjadi kekecewaan, ketidakpuasan dan keidakpercayaan. Masyarakat kecewa terhadap kinerja pemerintah dan berharap akan terjadi perubahan struktur atau personalia kepemimpinan dalam tampuk pemerintahan daerah. Salah satu arena yang diharapkan dapat menciptakan perubahan kepemimpinan tersebut adalah dengan media pilkada. Sehingga walaupun tetap ada keraguan apakah pejabat yang terpilih sebagai Kepala Daerah nanti benar-benar akan memiliki kepedulian dan komitmen tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mereka tetap berharap perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat akan lebih baik.

Modal sosial yang terdiri dari saling percaya, solidaritas, toleransi, dan kerjasama di dalam masyarakat masih eksis dan cukup kuat, walaupun pada umumnya lebih terjadi di kalangan sesama anggota suatu kelompok.

Berbagai jenis deprivasi yang dialami masyarakat pada masa konflik dan ketidakpuasan atas kondisi sosial ekonomi pada masa pasca perjanjian perdamaian Helsinki, telah membentuk suatu

kesadaran kolektif bahwa keadaan perlu berubah. Tetapi pengalaman pahit masa konflik dan terbentuknya segmentasi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, menjadi penghambat meningkatnya kesadaran kolektif ini menjadi perilaku kolektif (*collective behavior*)

BAB IV

P E N U T U P

Menutup seluruh uraian dan pembahasan tentang SEWS (*Social Early Warning System*) berdasarkan hasil diskusi terfokus, wawancara mendalam dan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah bagi atau dipermasalahkan oleh masyarakat Aceh Besar dan Aceh Selatan, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 harus menjadi momentum bagi perubahan Aceh dan masyarakatnya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bencana itu harus menjadi pembeda antara Aceh masa lalu dan Aceh di masa yang akan datang.
- (2) Di Aceh, jumlah korban tewas/hilang akibat gempa dan tsunami (data Posko Direktorat BSKBA Departemen Sosial RI per 18 Februari 2005) berjumlah 166.344 orang dan masih menyisakan pengungsi sebanyak 442.864 orang. Korban terbanyak adalah mereka yang berdiam di wilayah kabupaten pantai barat dan utara dataran Provinsi NAD karena minimnya pengetahuan dan pengalaman tentang dan menghadapi bencana tsunami. Mereka tidak memiliki sikap antisipatif terhadap tsunami seperti dimiliki oleh penduduk Pulau Simeleue.
- (3) Gempa dan tsunami hanyalah faktor anomie yang terbaru dalam sejarah kehidupan masyarakat Aceh. Faktor anomie sebelumnya dapat dikatakan dikuasai oleh masalah konflik yang beruntun sejak dari masa kerajaan, masa awal kemerdekaan RI, masa pemerintahan Orde Baru sampai masa reformasi saat ini.
- (4) Masalah deprivasi yang sesungguhnya sangat dirasakan oleh rakyat Aceh masih berkaitan dengan konflik, yaitu selama bertahun-tahun kehilangan rasa aman. Apabila konflik dianggap

cobaan dan peringatan (ujian) maka bencana gempa dan tsunami adalah cobaan, ujian dan bencana.

- (5) Secara kolektif masyarakat Aceh sangat aktif dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi (seperti konflik dan bencana). Respon terhadap konflik selain disebabkan oleh pengalaman selama bertahun-tahun, juga mereka mewarisi semangat perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan dari generasi ke generasi. Respon terhadap bencana yang biasanya disikapi secara “pasrah” dan “wajar” saja karena kedalaman paham mereka terhadap ajaran agama (Islam) bahwa segala sesuatunya adalah dari dan kembali kepada Tuhan YMK.

Sejak terjadinya perdamaian, kondisi keamanan diakui relatif membaik. Masyarakat merasakan ketenangan untuk kembali menjalani kehidupan normal dan melakukan usaha masing-masing. Perubahan suasana tersebut juga mengalihkan perhatian masyarakat dari yang pada mulanya menyangkut persoalan-persoalan keamanan, ke arah persoalan-persoalan bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menjalani sekian lama masa konflik, menyebabkan masyarakat banyak kehilangan sumber daya yang mereka miliki. Sehingga ketika mulai melihat arah untuk mencapai kesejahteraan, terasa adanya ketidakberdayaan dan kekurangan sumber daya. Di sisi lain, salah satu konsekuensi konflik yang cukup lama dengan berbagai tahapannya, secara tidak disadari telah terbentuk kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Antara kelompok-kelompok itu, masing-masing lebih memiliki kepercayaan dan solidaritas terhadap sesama anggota satu kelompok. Sedangkan dengan anggota kelompok-kelompok lain belum terjalin kepercayaan dan solidaritas yang optimal. Pihak yang dianggap berkewajiban dan paling diharapkan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan mereka adalah pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Akan tetapi, harapan masyarakat terhadap pemerintah ternyata telah mendatangkan kekecewaan. Pemerintah Daerah termasuk anggota-anggota DPRK yang diharapkan paling bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, ternyata dianggap hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Sedikit sekali kalau tidak dapat dikatakan tidak memiliki kepedulian terhadap keadaan kesejahteraan rakyat. Sebagian menganggap pemerintah tidak ingin melakukan perbaikan tingkat kondisi kesejahteraan masyarakat. Banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dianggap bisa dipecahkan dengan bantuan pemerintah, masih belum dilakukan. Sehingga lambat laun, harapan-harapan yang ditujukan kepada pemerintah, berubah menjadi kekecewaan, ketidakpuasan dan keidakpercayaan. Masyarakat kecewa terhadap kinerja pemerintah dan berharap akan terjadi perubahan struktur atau personalia kepemimpinan dalam tampuk pemerintahan daerah. Salah satu arena yang diharapkan dapat menciptakan perubahan kepemimpinan tersebut adalah dengan media pilkada. Sehingga walaupun tetap ada keraguan apakah pejabat yang terpilih sebagai Kepala Daerah nanti benar-benar akan memiliki kepedulian dan komitmen tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mereka tetap berharap perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat akan lebih baik.

Modal sosial yang terdiri dari saling percaya, solidaritas, toleransi, dan kerjasama di dalam masyarakat masih eksis dan cukup kuat, walaupun pada umumnya lebih terjadi di kalangan sesama anggota suatu kelompok.

Berbagai jenis deprivasi yang dialami masyarakat pada masa konflik dan ketidakpuasan atas kondisi sosial ekonomi pada masa pasca perjanjian perdamaian Helsinki, telah membentuk suatu kesadaran kolektif bahwa keadaan perlu berubah. Tetapi pengalaman pahit masa konflik dan terbentuknya segmentasi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, menjadi penghambat meningkatnya kesadaran kolektif ini menjadi perilaku kolektif (*collective behavior*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Dalam Angka*, 1996 – 2003. BPS, Provinsi NAD.
- Atteslander, P, (1995), Anomie Social Destabilisation and the Development of Early Warning System, *International Journal of Sociology and Social Policy*, Volume 15 No8/9/10, 1995
- Badruzzaman, H. (dkk). (2003). *Ekspose Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Featherstone, R and Deflem, M., 2003, Anomie and Strain: Context and Consequences of Merton's Two Theories. *Sociological Inquiry*, Vol. 73 No. 4, 471-489
- Hasymi, A. (1977). *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*. Penerbit "Bulan Bintang", Jakarta.
- Hasymi, A. (1996). *Wanita Aceh Sebagai Negarawan dan Panglima Perang*. Diterbitkan oleh PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Hoesin, Moehammad. (1970). *Adat Atjeh*. Penerbit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka*, BPS Aceh Besar.
- Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka*, (2005) BPS Aceh Selatan
- Patji, Abdul Rachman., dkk., (2004). *Negara dan Masyarakat Dalam Konflik Aceh, Studi tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Aceh*. Lembaga Ilmu Pengetahuan, Riset Kompetitif Pengembangan Iptek, Sub Program Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing, Jakarta.
- Penduduk Miskin Propinsi Daerah Istimewa Aceh 2001*. BPS, Provinsi NAD.

Sulaiman, Isa. dan HT. Syamsuddin (ed.), (2002). *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*. Edisi II, Cetakan II, Diterbitkan oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) - Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Syahra, Rusydi dkk (2000), Anomie dan Modal Sosial: Memahami Krisis Multi Dimnsional. Laporan Penelitian PMB-LIPI, Jakarta, 2000.

Sumber tabel:

BPS Aceh Besar.

BPS Aceh Selatan

BPS Provinsi NAD.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Kandep Agama Kabupaten Aceh Besar.

Posko Direktorat BSKBA Departemen Sosial RI.

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Aceh Besar.